

**PENGARUH MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
POLA TANGGUNG RENTENG TERHADAP
PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI LKM KUBE KOTA
YOGYAKARTA**



Oleh:
Yuli Afriyandi, S.E.I
NIM.: 10913162

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2014

**PENGARUH MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN POLA
TANGGUNG RENTENG TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI LKM KUBE KOTA YOGYAKARTA**



Oleh:
Yuli Afriyandi, S.E.I
NIM.: 10913162

Pembimbing:
Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Yuli Afriyandi, S.E.I

NIM : 10913162

Program Studi : Ekonomi Islam

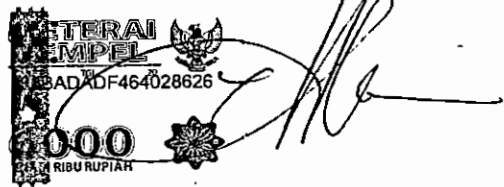
Judul Tesis : **Pengaruh Pembiayaan Pola Tanggung Renteng
Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif
Ekonomi Islam di LKM KUBE Kota Yogyakarta**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar tertentu di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atau hukuman apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2014

Yang Menyatakan



Yuli Afriyandi, S.E.I



PROGRAM PASCASARJANA
MAKSTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Yuli Afriyandi
Tempat/tgl lahir : Sapat, 27 Juli 1986
N. I. M. : 10913162
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN POLA TANGGUNG
RENTENG DI LKM KUBE KOTA YOGYAKARTA**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Pembimbing : Drs. Yusciani, M.Ag.

Penguji : Dr. H. Sidik Tono, MH

Penguji : M.B. Hendrie Anto, SE., M.Sc

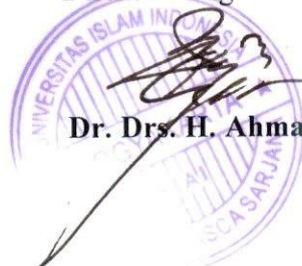
Diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2014

Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1225/PS-MSI/ND/II/2014

TESIS berjudul : **MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN POLA
TANGGUNG RENTENG DI LKM KUBE KOTA
YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Yuli Afriyandi

NIM : 10913162

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 13 Februari 2014

Ketua,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Manajemen Risiko Pembiayaan Pola Tanggung
Renteng di LKM KUBE Kota Yogyakarta

Ditulis oleh : Yuli Afriyandi, S.E.I

NIM : 10913162

Proram Studi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 07 Februari 2014

Mengetahui,

Ketua PPs FIAI UII

Pembimbing

Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Drs. YUSDANI, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf/Arab	Nama	Huruf/Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

THE EFFECT OF FINANCING RISK MANAGEMENT OF JOINT RESPONSIBILITY PATTERN TO NON PERFORMING FINANCING IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS IN MICROFINANCE INSTITUTION (LKM) OF KUBE YOGYAKARTA

Yuli Afriyandi
NIM. 10913162

The LKM of KUBE is a non-bank microfinance institution which is a project of Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia to address the wide spectrum of issues against poverty. The objective of this project is to provide business loans to poor households in urban and rural areas and as a forum for community empowerment.

As a financial institution in a micro sector and a saving-loan service provider to poor households, the LKM of KUBE seems under risk crank. There is an assumption that the micro sector is a prone sector for the emergence of various risks, especially in terms of financial risk or financing risk to financial institutions that provide services of savings and loans. Therefore, to anticipate financing risk, the LKM of KUBE implements a joint responsibility. In this research, researcher describes the application of joint responsibility in the LKM of KUBE and the dynamics that arise. And the researcher succeeds to prove that the pattern of joint responsibility has positive effect on decrease in the number of non-performing financing (NPF).

Keyword: Microfinance Institution, KUBE, Risk Management, joint responsibility, Non Performing Financing.

ABSTRAKSI

PENGARUH MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN POLA TANGGUNG RENTENG TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI LKM KUBE KOTA YOGYAKARTA

Yuli Afriyandi
NIM. 10913162

LKM KUBE adalah lembaga keuangan mikro non bank yang merupakan proyek Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menjawab spektrum berbagai isu dalam memerangi kemiskinan. Adapun tujuan dalam proyek ini untuk menyediakan pinjaman usaha bagi rumah tangga miskin di perkotaan dan perdesaan dan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di sektor mikro, penyedia jasa simpan pinjam bagi rumah tangga miskin, LKM KUBE seperti berada di bawah pusaran risiko. Ada asumsi bahwa sektor mikro merupakan sektor yang rawan munculnya berbagai macam risiko, terlebih dalam hal risiko keuangan/pembiayaan pada lembaga keuangan yang melayani jasa simpan pinjam. Untuk itu, dalam mengantisipasi risiko pembiayaan tersebut, LKM KUBE menerapkan pola tanggung renteng. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskriptifkan aplikasi tanggung renteng di LKM KUBE serta dinamika yang muncul. Dan peneliti berhasil membuktikan bahwa pola tanggung renteng berpengaruh positif terhadap penurunan angka pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).

Kata kunci: *LKM, KUBE, Manajemen Risiko, Tanggung Renteng, Non Performing Financing.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Tesis ini merupakan tugas akhir yang mengangkat persoalan manajemen risiko. Karena setiap manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari ancaman risiko. Baik risiko yang terjadi pada dirinya (manusia), ataupun risiko dalam pekerjaan atau usaha. Karena risiko merupakan suatu ketidakpastian, karenanya perlu suatu perencanaan (manajemen) dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan risiko yang muncul.

Pembahasan manajemen risiko dengan spesifikasi pada persoalan manajemen risiko pembiayaan pola tanggung renteng studi kasus di LKM KUBE Kota Yogyakarta. Tentu saja semua isi dalam karya ini merupakan hasil analisis dari gabungan antara teori-teori manajemen risiko pembiayaan, tanggung renteng dan lain sebagainya, dengan pengalaman penerapannya di LKM KUBE Kota Yogyakarta.

Segala pihak yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung dalam membantu penulis mengumpulkan data, penulis tentunya mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal.

Secara khusus pula penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd, Direktur Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII).

4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII).
5. Drs. H. Anwan Santoso dan segenap dosen dan pengurus harian yang ada di Kampus MSI-UII
6. Drs. YUSDANI, M.Ag selaku pembimbing tesis penulis yang banyak memberikan arahan, usulan, koreksi dan lain sebagainya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
7. Para pengelola, pengurus dan anggota LKM KUBE Kota Yogyakarta yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
8. Kepada Ayahanda dan Ibunda serta saudara-saudara kandungku dan keluarga, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan doanya, serta tidak lupa kepada Ike Kusumaningtyas yang tidak pernah bosan memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Pada akhirnya, karya kecil ini penulis serahkan kepada pembaca, segala kritik dan saran atas kekurangan dan kekeliruan dalam karya ini sangat penulis harapkan. Dan semoga karya ini menjadi amal jariyah penulis dan semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 26 Januari 2014



Yuli Afriyandi

DAFTAR ISI

HALAMAN ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-7
A. LatarBelakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	8-47
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	16
1. Lembaga Keuangan Mikro.....	16
2. Manajemen Risiko	29
3. Pembiayaan Tanggung Renteng	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	48-54
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian	48
2. Lokasi Penelitian.....	48
B. Sifat Penelitian	48
C. Pendekatan Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	55-125
A. Hasil Penelitian.....	55
1. Profil LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta	55
2. Perkembangan Usaha LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta	63
3. Produk-produk LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta.....	76
4. Pembiayaan Pola Tanggung Renteng di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta	81
a. Pembiayaan pola tanggung renteng	85
b. Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah.....	95
c. Perkembangan dan pengaruh pembiayaan pola tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan	100
d. Dinamika dalam aplikasi pembiayaan pola tanggung renteng	106

B. Analisis Penelitian	109
BAB V PENUTUP	126-127
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128-132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Kategori Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro	36
2. Tabel 2: Jam Kerja Karyawan LKM KUBE Kec. Wirobrajan	54
3. Tabel 3: Jam Kerja Karyawan LKM KUBE Kec. Danurejan	57
4. Tabel 4: Jam Kerja Karyawan LKM KUBE Kec. Umbulharjo	59
5. Tabel 5: Perkembangan Asset LKM KUBE Kec. Wirobrajan	60
6. Tabel 6: Perkembangan Pembiayaan LKM KUBE Kec. Wirobrajan	61
7. Tabel 7: Perkembangan Simpanan LKM KUBE Kec. Wirobrajan ..	62
8. Tabel 8: Perkembangan Laba LKM KUBE Kec. Wirobrajan	63
9. Tabel 9: Jumlah Penabung dan Peminjam LKM KUBE Kec. Wirobrajan	64
10. Tabel 10: Jumlah KUBE binaan LKM KUBE Kec. Wirobrajan	65
11. Tabel 11: Perkembangan Asset LKM KUBE Kec. Danurejan	66
12. Tabel 12: Perkembangan Pembiayaan LKM KUBE Kec. Danurejan	66
13. Tabel 13: Perkembangan Simpanan LKM KUBE Kec. Danurejan ..	67
14. Tabel 14: Perkembangan Laba LKM KUBE Kec. Danurejan	67
15. Tabel 15: Jumlah Penabung dan Peminjam LKM KUBE Kec. Danurejan	68
16. Tabel 16: Jumlah KUBE binaan LKM KUBE Kec. Danurejan	69
17. Tabel 17: Perkembangan Asset LKM KUBE Kec. Umbulharjo	69
18. Tabel 18: Perkembangan Pembiayaan LKM KUBE Kec. Umbulharjo	70
19. Tabel 19: Perkembangan Simpanan LKM KUBE Kec. Umbulharjo	70
20. Tabel 20: Perkembangan Laba LKM KUBE Kec. Umbulharjo	71
21. Tabel 21: Jumlah Penabung dan Peminjam LKM KUBE Kec. Umbulharjo	72
22. Tabel 22: Jumlah KUBE binaan LKM KUBE Kec. Umbulharjo	73

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1: Analisis Interaktif.....	51
2. Gambar 2: Mekanisme Pembentukan KUBE	83



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : *Struktur Organisasi LKM KUBE Kota Yogyakarta*

Lampiran 2 : *Laporan Keuangan LKM KUBE Kota Yogyakarta*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditinjau dari aspek legalitas, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia memiliki dua bentuk, yakni bank dan non bank. Yang berbentuk bank dikenal dengan nama BPR/S (Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah), sedangkan yang berbentuk non bank lebih dikenal sebagai Koperasi. Selanjutnya, yang membedakan dua LKM ini selain pada aspek legalitas atau badan hukum juga terletak pada lembaga yang menaunginya sebagai regulator, pengawas dan monitoring. BPR/S merupakan lembaga yang bernaung di bawah Bank Indonesia, segala aspek regulator, pengawas dan monitoring telah disusun ketat oleh Bank Indonesia. Sedangkan LKM non Bank yang berbadan hukum Koperasi dinaungi oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing Propinsi, Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pembina dan pengawas.

Pada umumnya LKM tumbuh dan berkembang melalui berbagai macam program baik swadaya masyarakat maupun modal pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Seperti halnya LKM Kelompok Usaha Bersama (LKM KUBE) yang merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dalam rangka penanganan fakir miskin di

daerah *sub urban*,¹ yang kemudian program LKM KUBE ini menjadi program andalan di Dinas Sosial di beberapa daerah termasuk Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta, melalui program Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta (PINBUK DIY) telah melahirkan tiga LKM KUBE.² Tiga LKM KUBE yang disebut sebagai LKM KUBE Sejahtera itu terletak di tiga Kecamatan yakni, Wirobrajan, Danurejan dan Umbulharjo.

Pada prinsipnya, LKM KUBE di seluruh Indonesia termasuk di Kota Yogyakarta berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), sehingga dalam operasionalnya memiliki kemiripan dengan bank pada umumnya yaitu menghimpun dana masyarakat (anggota) dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan skala mikro. Dengan demikian, dalam memasarkan produk jasa keuangannya (penghimpunan/*funding* maupun penyaluran/*landing*) tersebut tidak terlepas daripada risiko, maka manajemen risiko yang baik harus diterapkan secara ketat agar kelangsungan hidup lembaga ini dapat berjalan dengan baik.

Risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang ada di lembaga keuangan. Olehkarena itu, suatu lembaga berusaha melindungi aktivitasnya, mengantisipasi dan meminimalisir risiko

¹ Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Melalui KUBE dan LKM, *Departemen Sosial RI*, (Januari 2004), hlm.12.

² Sumber Data PINBUK DIY 2013

dengan melakukan langkah-langkah preventif.³ Dalam hal ini, langkah preventif yang dilakukan oleh LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta yaitu dengan menerapkan pembiayaan pola tanggung renteng.

Pola tanggung renteng yang diterapkan dalam skim pembiayaan di LKM KUBE merupakan satu langkah *preventif* dalam pencegahan risiko pembiayaan, karena skim yang digunakan menuntut tanggung jawab bersama jika terjadi suatu pembiayaan bermasalah (macet). Sesuai dengan pengertian tanggung renteng yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, sedangkan kata 'renteng' berarti rangkaian, untaian,⁴ dalam dunia perkreditan, tanggung renteng diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjamahnya atas hutang yang dibuatnya.⁵

Pembebanan tanggung jawab atas anggota yang bermasalah dalam suatu kelompok merupakan satu kesepakatan yang harus dipatuhi secara bersama-sama dalam pengajuan pembiayaan di LKM KUBE. Untuk itu, setiap pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota KUBE, harus mengisi formulir kesediaan tanggung renteng yang disetujui oleh anggota KUBE lainnya. Persetujuan anggota KUBE lainnya merupakan syarat utama dalam pengajuan

³ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, cet. 1, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 55.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991.

⁵ Andriani S. Soemantri, dkk, *Tanggung Renteng: Setia Bhakti Wanita*, (Surabaya: Limpad, 2003), hlm. 46.

pembiayaan kepada LKM KUBE. Sehingga dengan menerapkan pola ini, LKM KUBE terbukti berhasil menekan tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)* rata-rata di bawah batas maksimum yaitu 5%.⁶

Pada LKM KUBE Kecamatan Wirobrajan misalnya, *npf* per Desember 2010, 2011, 2012 dan per Nopember 2013 sebesar 0,00%. Sedangkan pada LKM KUBE Kecamatan Danurejan, data *npf* per Desember 2011, 2012, dan per Nopember 2013 adalah sebesar 2,89%, 4,77%, dan 16,56%. Namun agak sedikit berbeda dengan data *npf* di LKM KUBE Kecamatan Umbulharjo yang melebihi batas maksimum seperti pada laporan per Desember 2011, 2012 dan per Nopember 2013 sebesar 22,01%, 19% dan 30,60%.⁷

Tinggi rendahnya *npf* menunjukkan manajemen risiko di suatu lembaga. *NPF* yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi pada sisi pembiayaannya, demikian pula *npf* yang rendah mencerminkan rendahnya risiko pembiayaan pada suatu lembaga. Dari data *npf* tersebut terdapat beberapa perbedaan data *npf* di LKM setiap Kecamatan. Hal ini tentu juga berkaitan dengan dinamika penerapan manajemen risiko pembiayaan pola tanggung renteng yang tentu di setiap Kecamatan memiliki permasalahan yang berbeda-beda, sehingga dalam hal ini penulis tertarik meneliti diterapkannya sistem manajemen risiko pembiayaan pola tanggung renteng di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta.

⁶ 5% merupakan batas maksimum rasio portofolio pembiayaan berisiko sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

⁷ Data di olah dari *Laporan Break Down Kolektibilitas*

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dimunculkan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pola tanggung renteng di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko pembiayaan pola tanggung renteng terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta?

C. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan pembiayaan pola tanggung renteng di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta.
2. Menganalisis dampak pembiayaan pola tanggung renteng terhadap tingkat risiko pembiayaan di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta.

D. Manfaat

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik

Memperdalam khasanah pengetahuan serta kajian model pembiayaan dan strategi penerapan manajemen risiko pembiayaan di lingkungan LKM KUBE Sejahtera khususnya dan umumnya bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

2. Secara praksis

Sebagai inputan pengetahuan bagi peneliti maupun praktisi dalam mencapai terciptanya lembaga keuangan mikro yang sehat dan berjalan baik.

E. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan tesis ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan tesis.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan tesis secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan landasan teori untuk menguatkan argumentasi penelitian. Pada kajian penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang berkaitan dengan manajemen risiko dan lembaga keuangan mikro. Dan pada landasan teori menggambarkan tinjauan umum tentang lembaga keuangan mikro, manajemen risiko dan pembiayaan pola tanggung renteng.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang menggambarkan tentang jenis penelitian yang diambil, pendekatan masalah yang dipilih, subjek penelitian yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan menentukan lokasi penelitian.

Bab keempat, pada bab ini, penyusun menjabarkan hasil penelitian berikut dengan analisisnya. Pada sub bab awal, penyusun menggambarkan secara umum tentang profil LKM KUBE di Kota Yogyakarta, penerapan pembiayaan pola tanggung renteng, perkembangan dan kualitas pembiayaan pola tanggung renteng, problematika dalam aplikasi pembiayaan pola tanggung renteng, prosedur penanganan pembiayaan bermasalah dan analisis dari pembahasan.

Bab ke lima, adalah penutup yang menampilkan kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian telah dirangkum baik berupa buku maupun jurnal ilmiah berkaitan dengan pembahasan LKM, manajemen risiko dan tanggung renteng. Beberapa penelitian terkait juga lebih banyak membahas seputar strategi LKM dalam pengentasan kemiskinan. Adapun penelitian yang lebih khusus membahas strategi manajemen risiko pada kredit atau pembiayaan di LKM dengan pola tanggung renteng bisa dikatakan relatif sedikit.

Hasil kajian yang dibukukan, disusun oleh Eddy Roesdiono, berjudul; “Tanggung Renteng; Sebuah Biografi Mursia Zaafril Ilyas” serta buku yang ditulis oleh Andriani S. Soemantang tanggung renteng dkk, berjudul “Tanggung Renteng Setia Bhakti Wanita” diterbitkan oleh Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita. Dua buku tersebut secara spesifik membahas pengalaman pelaksanaan model tanggung renteng oleh Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita berlokasi di Kota Surabaya.

Pada buku yang disusun oleh Eddy Roesdiono tersebut, selain mendeskripsikan pengalaman penerapan tanggung renteng dalam penyaluran kredit di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita juga mengungkap dinamika penerapan tanggung renteng di lapangan. Dari buku tersebut dapat disimpulkan

bahwa dengan pola tanggung renteng dalam penyaluran pembiayaan dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan Koperasi.

Adapun penelitian selanjutnya yang telah berhasil di cetak menjadi sebuah buku adalah penelitian dari Tim Pengarusutamaan Gender Bidang KUKM Kementrian Negara dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2006. Buku tersebut berjudul; “Pengembangan Usaha Mikro Pola Tanggung Renteng”. Buku inipun membahas pengertian, sistem dan aturan tanggung renteng.

Di mana di dalam buku ini diungkap mengenai prosedur dan aturan dalam bertanggung renteng. Dari buku ini sebetulnya pola tanggung renteng yang diterapkan tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta. Letak perbedaannya hanya pada manajemen kelompok.

Dari jurnal penelitian, penulis berhasil menelusuri beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh lembaga *Microfinance Innovation Center For Resources and Alternatives*,⁸ penelitian ini mengangkat tema tentang *Government Community Development Operations: Microfinance and Microcredit Project*. Salah satu temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa LKM merupakan mitra strategis dalam melayani kelompok KUBE melalui penggalangan simpanan dan penyaluran pinjaman. Keberhasilan LKM merupakan salah satu indikator kunci

⁸ Microfinance Innovation Center for Resources and Alternatives (MICRA), “Government Community Development Operations: Microfinance and Microcredit Projects”, Jakarta, 30 Juli 2007

bagi pencapaian dan keberlanjutan proyek. Namun, dalam pelaksanaannya kunjungan dan pemantauan rutin ke usaha kelompok jarang dilakukan selain pertemuan mingguan kelompok. Hal tersebut seringkali mengakibatkan hasil analisa menunjukkan pengembalian pinjaman sangat buruk.

Temuan dari penelitian di atas merupakan hasil kajian program LKM KUBE secara nasional. Walaupun tidak secara spesifik membahas tema yang berkaitan dengan penelitian penulis, tapi dari sini dapat dibangun satu kerangka teori bahwa monitoring LKM kepada usaha kelompok KUBE berpengaruh kepada pengembalian pinjaman.

Penelitian yang berkaitan dengan LKM dan KUBE juga dilakukan oleh Dian Pratomo beserta Musa Hubeis dan Illah Sailah. Penelitian ini membahas mengenai strategi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengembangkan usaha mikro.⁹ Hasil penelitian ini salah satunya mengungkap bahwa tingkat keberhasilan usaha nasabah di karenakan adanya bimbingan dan arahan dari LKM BMT baik teknis usaha maupun manajemen usaha.

Berkaitan dengan hal ini, penelitian ini juga menyinggung tentang aktifitas pembiayaan berkelompok yang tentu saja menerapkan pola-pola tanggung renteng didalamnya, dan hal ini dinilai berhasil meningkatkan keberhasilan usaha anggota.

⁹ Dian Pratomo, dkk. "Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro (Kasus LKMS BMT KUBE Sejahtera Unit 20 Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta)", *Jurnal* tidak di publikasikan.

Riska Dwi Syam Anggraini,¹⁰ juga meneliti tentang hubungan LKM dan KUBE, akan tetapi lebih spesifik kepada pengaruh model pembiayaan tanggung renteng dan pendampingan usaha anggota. Hasil kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah bahwa pembiayaan tanggung renteng dan pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota berpengaruh positif. Efektivitas pembiayaan tanggung renteng disertai dengan pendampingan terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha anggota LKM Kube.

Penelitian ini berlokasi di LKM KUBE di Kabupaten Sleman yang juga merupakan salah satu LKM KUBE program Dinas Sosial D.I Yogyakarta bekerjasama dengan PINBUK DIY. Walaupun tidak mengangkat persoalan pembiayaan pola tanggung renteng sebagai bagian dari manajemen risiko, akan tetapi penelitian ini cukup memberikan argumentasi yang berarti bagi penulis.

Ikaputera Waspada dalam penelitiannya yang berjudul; “Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Komunitas Untuk Pengembangan Usaha Mikro di Kota Bandung”, memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya dalam lembaga keuangan mikro berbasis komunitas atau kelompok terbukti efektif untuk mengurangi biaya dan risiko dalam penyaluran dana pinjaman. Dalam penelitian

¹⁰ Riska Dwi Syam Anggraini, “Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota LKM KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012

ini juga disimpulkan bahwa lembaga keuangan berbasis komunitas sangat penting dalam pengembangan usaha mikro sebagai sumber pembiayaan yang mudah di akses usaha mikro.

Namun secara spesifik penelitian ini tidak mengungkap mengenai skim pembiayaan kelompok serta analisis terhadap pengaruh tingkat kredit macet.

Tesis Chandra Dewi, tahun 2009 yang berjudul Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan: Studi Kasus pada Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Jawa Tengah¹¹, memberikan satu kesimpulan bahwa kondisi internal BPR, kondisi debitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi pemberian kredit.

Selain itu, strategi pemberian kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL). Hasil ini di analisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif melalui indeks dan analisis inferensial dengan teknik *Structural Equation Modeling* (SEM). Adapun hasil pengujian hipotesis disimpulkan terdapat beberapa implikasi manajerial yang dapat dilakukan berkaitan dengan penetapan strategi pemberian kredit untuk menekan/ menurunkan NPL, yaitu mempertimbangkan faktor alam dalam strategi pemberian kredit di sektor pertanian, menganalisis kondisi perekonomian dan persaingan usaha saat ini dan yang akan datang.

¹¹ Chandra Dewi, “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan” (Studi Kasus pada Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Jawa Tengah), *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.

Penelitian Ernawati Nandifah, tahun 2008, berjudul; “Analisis Manajemen Risiko Kredit Umum Pedesaan Dengan Bantuan Simulasi Program Komputer: Studi Kasus BRI Unit Ciampea, Bogor.”¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi risiko kredit Kupedes, mengukur potensi kerugian kredit Kupedes dengan metode credit risk + Portofolio serta mengkaji kesesuaian metode tersebut, dan mengetahui pengelolaan dan pengendalian (program mitigasi) risiko kredit Kupedes.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi risiko kredit Kupedes BRI Unit Ciampea yaitu kualitas SDM, karakter debitur, dan laju perekonomian debitur. Adapun upaya pengelolaan dan pengendalian risiko kredit dengan menerapkan prinsip 5C, penetapan kolektabilitas debitur, pembentukan PPAP, IPTW, pembinaan dan penagihan intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, peningkatan kualitas SDM, dan kerjasama dengan perusahaan asuransi.

Penelitian ini sebetulnya menjadi acuan penulis dalam membandingkan model pengendalian risiko pada LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta yang juga menganut teori umum 5 C. Oleh Kim (2005), dalam penelitiannya juga menyinggung bahwa metode penilaian kredit yang umum dipakai dalam menganalisa kualitas kredit yang disalurkan perbankan maupun lembaga

¹² Ernawati Nandifah, “Analisis Manajemen Risiko Kredit Umum Pedesaan Dengan Bantuan Simulasi Program Komputer: Studi Kasus BRI Unit Ciampea, Bogor”, *Skripsi*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008.

keuangan lainnya kepada debitur yaitu 5 C (*character, capital, capacity, condition of economic* dan *colletral*).

Lain halnya dengan penelitian Sheila Santika Putri tahun 2011, penelitian yang merupakan tugas akhir studi sarjana ini lebih fokus membahas mengenai manajemen risiko pembiayaan studi kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah KBMT Wihdatul Ummah.¹³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada tahun 2006 hingga 2011 cenderung menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya pembiayaan bermasalah tersebut adalah sistem penilaian kelayakan mitra di dalam menentukan kolektibilitas dan periode pembiayaan mitra berdasarkan fungsi diskriminan adalah faktor pendekatan karakter dan faktor persyaratan BMT.

Penelitian oleh Aan Afrianti,¹⁴ memberikan beberapa kesimpulan bahwa strategi dalam menekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yaitu selalu mematuhi SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan, melakukan binaan terhadap usaha anggota, dan sering bersilaturahmi kepada anggota.

Penelitian ini juga banyak mengungkap tentang dinamika dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah serta strategi-strategi penyelesaiannya di lapangan.

¹³ Sheila Santika Putri, "Kajian terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, KBMT Wihdatul Ummah", *Skripsi*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012.

¹⁴ Aan Afrianti, "Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF), Studi Kasus Pada KJKS Syariah Arrahmah Cinere". *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2010.

Penelitian oleh Ashari¹⁵ cukup menjadi rujukan penulis dalam memahami LKM dan potensinya kedepan. Dimana dalam penelitian ini disebutkan bahwa LKM memiliki potensi sebagai sumber pembiayaan masyarakat walaupun dari ketersediaan dana tidak sebesar lembaga perbankan formal. Disebutkan lagi bahwa keunggulan LKM terletak pada komitmen yang kuat dalam memberdayakan kelompok usaha mikro/kecil, prosedur lebih fleksibel. Berkaitan dengan potensi LKM, penelitian oleh Ani Murwani Muhar¹⁶ juga mengungkapkan bahwa LKM mempunyai potensi yang cukup besar, hanya saja belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena LKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan yang tumpang tindih, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaannya dan kecukupan modal.

Namun dari beberapa penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang spesifik membahas model pembiayaan kelompok dalam hal ini tanggung renteng sebagai bagian dari sistem manajemen risiko. Walaupun ada yang membahas mengenai model pembiayaan kelompok, tetapi hanya bersifat deskriptif. Oleh karena itu, menarik bagi penulis untuk meneliti lebih spesifik mengenai pembiayaan tanggung renteng sebagai bagian dari sistem manajemen risiko.

¹⁵ Ashari, "Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 4, No. 2, Jakarta, 2006.

¹⁶ Ani Murwani Muhar, "Kebijakan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal INOVASI*, Vol. 6, No. 4, Medan, 2009.

B. Kerangka Teori

1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Sebelum mendefinisikan LKM ada baiknya kita mengetahui definisi keuangan mikro terlebih dahulu. Menurut definisi yang dikeluarkan *Micro Credit Summit* (1997), Keuangan Mikro adalah program pinjaman uang terhadap keluarga miskin untuk digunakan sebagai usaha yang memberikan hasil dan income dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.¹⁷ Definisi ini jelas menyatakan yang berhak untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah keluarga miskin dengan prinsip pinjaman, tanpa pengecualian apakah si miskin nanti dapat memenuhi dan melunasi hutang atau tidak.

Berkaitan dengan hal ini, keuangan mikro merupakan satu program yang erat kaitannya dengan kelembagaan keuangan yang mengatur agar aktifitas penyaluran kredit tersebut dapat berjalan baik. Untuk itu lembaga yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan LKM.

Definisi LKM yang diajukan oleh beberapa pakar dan organisasi nampak saling berbeda satu sama lain walau pada dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu merujuk keuangan mikro sebagai upaya penyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit / pembiayaan, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan

¹⁷ Ascarya and Yulizar S, dalam *Redefine Micro, small and medium Enterprises Clasiffication*, hlm. 3.

berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial atau tidak *bankable*.

Adams dan Fitchett¹⁸ mendefinisikan LKM sebagai berikut:

“Microfinance institutions also play an important role in serving credit to individuals, farmers and small-scale enterprise”.

Pendapat Adams dan Fitchett ini lebih mencirikan LKM sebagai sebuah lembaga pendididkan yang dinamis, inovatif, dan lentur yang dirancang sesuai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal.

Dalam bukunya *Microfinance Handbook* yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Joanna Ledgerwood (2006) menyatakan bahwa istilah keuangan mikro menunjuk pada penyediaan jasa-jasa keuangan (biasanya berupa simpanan dan kredit) kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa (penata rambut, penarik becak), dan tukang serta produsen kecil seperti pandai besi dan penjahit. Dia menunjukkan bahwa di antara para nasabah tersebut banyak yang memiliki sumber penghasilan yang mapan karena mereka memiliki sumber penghasilan ganda. Meskipun mereka miskin, pada umumnya mereka tidak dianggap sebagai “orang-orang yang paling miskin di antara yang miskin.”¹⁹

¹⁸ Adam and Fitchett, dalam Lincolin Arsyad, “Microfinance Institutions And Economic Development: Evidence from Developing Countries”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 21, No. 3, 2006, hlm. 12.

¹⁹ Joanna Ledgerwood, “Transforming Microfinance Institutions: Providing Full Financial Services to the Poor”, The International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank, 2006)

Bank Pembangunan Asia (ADB) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro mereka.²⁰

Definisi ADB tersebut mencakup rumah tangga berpenghasilan rendah dan juga rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan karena ada cukup banyak rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak berada di bawah garis kemiskinan tetapi memiliki akses yang terbatas terhadap jasa keuangan, terutama di daerah pedesaan.

Robinson (2000), menekankan bahwa istilah keuangan mikro merujuk pada “jasa-jasa keuangan berskala kecil, terutama kredit dan simpanan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertani, mencari ikan atau beternak; yang memiliki usaha kecil atau mikro yang memproduksi, mendaur ulang, memperbaiki atau menjual barang-barang; yang menjual jasa; yang bekerja untuk mendapatkan upah dan komisi; yang memperoleh penghasilan dari menyewakan tanah, kendaraan, binatang atau mesin dan peralatan dalam jumlah kecil; dan kelompok-kelompok dan individu lain pada tingkat-tingkat daerah di negara-negara yang sedang berkembang (NSB), baik daerah pedesaan maupun perkotaan”.²¹

²⁰ Evaluation Study, Asian Development Bank Support for Decentralization in Indonesia, 2010.

²¹ Marguerite S. Robinson, *Revolusi Keuangan Mikro: Volume 2 Pelajaran dari Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 9.

Sebuah definisi yang sedikit berbeda dirumuskan oleh Meagher (2002). Dia berpendapat bahwa keuangan mikro adalah pemberian pinjaman uang dalam jumlah kecil dan dalam jangka waktu yang singkat dengan frekuensi pelunasan yang tinggi.²² Dalam kaitannya dengan definisi LKM, dia berpendapat bahwa prinsip utamanya adalah untuk memberikan definisi yang akan dapat menjadikan anggota-anggota pasar memiliki tanggung jawab, penuh semangat, dan inovatif. Secara hukum definisinya harus cukup luas sehingga dapat difokuskan pada kelompok sasaran tertentu dan dapat menyediakan jasa keuangan dengan ragam yang luas sesuai dengan kelompok tersebut. Dalam pelaksanaannya, selain perantara keuangan, beberapa LKM juga menyediakan jasa perantara sosial seperti pembentukan kelompok, pengembangan kepercayaan diri, dan pelatihan pengetahuan keuangan dan kemampuan manajemen untuk anggota sebuah kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki berpenghasilan rendah. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang berpenghasilan rendah harus berjuang menghadapi hambatan yang berat (seperti buta huruf, diskriminasi gender dan keterpencilan) dalam usahanya untuk memperoleh akses terhadap lembaga jasa keuangan konvensional.²³

²² *Ibid*

²³ Joanna Ledgerwood, "Transforming Microfinance Institutions.", hlm. 362.

Hal ini berarti bahwa selain memberikan akses kepada orang-orang berpenghasilan rendah terhadap pengadaan pinjaman, keterampilan dan kepercayaan diri mereka juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu pendekatan keuangan mikro bukanlah pendekatan minimalis yang hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan saja akan tetapi merupakan pendekatan terpadu yang juga menawarkan jasa-jasa lain yang telah disebutkan di atas. Pendekatan tersebut diharapkan juga dapat mengurangi kemiskinan dan mengembangkan dan memperkuat kapasitas institusional sistem keuangan lokal dengan menemukan cara yang terbaik untuk dapat meminjamkan uang kepada keluarga miskin dengan biaya minimum.

Walaupun terdapat banyak definisi LKM, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tentang LKM. *Pertama*, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi. *Kedua*, melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. *Ketiga*, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang

dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.²⁴

Dengan demikian LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan Usaha Mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana (*saving*) yang dijadikan prasyarat bagi adanya kredit walaupun pada akhirnya sering kali jumlah kredit yang diberikan lebih besar dari dana yang berhasil dihimpun.

Namun demikian, permasalahan yang dihadapi oleh LKM bukan bank pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan jangkauan pelayanan LKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas, sehingga pengembangan LKM yang luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat LKM dapat dilakukan melalui:²⁵

²⁴ Krishnamurti, 2005 dalam Ihwan Susila, "Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8, No. 2 tahun 2008, hlm. 228.

- a) Perkuatan permodalan dan manajemen lembaga keuangan masyarakat (KSP/USP dan LKM);
- b) Penggalangan dukungan dan fasilitasi pembiayaan UKMK dengan lembaga keuangan;
- c) Penggalangan partisipasi berbagai pihak dalam pembiayaan UKMK (Pemda, Luar Negeri dll);
- d) Optimalisasi pendayaagunaan potensi pembiayaan UKMK di daerah (Bagian Laba BUMN, Dana Bergulir, Yayasan, Bantuan Luar Negeri);
- e) Peningkatan *Capacity Building* LKM;
- f) Training bagi pengelola LKM, untuk meningkatkan kapasitas pengelola LKM;
- g) Perlu adanya lembaga penjamin untuk menjamin kredit LKM dan tabungan nasabah LKM dan;
- h) BDS yang mampu memberikan fasilitasi manajemen, keuangan, dll.

Pengembangan LKM kedepan harus diarahkan untuk menjadikan LKM sehat, kuat, merata dan mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan usaha mikro kecil agar mampu menghadapi tantangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Pengendalian dan pembinaan/fasilitasi, serta pengembangan kelembagaan (organisasi dan manajemen), meningkatkan kompetensi dan

²⁵ Noer Soetrisno, *Lembaga Keuangan Mikro: Energi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat?*, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 8.

profesionalisme pengelola LKM melalui diklat terus menerus sangat diperlukan. Pengembangan kemampuan layanan bagi anggota, meningkatkan jumlah produk keuangan yang didukung dengan pengembangan jejaring.

Adapun menurut Soetrisno²⁶, arah LKM ke depan harus meliputi;

- 1) Mengatasi legal status agar jelas, diarahkan menjadi Bank, Koperasi atau LKM²⁷
- 2) Pengawasan lebih intensif untuk melindungi pihak ketiga (penabung)
- 3) Pengembangan jaringan melalui penumbuha lembaga keuangan sekunder, jaringan on line untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat lokal.

Dengan demikian pelayanan yang luas serta menjangkau lapisan usaha mikro yang luas akan membawa pasar keuangan lebih bersaing, sehingga ketergantungan usaha mikro terhadap pelepas uang dapat ditekan atau ditiadakan. Pola pengembangan LKM juga harus memberikan pilihan yang luas bagi masyarakat nasabah apakah melalui pola konvensional atau pola bagi hasil (pola syariah).

Karakteristik LKM

Berdasarkan bentuknya, LKM dibagi menjadi tiga yaitu, *Pertama*, lembaga formal seperti bank desa dan koperasi. Kedua, lembaga semi formal

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁷ Aspek legalitas LKM telah di sahkan dengan lahirnya Undang-Undang No.1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, adapun dalam aspek pengawasan, LKM tunduk pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam lembaga keuangan.

misalnya organisasi non pemerintah. Dan ketiga, sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang.

Dalam berbagai pendapat lainnya ada yang membedakan LKM menjadi 4 golongan besar yaitu:²⁸

1. LKM formal, baik bank maupun non bank
2. LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak
3. LKM yang dibentuk melalui program pemerintah, dan
4. LKM informal seperti rentenir ataupun arisan.

Adapun Bank Indonesia (BI) hanya membagi LKM menjadi 2 kategori saja yaitu LKM yang berwujud bank dan non bank. Perbedaan kategori ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kriteria yang dipakai, baik menyangkut aspek legalitas maupun prosedur dalam operasionalisasi masing-masing LKM. LKM yang berwujud bank adalah misalnya BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa) sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul maal wat tanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, kelompok swadaya masyarakat (KSM), unit layanan modal mikro (ULAMM), LKM Kelompok Usaha Bersama (LKM-KUBE), LKM Agribisnis (LKM-A) dan credit union.

²⁸ Usman dkk. *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. (Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2004), hlm. 67.

Menurut Adams dan Fitchett, pada umumnya, karakteristik LKM menekankan sebuah kesatuan dari tata-kelola yang dinamis, inovatif dan lentur yang dibuat sesuai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal. Tata-kelola tersebut sangat adaptif dan kebanyakan telah teruji oleh waktu. Kelenturan ini dapat tercapai karena jumlah aturan yang tidak terlalu banyak, ukurannya yang kecil, ditambah dengan fakta bahwa sebagian besar LKM beroperasi dalam wilayah yang terbatas, atau pada ceruk pasar (*market niche*) tertentu di mana dimungkinkan untuk mengenal peminjam secara pribadi. Jenis transaksinya adalah transaksi-transaksi kecil dan jangka pendek yang didasarkan pada hubungan pribadi atau pengetahuan yang dimiliki LKM tersebut tentang nasabah-nasabahnya secara pribadi, dan yang biasanya terjadi didekat tempat klien hidup, berbelanja atau bekerja. Untuk memfasilitasi nasabah baru, LKM juga menerapkan prosedur pengajuan pinjaman atau pembiayaan yang sederhana dan pencairannya akan dilakukan dengan cepat. Adapun tingkat bunga atau bagi hasil yang dibebankan oleh LKM berorientasi pasar dan bertujuan memenuhi biaya operasional maupun keuangan, yang didasarkan atas asumsi bahwa orang-orang miskin bersedia mengeluarkan biaya untuk memperoleh akses dan kenyamanan.²⁹

Sehubungan dengan biaya transaksi, terdapat empat karakteristik yang menjelaskan mengapa LKM memerlukan biaya transaksi yang lebih rendah

²⁹ Lincolin Arsyad. *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008), hlm. 26.

daripada bank-bank modern. Pertama, LKM memiliki informasi yang lebih baik tentang para nasabahnya dibanding bank-bank komersial. Pemberi pinjaman memiliki informasi yang mencukupi tentang peminjam yang diperoleh dari hubungannya dengan lingkungan sekitar dan komunitas atau dari transaksi-transaksi kredit sebelumnya. Hal tersebut dapat mengurangi biaya informasi mereka dibanding biaya yang harus dikeluarkan bank komersial. Kedua, biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh LKM lebih rendah daripada bank-bank komersial karena pegawai LKM di bayar relatif lebih rendah (karena kurang terdidik), skala usaha yang tidak besar, dan pekerjaan administrasi yang lebih sederhana dibanding bank komersial. Ketiga, tingkat bunga LKM tidak di atur secara khusus yang karenanya dapat disesuaikan dengan kehendak pasar. Akibatnya, kompetisi non-harga dapat ditekan hingga tingkat yang optimal. Ke empat, LKM tidak memiliki kewajiban pencadangan modal (*reserve requirements*) seperti yang diterapkan pada bank komersial modern.³⁰

LKM Berbasis Kelompok

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis kelompok/komunitas merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan Usaha Mikro dan diinginkan para pengusaha mikro di Indonesia dewasa ini dan di masa yang akan datang.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

Sebetulnya, layanan terhadap keuangan mikro bukanlah hal yang baru, dan tetap hadir dalam masyarakat bawah maupun menengah. Ada berbagai model lembaga keuangan mikro di antaranya:³¹

- a) *Poverty-focused Development Banks* yaitu bentuk bank dengan para staf profesionalnya mempunyai akses dan keputusan terhadap administrasi dana independen yang dimilikinya yang dipinjamkan pada perorangan atau sekelompok masyarakat berkecukupan terbatas.
- b) *Village Banks* yaitu dana pinjaman disediakan oleh lembaga eksternal untuk organisasi berbasis masyarakat lokal, yang biasa terdaftar secara resmi atau tidak. Fungsi dan transaksi perbankan secara keseluruhan dikelola oleh organisasi tersebut yang membentuk tim pengawasan dan persetujuan pinjaman.
- c) *Thrift and Credit Co-operatives (TCCs and Credit Unions (CUs))* yaitu suatu organisasi dengan keanggotaan yang terdaftar secara formal diatur oleh peraturan pemerintah. Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki ikatan yang sama tersebut (misalnya hidup dalam komunitas yang sama atau bekerja dalam perusahaan yang sama) sepakat untuk menyimpan uang secara bersama dan meminjamkannya pada tingkat bunga yang rendah, atau menggunakannya untuk tujuan atau proyek yang dimiliki bersama.

³¹ Ikaputera Waspada, "Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Komunitas Untuk Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Bandung", Makalah tidak diterbitkan, hlm. 5.

d) *Intermediary programmes* yaitu LSM memfasilitasi hubungan antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam kelompok usaha mikro atau masyarakat berpendapatan rendah dengan sistem keuangan formal. Mereka melakukan penyerahan, bantuan untuk pengajuan, pelatihan, bantuan teknis, dan penjaminan untuk penyedia jasa keuangan yang mengurangi biaya dan risiko dari sasaran penerima bantuan masyarakat miskin.

Dari berbagai macam model LKM di atas mempunyai tugas utama menyalurkan pinjaman ke usaha mikro atau masyarakat berpendapatan rendah. Prakteknya, LKM memberikan layanan jasa keuangan dengan mekanisme kelompok. LKM berbasis kelompok adalah lembaga pinjaman yang berformula usaha mikro pada kepercayaan kelompok dengan pola besar cicilan pengambilan sebagai acuan pinjaman.

Hasil penelitian Ikaputera³² mengungkap bahwa LKM berbasis kelompok memberikan syarat dikembangkan dengan ketentuan dasar sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan
- 2) Pinjaman dengan formula tanggung jawab kelompok
- 3) Tanpa agunan
- 4) Pengusaha Mikro dikenal Lembaga Keuangan Mikro
- 5) Besar pengembalian sebagai dasar pinjaman (Rasio aktivitas)
- 6) Usaha Mikro dikenal lingkungan sekitarnya

³² *Ibid.*, hlm. 10.

Adapun keunggulan model LKM berbasis kelompok adalah:

- a) Tumbuh dan berkembang melayani usaha mikro;
- b) Mandiri dan bebas di masyarakat;
- c) Sangat dekat dengan masyarakat lingkungan sekitarnya;
- d) Memiliki prosedur peminjaman dana tanpa agunan;
- e) Pendanaan usaha produktif masyarakat sekitar LKM tersebut;
- f) Lembaga ini memiliki pasar masyarakat tersendiri;
- g) Besar tawaran pengembalian dana pinjaman menjadi acuan dasar

Dari penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa LKM berbasis kelompok sangat dibutuhkan dan dikembangkan. LKM berbasis kelompok memiliki ciri tidak membuka kantor cabang di luar wilayah kecamatan, bahkan kabupaten, sehingga lembaga ini mampu sebagai *community bank* yang diharapkan “memperdalam” akses pelayanan kepada masyarakat disekitarnya.

Jadi mungkin saja LKM berbasis kelompok menjadi model pengembangan LKM yang baik di Indonesia kedepannya.

2. Manajemen Risiko

Risiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian (*volatilitas*) dari hasil yang didapatkan, dimana hasil tersebut dapat mencerminkan nilai dari suatu *asset*, *ekuitas*, atau pendapatan. Perusahaan mempunyai beberapa tipe risiko, dimana risiko tersebut dapat diklasifikasikan menjadi lebih luas sebagai risiko bisnis (*business risk*) dan risiko finansial (*financial risk*). Adapun menurut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.

Risiko dapat juga ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.³³ Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert³⁴ risiko adalah *uncertainty about future events*. Yaitu suatu hal yang tidak pasti di masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim³⁵ mendefinisikan risiko pada tiga hal:

- 1) Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan,
- 2) Variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan
- 3) Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik dan masalah industri.

³³ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko; Teori, Kasus, dan Solusi*, cet.I (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

³⁴ Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *Business*, (Prentice Hall International Editons), hlm. 752.

³⁵ Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, *Kamus Istilah Akuntansi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), hlm. 400.

Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa pengertian dari analisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan risiko disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi. Sementara itu David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill dan Michael H Moffet³⁶ mengatakan bahwa risiko dasar adalah “*the mismatching of interest rate bases for associated assets and liabilities*”. Sehingga secara umum risiko dapat ditangkap sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan. Menurut salah satu definisi, risiko (*risk*) adalah sama dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan.

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A. Karim³⁷ merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Dalam Islam, konsep risiko juga dikenal khususnya dalam kegiatan usaha dan investasi. Dalam *al-Qur’ān* Allah SWT Berfirman “...dan tidak

³⁶ David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill dan Michael H Moffet, *Multinational Business Finance*, 7th Edition, (Addison-Wesley Publishing Company, 1995), hlm. 370.

³⁷ Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 255

*seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok...*³⁸

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islami. Secara natural, dalam kegiatan usaha, di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Bahkan dalam tingkat makro, sebuah negara juga mengharapkan neraca perdagangannya yang positif. Kaidah syariah tentang imbal hasil dan risiko adalah *al-ghunmu bil ghurmi*, artinya risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi *return* atau imbal hasil.³⁹

Artinya kaidah di atas memiliki arti bahwa setiap *return* yang didapatkan dari *asset*, secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari *asset* tersebut. Sehingga *return* yang akan didapatkan sebanding dengan risiko kerugian yang melekat dalam *asset*. Menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed⁴⁰ kaidah ini identik dengan aksioma keuangan *high risk-high return*, semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar *return* yang akan didapatkan, dan sebaliknya.

Dalam sebuah riwayat *hadis* dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon,

³⁸ QS. Luqman (31): 34

³⁹ Wiku Suryomurti, *Konsep Risiko Dalam Islam*, dikutip dari <http://wikusuryomurti.com/konsep-risiko-dalam-islam/> accessed 25 November 2013.

⁴⁰ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Cet. 1 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 136.

tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau s.a.w. bertanya: "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab: "Saya sudah bertawakkal kepada Allah." Rasulullah Saw. tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakkallah." Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang.⁴¹ Makna tawakal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko.

Makalah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2003) menyatakan bahwa prinsip yang dianut dalam penerapan manajemen risiko mengacu kepada salah satu prinsip dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan *sad az-Zarī'ah*.

Pengertian *az-Zarī'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah jalan menuju kepada sesuatu.⁴² Sedangkan pengertian *sad az-Zarī'ah* menurut Imam Asy-

⁴¹ Imam An-Nawawi, *Riyadus Ṣālihin Jilid 1*, Penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Imani, 1999) Cet. IV

⁴² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 132.

Syatibi adalah: “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan/kemafsadatan”.⁴³

Secara teknis *sad az-Zarī’ah* dapat didefinisikan sebagai “sikap *preventif* dan penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan memitigasi risiko pelanggaran maupun risiko lainnya dengan tetap memperhatikan aspek pertumbuhan, produktifitas, tingkat keuntungan, manfaat dan kemaslahatan dari tindakan hukum dalam suatu kondisi yang optimal”. Hal ini sejalan dengan manajemen risiko dimana setelah mengidentifikasi dan mengukur risiko, manajemen risiko juga memitigasi risiko.⁴⁴

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana *al-Qur’ān* dan *Hadis* mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko.

Berdasarkan paradigma ekonomi Islam, maka risiko dipandang sebagai hal yang positif. Risiko usaha dikaitkan dengan konsep keadilan di mana setiap hasil keuntungan usaha harus dihasilkan dari keterlibatan dalam menghadapi risiko usaha. Hasil usaha yang tidak memiliki kaitan dengan

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Muslimah Mattjik, “Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Dengan Model Standar Dan Internal Pada BPRS Harta Insan Karimah”, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 27

keterlibatan menghadapi risiko usaha dianggap tidak mencerminkan keadilan.⁴⁵

Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro / Koperasi

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁴⁶ Dalam manajemen risiko, strategi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Bank Indonesia menyatakan bahwa esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan salah satu komponen utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, bank juga merupakan jenis usaha yang selama ini banyak ditempa berbagai masalah (risiko). Sebagai lembaga keuangan yang sarat dengan regulasi, bank menjalankan bisnisnya

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 107.

⁴⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*., hlm. 2.

dengan keharusan mengambil risiko agar dapat tumbuh secara berkesinambungan.

Dalam hal pengendalian risiko di LKM/Koperasi, merujuk pada keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah menyebutkan bahwa:

1. Pasal 27;

Ayat 1: Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) wajib memperhatikan azaz-aza dan pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat 2: Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota yang dibiayai untuk melaunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari anggota/calon anggota.

2. Pasal 28;

Ayat 1: KJKS/UJKS dapat menetapkan agunan sebagai jaminan pembiayaan dengan catatan terlebih dahulu telah diketahui kelayakan kemampuan anggota/calon anggota dalam mengembalikan kewajibannya sesuai dengan rencana pemanfaatan yang disepakati.

Ayat 2: Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa barang atau hak tagih dari usaha yang dibiayai oleh pembiayaan yang

bersangkutan atau pernyataan kesanggupan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajibannya.

Ayat 2: Agunan berupa barang bisa diatur dengan ketentuan barang tersebut secara fisik tetap berada pada anggota/calon anggota.

Pengendalian risiko sebagaimana terdapat dalam pasal 27 dan 28 dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut merupakan bagian dari prinsip manajemen risiko. Adapun sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh teknologi, lingkungan, manusia, organisasi ataupun politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, organisasi dan staff).

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (2000) menggolongkan jenis risiko pada lembaga keuangan mikro ke dalam tiga golongan risiko utama seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kategori Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro

Financial Risk	Operational Risk	Strategic Risk
Credit Risk - Tanggung rentengansaction risk - Portfolio risk	Tanggung rentengansaction Risk - Human resource risk - Information & technology	Governance Risk - Ineffective oversight - Poor governace stanggung

Liquidity Risk	risk	rentengucture
Market Risk	Fraud (Integrity) Risk	Reputation Risk
- Foreign exchange risk	Legal & Compliance Risk	External Business Risks
- Investment portfolio risk		- Event risk

Sumber: *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (2000)*

Financial Risk (Risiko Keuangan) terdiri: risiko kredit (pembiayaan) yang terjadi karena risiko transaksi dan risiko portofolio, *liquidity risk* (risiko likuiditas), risiko pasar disebabkan karena risiko bunga, risiko valas dan risiko portofolio investasi

Risiko Operasional (Operation Risk) terjadi karena: risiko transaksi yang disebabkan kesalahan manusia ataupun karena kesalahan teknologi informasi. Risiko integritas disebabkan oleh *moral hazard* dari karyawan / *human resource*. *Legal & compliance risk* dikarenakan masalah legal dan kepatuhan terhadap aturan main yang ditetapkan.

Strategic Risk (Risiko Strategik) disebabkan oleh: risiko lembaga karena inefisien maupun kesalahan dalam segmentasi pasar nasabah, risiko reputasi dan risiko faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, inflasi dan lainnya.

Dalam hal penilaian kesehatan terkait dengan *financial risk*/ risiko pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi yang berprinsip syariah seperti KJKS/UJKS harus mengikuti pada peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

3. Pembiayaan Tanggung Renteng

a) *Pengertian Pembiayaan*

Dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berdasarkan pola syari'ah untuk menyalurkan dana kepada nasabahnya sering disebut dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sementara itu, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dan anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dan pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Kementerian Koperasi dan UKM RI, "Petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah" (Jakarta, 2007), hlm. 4.

Menurut Muhammad,⁴⁸ definisi lain tentang pembiayaan yaitu; pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Adapun menurut Kashmir,⁴⁹ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.

b) Tanggung Renteng

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1991) tanggung renteng berasal dari kata tanggung dan renteng. Tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang lain

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMM YKPN, 2002), hlm. 17.

⁴⁹ Kashmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 72-73.

tidak menepati janjinya, sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara perminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengartikan bahwa tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.⁵⁰

Dalam sejarahnya istilah tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) diangkat dari tradisi para pedagang yang di adaptasi oleh Belanda dalam *Wet Boek van Koophandel* atau kodifikasi Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ketika membahas *Commanditaire Venootschap* (CV). Kelahiran CV tak lepas dari perilaku usaha para pedagang dan pengusaha yang saling menyokong dalam percaturan bisnis di wilayah Eropa Kontinental pada abad pertengahan. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk peminjaman uang, barang atau pemberian kuasa dengan risiko dibagi secara tanggung-menanggung. Dengan demikian, dalam konteks utang piutang perseroan ini, tanggung renteng berarti tanggung jawab bersama di antara para penanam modal baik pesero komanditer maupun pesero

⁵⁰ Kementrian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, "Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah." (Jakarta: Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, 2007), hlm. 11.

pengurus. Dalam konteks ini tanggung renteng berarti tanggung jawab bersama di antara para penanam modal baik pesero komanditer maupun pesero pengurus.⁵¹

Menurut Koperasi Setia Bhakti Wanita,⁵² tanggung renteng di maksudkan sebagai memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk menunaikan kewajiban anggota, baik sementara ataupun permanen, bila anggota dalam satu kelompok di satu wilayah tertentu bertindak atau berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang disepakati karena berbagai alasan.

Dalam penjelasannya, makna tanggung renteng dalam pengertian di atas dapat berarti negatif sekaligus positif, tergantung dari kalimat yang digunakan. Di tanggung renteng tidak sama dengan istilah melaksanakan tanggung renteng. Melaksanakan tanggung renteng yang berkonotasi positif, berarti kelompok melaksanakan gotong royong, saling menolong, menekankan kejujuran, menerapkan transparansi dan kontrol. Sementara di tanggung renteng berarti mendapat sanksi.

Menurut Suharni⁵³ di dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama dalam satu kelompok

⁵¹ Andriani S. Soemantri dkk., *Tanggung Renteng Setia Bhakti Wanita*, (Semarang: Limpad, 2003), hlm. 46.

⁵² *Ibid*

⁵³ Suharni, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. I (2003), hlm. 56.

guna memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada bank dan apabila ada salah satu atau beberapa anggota kelompok yang tidak dapat memenuhi kewajiban kredit maka satu kelompok tersebut menutup kewajiban tersebut.

Jadi dapat dimaknai bahwa tanggung renteng bukan hanya menjadi satu sistem dalam pembayaran pembiayaan atau kredit, namun memiliki nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

Menurut Syaiful Arifin⁵⁴, tanggung renteng merupakan jaminan sosial yang didalamnya terdapat nilai kebersamaan, tolong menolong dan kepercayaan antar anggota serta saling bekerjasama dalam meringankan beban. Sedangkan menurut Riana Pangabea⁵⁵ inti dari sistem tanggung renteng adalah kebersamaan, kesepakatan, saling percaya, dan saling mengenal anggota dalam kelompok.

Hal senada juga disampaikan oleh Sri Edi-Swasono⁵⁶ bahwa sistem pinjam-meminjam yang dikembangkan oleh koperasi simpan pinjam berdasarkan tanggung renteng sebenarnya merupakan pelaksanaan prinsip

⁵⁴ Syaiful Arifin, "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya pada Tercapainya Zero Bad Debt", *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 12 (3 September 2008), hlm. 520.

⁵⁵ Riana Pangabea, "Profil Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya Jawa Timur", *Jurnal Infokop*, Vol. 15 (1 Juli 2007), hlm. 61.

⁵⁶ Sri Edi-Swasono, *Tanggung Renteng Dan Kemandirian Rakyat*, dalam Eddy Roesdiono, *Tanggung Renteng: Sebuah Biografi Mursia Zaafril Ilyas*, (Surabaya: Perum Percetakan Negara R.I, 1998), hlm. 124.

dan nilai “menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Dijelaskan lagi bahwa tanggung renteng bukan sekedar mekanisme pengamanan (terutama dari kacamata pihak yang memberi bantuan), tetapi juga mendorong penerima pinjaman untuk lebih berhati-hati mendayagunakan pinjaman yang Ia terima. Penerima pinjaman mendapat bimbingan dan pengawasan ‘otomatis’ dari serenteng orang lain. Lebih dari itu, tanggung renteng merupakan keluhuran budi dalam pelaksanaan kesepakatan nasional untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, untuk menyusun perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dari tanggung renteng inilah dapat dijustifikasi bahwa paham kebersamaan dan kekeluargaan bukanlah suatu apatisme ataupun pasivisme, bahkan sebaliknya, merupakan suatu dinamisme. Dari sini pulalah kemandirian dinamis akan terwujud.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung renteng menjadi wujud konkret dari sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, yaitu berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, kolektivisme Indonesia, sikap mandiri, menolong diri sendiri secara bersama-sama, solidaritas sosial dan sekaligus berdasarkan dinamisme masyarakat.

Konsep Pembiayaan Tanggung Renteng

Menurut Yayuk⁵⁷, konsep tanggung renteng yang diterapkan oleh

Koperasi Setia Bhakti Wanita di Malang adalah sebagai berikut:

- Tanggung Renteng dalam proses pengambilan keputusan
- Tanggung Renteng dalam masalah finansial (simpanan dan pengelolaan keuntungan)
- Tanggung Renteng dalam menghadapi risiko usaha
- Tanggung Renteng dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan lembaga keuangan

Hampir sama dengan konsep tanggung renteng diatas, menurut Suharni⁵⁸ tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi beberapa atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- 2) Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- 3) Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman dengan jumlah yang relatif sama besarnya, walaupun berbeda tidak terlalu jauh satu terhadap lainnya.
- 4) Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyeter sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana syarat di bank.
- 5) Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai (ada bank yang mensyaratkan per periode paling sedikit tiga kali lipat dari jumlah kewajiban angsuran dan bunga yang harus dibayar).
- 6) Kelompok memiliki ketua, pengurus, atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avails bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.

⁵⁷ Yayuk Sri Rahayu, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang", *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 5 No.2 (2009), hlm. 10.

⁵⁸ Suharni, *Analisis Pengembangan Usaha Mikro.*, hlm. 56.

- 7) Para anggota kelompok bersedia menjamin harta pribadinya sebagai agunan kredit dengan menandatangani dokumen pengikatan jaminan.
- 8) Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain, baik dalam penyediaan bahan baku, penjualan produk, sumber modal kerja, investasi bersama atau keterkaitan lainnya.

Dari Konsep dan nilai diatas dapat kita ketahui manfaat pembiayaan dengan sistem Tanggung Renteng ini dalam pengembangan usaha yaitu:

- 1) Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam peminjaman.
- 2) Anggota mampu mengenali batas kemampuan dalam peminjaman.
- 3) Adanya kerjasama dan kebersamaan dalam menanggung atau mengangsur pinjaman.
- 4) Keputusan dalam memberi pinjaman kepada anggota dilakukan secara musyawarah dalam kelompok karena anggota kelompoklah yang mengetahui kebutuhan dan kesanggupan dari masing-masing anggota kelompok tersebut.
- 5) Adanya perkumpulan kelompok secara rutin sehingga anggota mendapatkan akses perkembangan usaha dan hasil dari usaha setiap anggota.
- 6) Saling membantu dan bekerja sama dalam mengatasi resiko usaha.

Menurut Suharni⁵⁹, dalam pelaksanaan tanggung renteng memberikan manfaat yang besar bagi anggota maupun pihak lembaga keuangan yang meminjamkan pinjaman kepada kelompok. Bagi anggota tanggung renteng bermanfaat karena dapat memperkuat kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Bagi bank, sistem tanggung renteng mempertinggi tingkat keamanan kredit yang diberikan kepada usaha mikro.

Dan menurut Yayuk⁶⁰ dalam penelitiannya menyatakan bahwa tanggung renteng memberikan manfaat bersifat materiil dan moril antara lain: kemudahan dalam peminjaman modal usaha, kemudahan dalam akses usaha, berada dalam jaringan usaha (koperasi) yang terpercaya, memiliki banyak relasi, bisa bersosialisasi dengan orang banyak, bisa mendapatkan hak pemberdayaan SDM dan sebagainya.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Yayuk Sri Rahayu, "*Penerapan Sistem Tanggung Renteng*", hlm. 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini mempelajari suatu objek yang diteliti secara intensif, terperinci secara mendalam.⁶¹ Peneliti terjun langsung kelapangan (objek penelitian) melihat praktik pembiayaan dengan pola tanggung renteng. Adapun yang menjadi objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Mudārabah*, *Murābahah* dan *Musyārakah* di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta yang menerapkan pola tanggung renteng.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga lokasi LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta, yang beralamat di Kecamatan Umbul Harjo, Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Wirobrajan. Tiga LKM KUBE ini merupakan LKM aktif dari empat LKM KUBE di D.I Yogyakarta yang dibina oleh Dinas Sosial Propinsi D.I Yogyakarta bekerjasama dengan PINBUK D.I Yogyakarta.

Adapun waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 1 November 2013 sampai dengan 1 Desember 2013.

⁶¹ Husaini Usman dan Purwono Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi.6, (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2006), hlm. 5.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif evaluatif*. Bersifat deskriptif, penulis mendeskripsikan fenomena-fenomena dalam penerapan pembiayaan pola tanggung renteng di LKM KUBE Kota Yogyakarta, akibat atau efek yang terjadi di lapangan. Adapun bersifat evaluatif bertujuan untuk mengukur, menilai keberhasilan penerapan aplikasi pembiayaan tanggung renteng, bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di LKM KUBE Kota Yogyakarta. Penulis mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan pembiayaan pola tanggung renteng yang memerlukan evaluasi, apakah sudah berjalan dengan benar dan memberikan hasil sesuai dengan harapan.

C. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis pakai adalah *normatif*. Normatif yakni menggali norma-norma hukum yang ada di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono, ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi / gabungan.⁶² Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan beberapa teknik pengumpulan data tersebut.

a. Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁶³ Proses tanya jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁴

Metode interview ini penyusun tujukan kepada pengurus dan pengelola LKM KUBE Sejahtera dan anggota kelompok KUBE tentang bagaimana manajemen risiko pembiayaan pola tanggung renteng dilapangan dan bagaimana pengaruh manajemen risiko pembiayaan

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 18, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225

⁶³ Surisno Hadi, *Metodologi Resech, untuk penulisan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi*, jilid 2, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm. 218.

⁶⁴ Cholil Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005), hlm. 83.

tanggung renteng terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Adapun wawancara dilakukan 1 kali kepada pengurus dan anggota KUBE, dan 2-3 kali kepada manajer.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya merupakan tulisan atau catatan atau benda-benda lain.⁶⁵ Data yang didapatkan dari dokumen berupa laporan keuangan di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta tahun 2010, 2011, 2012, yang di ambil langsung dari program software aplikasi keuangan.

c. Observasi

Secara mudah observasi sering disebut sebagai metode pengamatan.⁶⁶ mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.⁶⁷ Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dan manajemen risiko pada LKM KUBE

⁶⁵ Koecoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 63.

⁶⁶ Soeratno dan Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan 4, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 89.

⁶⁷ Surisno Hadi, *Metodologi*, hlm. 206.

Sejahtera Kota Yogyakarta. Observasi dilakukan 1-2 kali sehingga proses pengumpulan data ini mencukupi.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif enterpretatif*. Penulis mengukur dengan cermat dinamika penerapan manajemen risiko pembiayaan pola tanggung renteng di LKM KUBE Sejahtera di masing-masing Kecamatan.

Dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisa data dengan teknik analisis interaktif (*interctive mode of analysis*).⁶⁸ Dalam teknik ini dilakukan melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung selama penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Peneliti melakukan reduksi data dengan

⁶⁸ Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. (California; SAGE publications Inc. 1984), hal, 23. Lihat juga di www.finchpark.com/ppp/qual.../Qualitative_Data_Analysis_Handout.pdf, diakses pada 18 desember 2013 jam 19:44.

cara membuat catatan lapang berdasarkan hasil wawancara dan observasi, serta data laporan keuangan tahun 2010 – 2013 masing-masing LKM KUBE di Kecamatan Kota Yogyakarta.

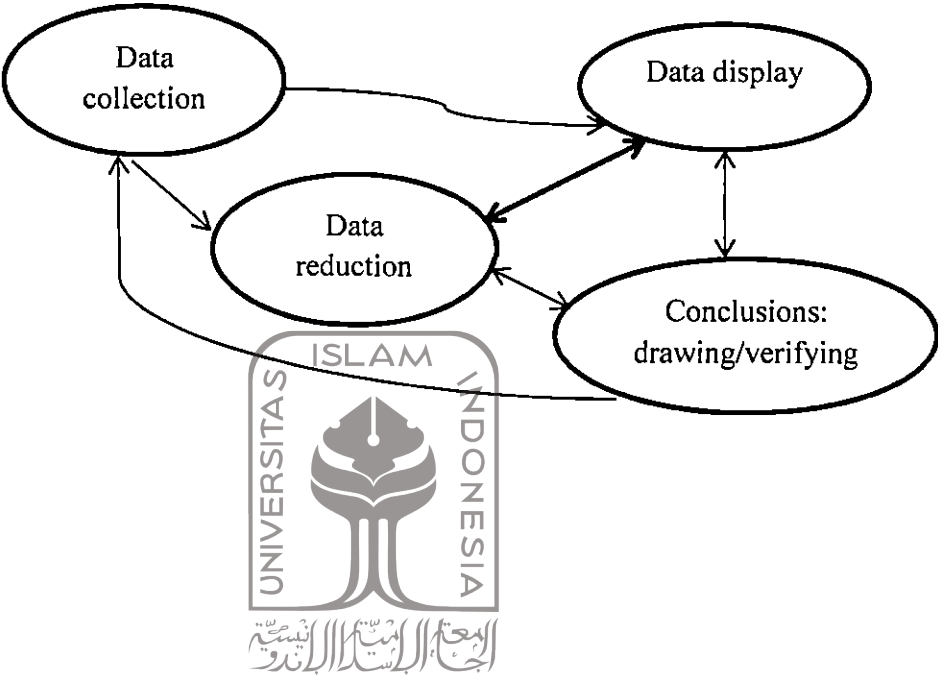
b. Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini digambarkan dengan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif berupa catatan yang di dapat dari hasil wawancara dan observasi serta laporan keuangan tahun 2010-2013 LKM KUBE Kecamatan Kota Yogyakarta.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang mencakup verifikasi atas kesimpulan terhadap data yang dianalisis agar menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan selama penelitian dihasilkan dengan cara memikir ulang selama penulisan, meninjau kembali catatan lapangan harian, meninjau kembali dan bertukar pikiran dengan teman dan pembimbing tesis. Untuk memperjelas uraian di atas dapat dilihat gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Analisis Interaktif



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta

a. LKM KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan

*Sejarah Singkat*⁶⁹

Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kementerian Sosial sebagai bagian dari lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin. Salah satu program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian modal usaha yang disalurkan melalui kelembagaan keuangan.

Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kecamatan yang mendapatkan akses program tersebut pada tahun 2009. Melalui alokasi dana APBN, program LKM telah resmi

⁶⁹ Dokumen Profil LKM KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan Tahun 2010

terbentuk dan secara simbolis di resmikan oleh Wakil Gubernur D.I Yogyakarta pada Desember 2009 bersamaan dengan 4 Kecamatan lainnya yang mendapatkan program serupa.

Lalu secara resmi LKM yang bernama LKM-KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan ini mendapatkan legalitas / badan hukum pada tahun 2012. Karena dalam operasionalisasinya LKM-KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan ini menerapkan prinsip-prinsip syariah, maka badan hukum yang di pilih adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Adapun visi misi dan motto LKM KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan ini adalah;

Visi: Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat kuat dan terpercaya dalam melayani anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan adil makmur dan sejahtera.

Misi: Menumbuh kembangkan pengusaha mikro agar tangguh dan professional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Motto: “Mensejahterakan, Memberdayakan dan Membebaskan”.

Data Kegiatan Harian

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, LKM-KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan melakukan sistem pengaturan jam kerja yang telah disepakati oleh pengurus yaitu 6 hari kerja dalam

seminggu dengan mengikuti hari efektif pada kalender nasional. Secara rinci jam kerja LKM-KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan adalah:

Tabel 2
Jam Kerja Karyawan

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00-14.00	-
Jum'at	08.00-14.00	-
Sabtu	08.00-12.00	-

Sumber data: LKM-KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan

Wilayah kerja

Wilayah kerja LKM-KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta meliputi daerah Kecamatan dan sekitarnya. Dengan alamat kantor terletak di Jalan. Nakulo No. 39 RT 50 RW 11, Ketanggungan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

b. LKM KUBE Sejahtera 131 Kecamatan Danurejan

Sejarah Singkat⁷⁰

Kelompok Usaha Bersama disingkat KUBE yang ada di wilayah Kecamatan Danurejan merupakan salah satu program dari Kementrian Sosial dalam rangka membantu pengembangan usaha-usaha mikro yang ada di wilayah Kecamatan Danurejan. KUBE yang sudah

⁷⁰ Dokumen Profil LKM KUBE Sejahtera 131 Kecamatan Danurejan Tahun 2011

terbentuk kemudian menerima serangkaian program bantuan untuk pengembangan usahanya.

Bantuan dibagi menjadi empat tahap namun tidak semua KUBE melalui tahapan yang sama. Tahap pertama dari bantuan tersebut adalah berupa barang atau alat yang dibutuhkan oleh tiap anggota kelompok tersebut untuk merintis usahanya, bantuan tahap selanjutnya yaitu tahap kedua berupa bantuan modal awal guna memperlancar usaha yang telah dirintis. Bantuan tahap ketiga berupa dana BLPS (Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial) ditujukan untuk penguatan modal usaha yang telah berjalan serta mengembangkan usaha yang telah ada. Dan tahapan terakhir atau tahap keempat dari program bantuan tersebut adalah KUBE memiliki lembaga keuangan sendiri yang disebut LKM (Lembaga Keuangan Mikro). Dengan harapan bahwa para pelaku usaha mikro tersebut mampu untuk mandiri dalam pemenuhan dan penambahan modal usaha. Kemudian untuk lebih tertata dan legalitasnya tidak dipertanyakan maka oleh Kementerian Sosial diwajibkan untuk menjadi suatu lembaga yang memiliki Badan Hukum dalam naungan Kementerian Koperasi, maka berdirilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE SEJAHTERA 131 Danurejan.

KJKS LKM KUBE SEJAHTERA 131 Danurejan yang diresmikan pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Bapak Wakil Walikota

Yogyakarta dan bertempat di kompleks SMK Muhammadiyah II Kota Yogyakarta, tepatnya di Jl. Mas Suharto No. 39 kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan. Lembaga ini didirikan melalui 12 kelompok KUBE yang telah melalui program BLPS, yaitu 10 KUBE dari kec.Danurejan dan 2 KUBE dari kec.Pakualaman. Modal awal yang telah disalurkan melalui KUBE pendiri adalah sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai dana penyertaan dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai dana awal operasional. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah kecamatan danurejan pada khususnya.

Dengan keberadaan KJKS ini diharapkan selain dapat menyokong KUBE yang sudah ada juga dapat menumbuhkan kelompok-kelompok KUBE baru di wilayah Kecamatan Danurejan. Saat ini Jumlah kelompok yang telah memanfaatkan KJKS ini ada 27 kelompok KUBE dengan rincian 6 kelompok KUBE Pendiri dan kelompok KUBE yang ditumbuhkan melalui KJKS berjumlah 21 KUBE dengan anggota masing-masing kelompok berjumlah antara 7 – 10 orang dengan syarat utama sudah memiliki usaha tetap dan produktif, kelompok-kelompok tersebut tidak hanya berada dilingkup kec. Danurejan saja namun telah mencakup diluar lingkup wilayah

kecamatan Danurejan hanya saja diutamakan dari wilayah kecamatan Pakualaman.

Adapun standar operasional prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen (SOM) mengikuti peraturan perundang-undangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Adapun Motto LKM KUBE Sejahtera 131 Kecamatan Danurejan adalah: “*Mandiri menuju kesejahteraan*”.

Data kegiatan harian

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, LKM-KUBE Sejahtera 131 Kecamatan Danurejan melakukan sistem pengaturan jam kerja yang telah disepakati oleh pengurus yaitu 6 hari kerja dalam seminggu dengan mengikuti hari efektif pada kalender nasional. Secara rinci jam kerja LKM-KUBE Sejahtera Kecamatan Danurejan adalah:

Tabel 3
Jam Kerja Karyawan

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00-16.00	12.00-13.00
Jum'at	08.00-16.00	11.30-13.00
Sabtu	08.00-13.00	-

Sumber data: LKM-KUBE Sejahtera 131 Danurejan

Wilayah kerja

LKM-KUBE Sejahtera mempunyai wilayah kerja di daerah Yogyakarta khususnya Kecamatan Danurejan. Dengan alamat kantor terletak di Jalan: Mas Suharto 39 Tukangan RT 17 RW 04. Kelurahan Tegalpanggung. Kecamatan Danurejan.

c. LKM KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo

Sejarah Singkat⁷¹

Persoalan kemiskinan selalu menjadi masalah di wilayah perkotaan. Namun belum juga pengentasan kemiskinan tersebut memiliki progres yang cepat dan tanggap. Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, Pemkot Jogja diminta untuk menyusun konsep rekayasa sosial pengentasan kemiskinan terpadu. Ada dua bentuk penanggulangan kemiskinan, yakni melalui cara pengalihan beban masyarakat miskin dan pemberdayaan. Program kelompok usaha dan LKM adalah bentuk pemberdayaan sedangkan program pengalihan antara lain terwujud dalam jaminan kesehatan dan pendidikan.

Di Kecamatan Umbulharjo, program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program LKM di realisasikan pada tahun 2010 yakni ditandai dengan di resmikannya LKM-KUBE Sejahtera pada bulan Oktober 2010.

⁷¹ Dokumen Profil LKM KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo Tahun 2013.

Hingga saat ini, LKM-KUBE Sejahtera yang notabene adalah milik anggota kelompok usaha bersama (KUBE) di wilayah Kecamatan Umbulharjo semakin berkembang setiap tahunnya, hingga pada tahun 2012 mendapatkan dana hibah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai modal tambahan operasional.

Maksud dan tujuan pendirian LKM: tujuan didirikannya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Umbulharjo adalah menciptakan kekeluargaan, kebersamaan, dan kegotong-royongan serta memberikan kesejahteraan bagi para anggota KUBE serta bagi semua warga masyarakat di Kecamatan Umbulharjo khususnya dan Kota Yogyakarta pada umumnya.

Data kegiatan harian

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, LKM-KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo melakukan sistem pengaturan jam kerja yang telah disepakati oleh pengurus yaitu 6 hari kerja dalam seminggu dengan mengikuti hari efektif pada kalender nasional. Secara rinci jam kerja LKM-KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo adalah:

Tabel 4
Jam Kerja Karyawan

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00-14.00	12.00-13.00
Jum'at	08.00-14.00	12.00-13.00
Sabtu	08.00-12.00	-

Sumber data: LKM-KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo

Wilayah kerja

LKM-KUBE Sejahtera mempunyai wilayah kerja di daerah Yogyakarta khususnya Kecamatan Umbulharjo. Dengan alamat kantor terletak di Jalan: Glagah Sari No: 99, Komplek Kantor Kecamatan Umbulharjo.

2. Perkembangan Usaha LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta

a. LKM KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan

Tabel 5
Perkembangan Asset LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan

TAHUN	JUMLAH
2010	Rp. 504.810.987,17,-
2011	Rp. 536.601.498,01,-
2012	Rp. 557.730.744,38,-
Nopember 2013	Rp. 545.785.051,09,-

Sumber: Laporan Neraca Tahunan LKM

Dari tabel di atas dapat kita lihat ada perkembangan usaha (total asset) dari mulai tahun 2010 hingga tahun 2012. Dimana pada tahun

2010 ke 2011 ada kenaikan total asset sebesar Rp. 31.790.510,84,-. Dan di tahun 2012 ada kenaikan total asset sebesar Rp. 21.129.246,37,-. Namun data keuangan per Nopember 2013 terjadi penurunan total asset sebesar Rp. 11.945.693,29,-. Adanya penurunan *asset* ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah tingkat simpanan masyarakat yang menurun dikarenakan adanya penarikan yang signifikan.⁷²

Tabel 6
Perkembangan Pembiayaan LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan

TAHUN	JUMLAH
2010	Rp. 157.485.900,00,-
2011	Rp. 198.605.850,00,-
2012	Rp. 226.012.350,00,-
Nopember 2013	Rp. 279.618.350,00,-

Sumber: Laporan Neraea Tahunan LKM

Ada perkembangan pembiayaan setiap tahunnya di LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan. Terlihat di tabel dari tahun 2010 hingga Nopember 2013 penyaluran pembiayaan terus meningkat. Misalnya pada tahun 2010 ke 2011 ada peningkatan sebesar Rp. 41.119.950,00,-. Lalu dari tahun 2011 ke 2012 ada peningkatan sebesar

⁷² Wawancara dengan manajer LKM Kec. Wirobrajan, Amalia Ridhianingrum di Yogyakarta, tanggal 16 Desember 2013 Jam 11:00 WIB.

Rp. 27.406.500,00,- dan pada Nopember 2013 ada peningkatan sebesar Rp. 53.606.000,00,-.

Tabel 7
Perkembangan Simpanan LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec.
Wirobrajan

TAHUN	JUMLAH
2010	Rp. 233.138.471,75,-
2011	Rp. 260.775.544,96,-
2012	Rp. 277.161.249,72,-
Nopember 2013	Rp. 254.368.164,07,-

Sumber: Laporan Neraca Tahunan LKM

Adapun data perkembangan simpanan menunjukkan bahwa ada peningkatan namun ada juga penurunan. Pada tahun 2010, 2011 sampai 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah peningkatan pada tahun 2010 ke 2011 sampai 2012 sebesar Rp. 27.637.073,21,- dan Rp. 16.385.704,76,-. Namun pada Nopember 2013 ada penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp. 22.793.085,65,-.

Dari hasil wawancara dengan Manajer LKM,⁷³ penurunan ini diakibatkan oleh tingkat penarikan simpanan yang cukup besar. Hal ini dipengaruhi salah satunya momentum tahun ajaran baru sehingga nasabah memerlukan biaya untuk keperluan pendidikan.

⁷³ Wawancara dengan manajer LKM Kec. Wirobrajan, Amalia Ridhianingrum di Yogyakarta, tanggal 16 Desember 2013 Jam 11:00 WIB.

Tabel 8

Perkembangan Laba LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan

TAHUN	JUMLAH
2010	Rp. 19.584.119,16,-
2011	Rp. 14.547.469,85,-
2012	Rp. 12.337.243,29,-
Nopember 2013	Rp. 15.262.536,42,-

Sumber: Laporan Neraca Tahunan LKM

Dari tabel perkembangan laba LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan terlihat peningkatan yang tidak konsisten. Seperti pada tutup buku tahun 2010, jumlah laba (SHU) sebesar Rp. 19.584.119,16,-. Namun tutup buku tahun 2011 terjadi penurunan sehingga laba yang berhasil dibukukan hanya mencapai Rp. 14.547.469,85,-. Lalu tutup buku di tahun 2012 terjadi lagi penurunan sehingga laba yang berhasil di bukukan hanya mencapai Rp. 12.337.243,29. Dan data per Nopember 2013 terjadi peningkatan laba menjadi Rp. 15.262.536,42,-.

Fenomena menurunnya tingkat laba (produktivitas) LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain:⁷⁴

- a) Semangat anggota KUBE mulai mengalami penurunan dalam mengakses layanan keuangan LKM.

⁷⁴ *Ibid.*

- b) Adanya tambahan modal dari pihak lain kepada KUBE sehingga kebutuhan keuangan kepada LKM tidak lagi diperlukan.
- c) Adanya permasalahan internal berkaitan dengan SDM pengelola.

Tabel 9
Jumlah penabung dan peminjam LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan

No	Data	2010	2011	2012	Nop 2013
1	Penabung	312	355	404	408
2	Peminjam	296	189	167	133
	Jumlah	608	544	571	541

Sumber: Laporan Nominatif Simpanan dan Pembiayaan LKM

Dari tabel di atas terlihat ada peningkatan jumlah penyimpan / penabung di LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan. Namun berbeda sebaliknya dengan jumlah peminjam, dimana ada penurunan di tahun 2010 ke tahun 2011. Lalu di tahun 2012 ada peningkatan yang tidak signifikan, namun di data per Nopember 2013 kembali mengalami penurunan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan didapatkan kesimpulan bahwa terjadinya penurunan tingkat peminjam di karenakan adanya bantuan dari pemerintah melalui program BLPS (Bantuan Langsung

Pemberdayaan Sosial) dari Kementrian Sosial Republik Indonesia kepada KUBE secara langsung. Akhirnya KUBE tersebut menjadi mandiri sehingga pada saat itu tidak lagi membutuhkan akses layanan keuangan dari LKM.⁷⁵

Dalam menghadapi persoalan ini manajemen LKM akan mengarahkan alokasi pembiayaan kepada anggota non KUBE di lingkungan Kecamatan Wirobrajan.

Tabel 10
Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Binaan LKM-KUBE
Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan

TAHUN	JUMLAH
2010	11 Kelompok
2011	11 Kelompok
2012	18 Kelompok
November 2013	18 Kelompok

Sumber data: LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibina oleh LKM-KUBE Sejahtera 02 Kec. Wirobrajan mengalami peningkatan di tahun 2012. Artinya secara tidak langsung keanggotaan LKM akan mengalami peningkatan.

⁷⁵ Wawancara dengan wakil ketua pengurus LKM KUBE Kec. Wirobrajan, Agus Sutopo di Yogyakarta, tanggal 16 Desember 2013 Jam 12:00 WIB.

b. LKM KUBE Sejahtera 131 Kecamatan Danurejan

Tabel 11
Perkembangan Asset LKM-KUBE Sejahtera 131 Kec. Danurejan

TAHUN	JUMLAH
2011	Rp. 441.657.737,00,-
2012	Rp. 581.915.165,00,-
Nopember 2013	Rp. 610.752.984,00,-

Sumber: Laporan Neraca tahunan LKM

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada perkembangan usaha (total asset) LKM KUBE-Sejahtera 131 Danurejan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Pada akhir 2011 total asset sebesar Rp.441.657.737,- lalu meningkat menjadi Rp. 581.915.165,- di tahun 2012. Jadi ada peningkatan sebesar Rp.140.257.428,-. Sedangkan per November 2013 ada peningkatan lagi sebesar Rp. 28.837.819,00,-

Tabel 12
Perkembangan Pembiayaan LKM-KUBE Sejahtera 131 Danurejan

TAHUN	JUMLAH
2011	Rp. 370.361.166,00,-
2012	Rp. 490.190.200,00,-
Nopember 2013	Rp. 561.620.631,00,-

Sumber: Laporan Neraca Tahunan

Dari data laporan neraca tahunan terlihat bahwa ada peningkatan penyaluran pembiayaan setiap tahunnya. Pada laporan tahun 2011

tercatat jumlah penyaluran pembiayaan mencapai Rp. 370.361.166,00,-. Lalu ada peningkatan di tahun 2012 sebesar Rp. 119.829.034,00,- sehingga penyaluran pembiayaan di tahun 2012 sebesar Rp. 490.190.200,00,-. Dan di tahun 2013 sebesar Rp. 561.620.631,00,-

Tabel 13
Perkembangan Simpanan LKM-KUBE Sejahtera 131 Danurejan

TAHUN	JUMLAH
2011	Rp. 157.771.420,46,-
2012	Rp. 281.477.540,90,-
Nopember 2013	Rp. 332.980.102,54,-

Sumber: Data di olah dari Laporan Neraca Tahunan

Melihat data laporan neraca tahunan 2011 hingga Nopember 2013 ada peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah simpanan masyarakat di LKM Kube Sejahtera Kecamatan Danurejan ini. Dari 2011 ke 2012 ada peningkatan simpanan sebesar Rp. 123.706.120,44,-. Lalu dari 2012 ke 2013 ada peningkatan sebesar Rp. 51.502.561,00,-

Tabel 14
Perkembangan Laba LKM-KUBE Sejahtera 131 Danurejan

TAHUN	JUMLAH
2011	Rp. 8.986.833,54,-
2012	Rp. 26.472.843,56,-
Nopember 2013	Rp. 24.960.476,36,-

Sumber: Data di olah dari Laporan Neraca Tahunan

Dari tabel di atas terlihat di tahun ke dua pendirian LKM sudah berhasil membukukan laba sebesar Rp. 8.986.833,54,-. Lalu ada peningkatan signifikan di tahun ke tiga hingga tahun ke empat. Dari sini dapat kita lihat bahwa produktivitas LKM mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 15
Jumlah penabung dan peminjam LKM-KUBE Sejahtera 131
Danurejan

No	Data	2011	2012	Nop 2013
1	Penabung	190	279	369
2	Peminjam	347	250	160
	Jumlah	537	529	529

Sumber: Data di olah dari Laporan Nominatif Simpanan dan Pembiayaan

Dari tabel di atas jumlah penabung dan peminjam cenderung menurun, terlihat di tahun 2011 jumlah penabung dan peminjam mencapai 537 orang. Akan tetapi pada tahun 2012 dan per Nopember 2013 menurun hanya menjadi 529 orang.

Tabel 16
Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Binaan LKM-KUBE
Sejahtera 131 Danurejan

TAHUN	JUMLAH
2011	21
2012	21
2013	22

Sumber Data: Hasil wawancara

c. LKM KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo

Tabel 17
Perkembangan Asset LKM-KUBE Sejahtera Kec Umbulharjo

TAHUN	JUMLAH
2010	Rp. 58.257.080,00,-
2011	Rp. 95.379.180,00,-
2012	Rp. 402.197.756,37,-
Nopember 2013	Rp. 429.997.331,08,-

Sumber: Data di olah dari laporan neraca tahunan LKM

Dari data tingkat perkembangan asset LKM-KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2012. Dari semula jumlah asset Rp. 95.379.180,00,- di tahun 2011, maka pada tahun 2012 jumlah asset mencapai Rp. 402.197.756,37,-. Hal ini dikarenakan LKM-KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo mendapatkan dana hibah dari Kementrian Sosial sebanyak Rp. 250.000.000,-. Hingga Nopember 2013 keseluruhan asset menjadi Rp. 429.997.331,08,-.

Tabel 18
Perkembangan Pembiayaan LKM-KUBE Sejahtera Kec.
Umbulharjo

TAHUN	JUMLAH
2010	Rp. 6.100.000,00,-
2011	Rp. 52.181.700,00,-
2012	Rp. 268.670.320,00,-
Nopember 2013	Rp. 270.822.705,93,-

Sumber: Laporan Neraca Tahunan

Data perkembangan pembiayaan LKM-KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada awal pendirian yakni di tahun 2010, LKM hanya mampu mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp. 6.100.000,00,-. Lalu di tahun 2011 meningkat tajam menjadi Rp. 52.181.700,00,-. Dan pada tahun 2012 ketika LKM mendapatkan dana hibah dari Kementerian Sosial maka jumlah pembiayaan meningkat lagi menjadi Rp. 268.670.320,00,-.

Tabel 19
Perkembangan Simpanan LKM-KUBE Sejahtera Kec.
Umbulharjo

TAHUN	JUMLAH
2010	Rp. 2.821.000,00,-
2011	Rp. 25.022.232,43,-
2012	Rp. 56.842.524,58,-
Nopember 2013	Rp. 65.547.562,24,-

Sumber: Data di olah dari Laporan Neraca Tahunan

Demikian juga jika melihat data tingkat perkembangan simpanan di LKM-KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo ada peningkatan yang cukup signifikan. Dari tahun 2010 ke tahun 2011 ada peningkatan sebesar Rp. 22.201.232,43,-. Lalu di tahun 2012 ada peningkatan 100 persen hingga mencapai Rp. 56.842.524,58,-

Tabel 20
Perkembangan Laba LKM-KUBE Sejahtera Kec.
Umbulharjo

TAHUN	JUMLAH
2010	Rp. (3.028.700,00)
2011	Rp. 3.143.967,57,-
2012	Rp. 23.187.448,43,-
Nopember 2013	Rp. 25.135.125,26,-

Sumber: Laporan Neraca Tahunan LKM

Pada tahun 2010 yakni awal pendirian LKM-KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo, posisi laba masih terdapat minus sebesar Rp. (3.028.700,00). Lalu di tahun 2011 sudah ada peningkatan yang cukup signifikan yakni laba sebesar Rp. 3.143.967,57,-. Dan di tahun 2012 setelah mendapatkan dana hibah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, posisi laba LKM-KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo meningkat tajam menjadi Rp. 23.187.448,43,-.

Hingga Nopember 2013 laba LKM-KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo tercatat sebesar Rp. 25.135.125,26,-.

Tabel 21
Jumlah penabung dan peminjam LKM-KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo

No	Data	2010	2011	2012	Nop 2013
1	Penabung	90	110	235	312
2	Peminjam	110	125	250	270
	Jumlah	200	235	485	582

Sumber: Data di olah dari Laporan Nominatif Simpanan dan Pembiayaan

Data penabung dan peminjam di LKM-KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Seperti pada kurun waktu 2011 ke 2012 ada peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan penabung dan peminjam seperti,⁷⁶

- a) Kepercayaan masyarakat semakin meningkat
- b) Tingkat bagi hasil yang tinggi
- c) Margin yang rendah
- d) Tersedianya modal
- e) Tingkat kredit macet yang rendah

⁷⁶ Wawancara dengan manajer LKM KUBE Kec. Wirobrajan, Nining Herawati di Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2013 Jam 10:00 WIB.

Tabel 22
**Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Binaan LKM-
 KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo**

TAHUN	JUMLAH
2010	10
2011	10
2012	11
2013	11

Sumber Data: Wawancara dengan pengelola

Jumlah kelompok usaha bersama (KUBE) binaan LKM-KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo tidak ada peningkatan yang cukup berarti. Menurut hasil wawancara penulis dengan pengelola LKM persoalan ini dikarenakan bahwa KUBE di wilayah Kecamatan Umbulharjo tidak aktif, berbeda dengan beberapa kecamatan lainnya di wilayah Kota Yogyakarta.⁷⁷

3. Produk-produk LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta⁷⁸

a. Produk penghimpunan dana

Sebagai lembaga keuangan yang melakukan aktifitas jasa simpan pinjam, LKM-KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta juga mempunyai produk penghimpunan dana (*funding*) meliputi:

1) Simpanan *wadi'ah* (titipan murni)

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ PINBUK, *SOP & SOM: Panduan Operasional Manajemen Dan Prosedur LKM/BMT*, (Jakarta: Pinbuk Press, 2008), hlm. 55-63.

Akad ini digunakan untuk dana zakat, infaq, shadaqoh atau sumber dana lainnya yang sepadan dengan itu. Atas produk ini penyimpanan akan di berikan bonus.

2) Simpanan *Muḍārabah*

Simpanan *Muḍārabah* merupakan simpanan umum LKM-KUBE Sejahtera dimana LKM memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah serta dengan sistem jemput bola atau menjemput sendiri ke lokasi nasabah. Atas produk ini penyimpanan akan mendapatkan bagi hasil sebagai pembentukan laba. Variasi jenis simpanan yang berakad *Muḍārabah* antara lain:

a) Simpanan sejahtera

Simpanan ini merupakan jenis simpanan umum untuk berbagai keperluan yang pada intinya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan setoran awal rata-rata minimal Rp. 10.000,-, maka nasabah sudah dapat memiliki buku rekening dan mempunyai hak imbalan bagi hasil setiap bulannya.

b) Simpanan pendidikan (TADIKA)

Simpanan pendidikan atau nama lainnya tabungan pendidikan (TADIKA) merupakan jenis simpanan yang

di peruntukkan bagi orang tua untuk masa depan pendidikan anaknya. Atau biasanya simpanan ini mempunyai segmen pasar para pelajar dan mahasiswa seperti perguruan tinggi, SMA, SMP, SD dan TK.

c) Simpanan haji (TAHAJUD)

Simpanan haji atau nama lain dari tabungan haji berwujud (TAHAJUD) merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- maka nasabah sudah memiliki rekening buku tabungan Tahajud. Penyetoran disini dapat dilakukan dengan cara harian maupun mingguan dengan waktu pengembaliannya pada saat pelaksanaan ibadah haji tiba.

d) Simpanan walimah (TADURI)

Simpanan walimah atau nama lain dari tabungan kenduri (TADURI) merupakan produk LKM yang di peruntukkan bagi remaja putra-putri yang ingin melakukan pernikahan atau walimah. Penyetoran dapat dilakukan secara harian maupun mingguan dan pengambilan simpanan pada saat menjelang walimah.

e) Simpanan qurban

Simpanan ini khusus untuk melakukan ibadah Qurban dan pelaksanaan aqiqah.

3) Deposito *Mudārabah*

Deposito *Mudārabah* yakni simpanan yang jangka waktu pengembaliannya sudah dipastikan. Atas produk ini penyimpan akan mendapatkan bagi hasil, yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Deposito yang tersedia untuk pilihan waktu 3, 6, 9, dan 12 bulan.

b. Produk pembiayaan (penyaluran dana)

Produk pembiayaan LKM-KUBE Sejahtera di khususkan bagi kelompok usaha bersama atau KUBE tetapi juga di luar anggota KUBE juga diperbolehkan untuk mengakses pembiayaan selama masih berada di lingkungan Kecamatan tempat LKM-KUBE beroperasi. Adapun jenis-jenis produk pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murābahah* KUBE dan Non KUBE

Merupakan penyediaan barang modal atau barang konsumtif oleh LKM-KUBE Sejahtera kepada peminjam anggota KUBE maupun non KUBE. Atas dasar akad ini,

LKM-KUBE Sejahtera akan mendapatkan keuntungan yang besarnya dihitung atas dasar kesepakatan.

2) Bagi hasil (*Mudārabah* dan *Musyārakah*)

Penyediaan modal usaha atas dasar kemitraan dan patungan modal atau dapat juga semua permodalan dari LKM-KUBE Sejahtera. Atas akad ini LKM-KUBE Sejahtera akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan proporsi (*nisbah*) yang telah disepakati.

3) Jasa (*hiwālah*, *ar-rahn*, dan *kafalah*)

Produk jasa talangan dana yang dibutuhkan sangat cepat sementara piutang nasabah ditempat lain belum jatuh tempo (*hiwālah*). LKM-KUBE Sejahtera juga akan mengembangkan produk gadai syariah (*ar-rahn*) juga LKM-KUBE Sejahtera akan berperan aktif sebagai penjamin atas usaha nasabah terhadap pihak lain (*kafalah*). Atas akad ini, LKM-KUBE Sejahtera akan mendapatkan fee manajemen yang besarnya tergantung dari kesepakatan.

4) Kebajikan (*al-qarḍ* dan *al-qarḍ al-ḥasan*)

Al-qarḍ yakni kebijakan dimana peminjam harus mengembalikan angsuran pokoknya. Sedangkan dana yang bisa tidak kembali disebut *al-qarḍ al-ḥasan*. *Al-qarḍ* sumber

dananya dapat berasal dari dana produktif maupun sosial (ZIS). Namun LKM-KUBE Sejahtera akan mendapatkan *fee* infak yang besarnya tidak ditentukan.

4. Pembiayaan Pola Tanggung Renteng di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta

Sejarah keberadaan LKM tidak bisa dilepaskan dari sejarah praktek rentenir yang cukup menyengsarakan rakyat. Dengan memberikan kemudahan dalam proses pinjaman, namun pungutan bunga yang tinggi kerap menjadikan beban bagi peminjam. Menurut Edi,⁷⁹ praktek ini telah lama berjalan di masyarakat hampir seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pelosok pedesaan pun praktek ini terjadi. Menurutnya, suburnya praktek rentenir juga dikarenakan layanan perbankan dan lembaga keuangan yang tidak menyentuh lapisan ini, baik bank umum, BPR maupun koperasi. Bahkan banyak koperasi juga terjebak melakukan praktek yang sama. Keprihatinan melihat beratnya beban yang ditanggung oleh masyarakat akibat dari rentenir inilah salah satu latar belakang BMT atau LKM berbasis syariah muncul di media tahun 1990-an. Ini artinya munculnya BMT atau LKM berbasis syariah juga merupakan jawaban dari ketidakpuasan masyarakat akan praktek koperasi saat itu yang tidak bisa melayani kebutuhan masyarakat dengan baik.

⁷⁹ Edi, "Manajemen Risiko di BMT Beringharjo Yogyakarta dan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm. 50.

Dalam perjalanannya, perkembangan LKM melaju pesat baik yang konvensional maupun berprinsip syariah. Termasuk beberapa LKM melalui program pemerintah seperti LKM KUBE. Untuk itu, pemerintah pada awal tahun 2013 telah menyiapkan seperangkat aturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.⁸⁰ Dan pasca diresmikannya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2014, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengawasan LKM secara mutlak ada di bawah kontrol OJK.

Namun demikian, melihat pengalaman lembaga keuangan mikro seperti Koperasi, praktek penerapan regulasi sering terjadi permasalahan. Regulasi dan aturan yang telah di buat oleh Kementrian Negara koperasi dan UKM tidak berjalan dengan baik karena ketiadaan pengawasan yang ketat dari Kementrian koperasi dan UKM, dan dinas terkait, yang ada adalah dinas datang setahun sekali ketika diundang untuk Rapat Akhir Tahun (RAT), itupun hanya menyampaikan sambutan kepala dinas tentang koperasi yang isinya tidak ada perubahan dari tahun ketahun.⁸¹

Menurut Bambang Miswanto; “perkembangan koperasi, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan Koperasi senantiasa atau sering kali terganjal oleh sejumlah masalah klasik. yaitu :

⁸⁰ Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, LKM diarahkan untuk berbadan hukum Koperasi dan dibawah pengawasan Kementrian Koperasi dan UMKM.

⁸¹ Edi, *Manajemen Risiko*., hal. 52.

1. Lemahnya partisipasi anggota
2. Kurangnya permodalan
3. Kurangnya pemanfaatan pelayanan oleh anggota
4. Lemahnya pengambilan keputusan
5. Lemahnya pengawasan
6. Lemahnya manajemen resiko

Masalah – masalah tersebut diatas merupakan potensi resiko yang tampak dan teridentifikasi, sehingga berangkat dari permasalahan umum tersebut Koperasi seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi resiko atas permasalahan tersebut diatas. Selanjutnya bagi Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam baik KSP ataupun USP merupakan industri yang sarat dengan resiko. KSP atau USP sebenarnya adalah miniatur dari perbankan. Yang dikelola hampir sama, yakni uang masyarakat (anggota koperasi) dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat (anggota koperasi dan dalam hal Koperasi memiliki kapasitas berlebih maka Koperasi dapat melayani Non Anggota) yang membutuhkan. Dengan resiko tersebut maka sudah selayaknya jika KSP dan USP menerapkan konsep manajemen resiko, sebagai konsekuensi dari bisnis yang penuh dengan resiko. Artinya resiko yang

mungkin timbul dimitigasi dengan cara menerapkan manajemen resiko disemua lini dan bidang”.⁸²

Penerapan manajemen risiko di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta terutama dalam mengantisipasi risiko pembiayaan melalui mekanisme tanggung renteng bukanlah hal baru. Beberapa Koperasi di Indonesia juga sudah menerapkan pola demikian. Bahkan dengan menerapkan sistem tanggung renteng, koperasi wanita Setia Bhakti Wanita yang berlokasi di Surabaya berhasil menekan risiko pembiayaan dengan tingkat kemacetan piutang (NPL) hingga 0%.⁸³ Demikian juga dengan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mensosialisasikan sistem tanggung renteng kepada koperasi di Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, sistem tanggung renteng diyakini lebih mudah dikembangkan oleh pengurus dan anggota koperasi. Sistem tersebut akan berupaya memperbaiki sikap dan perilaku pengurus serta anggota agar tidak mementingkan keperluan individu.⁸⁴

⁸² Bambang Miswanto, “Manajemen Resiko Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Dan Unit Simpan Pinjam (Usp)”, disampaikan dalam Poverty Alleviation and Microfinance Forum-MICRA Indonesia, 2009.

⁸³ Sumber: http://setiabhaktiwanita.com/?page_id=40/ di akses tanggal 8 Januari 2014.

⁸⁴ Sumber: http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:sistem-tanggung-renteng-diperkenalkan-di-bogor&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98/ di akses tanggal 8 Januari 2014.

Sistem tanggung renteng di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta, disusun dan dibuat oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, penerapan sistem tanggung renteng berhasil berjalan dengan baik. Untuk lebih jelasnya, berikut deskripsi penerapan sistem tanggung renteng pada penyaluran pembiayaan di LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta.

a. Pembiayaan Pola Tanggung Renteng

Dalam penerapannya, pembiayaan pola tanggung renteng LKM-KUBE Sejahtera di setiap kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang sama. Dimana, SOP itu dibuat dan dikembangkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil daerah istimewa Yogyakarta (PINBUK D.I Yogyakarta) selaku pendamping sekaligus mitra Dinas Sosial Propinsi D.I Yogyakarta.

Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan pola tanggung renteng adalah sebagai berikut:⁸⁵

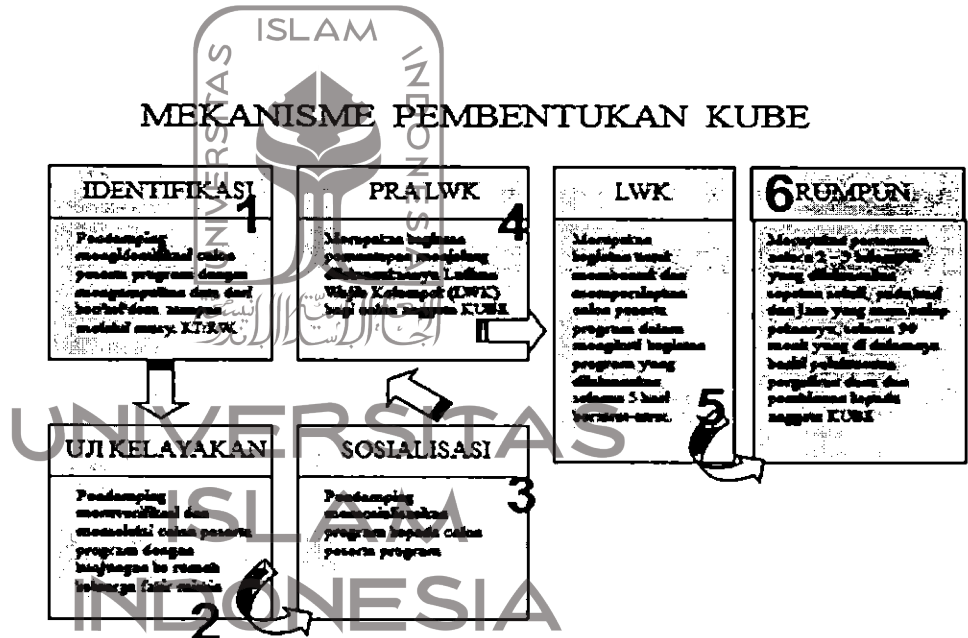
1) Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Salah satu syarat wajib dalam mengakses pembiayaan pola tanggung renteng adalah calon nasabah merupakan anggota kelompok usaha bersama (KUBE). Untuk itu, jika calon nasabah belum memiliki kelompok maka langkah

⁸⁵ PINBUK DIY, "Modul PWK KUBE", (Yogyakarta, 2012), hlm. 12.

awal dalam prosedur pembiayaan pola tanggung renteng adalah dengan membentuk kelompok yang beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar alur mekanisme pembentukan KUBE di bawah ini:⁸⁶

Gambar 2. Mekanisme Pembentukan KUBE



Setelah anggota kelompok terkumpul, maka pihak kelompok mendatangkan pengelola LKM-KUBE Sejahtera untuk melakukan sosialisasi.

⁸⁶ Ibid.

2) Sosialisasi Kelompok

Sosialisasi kelompok dilakukan setelah proses pembentukan kelompok selesai. Sosialisasi di hadiri oleh anggota kelompok dan perwakilan dari LKM-KUBE Sejahtera. Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah proses pengenalan antara anggota kelompok dan LKM-KUBE Sejahtera.

3) Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Pelatihan wajib kelompok atau di singkat PWK merupakan satu rangkaian kegiatan dalam upaya memahami konsep LKM kepada anggota kelompok KUBE. Pelatihan ini bersifat wajib sebelum LKM didirikan.

Ada tiga tahapan PWK yang harus dilewati oleh anggota kelompok KUBE sebelum LKM didirikan.

Adapun pelatihan tersebut terdiri dari:

a) PWK 1

PWK 1 (pertama) bertujuan untuk memahami kepada anggota KUBE tentang substansi program pemberdayaan KUBE dan LKM KUBE serta memantapkan tekad dan komitmen anggota KUBE. Dengan masa pertemuan kurang

lebih 1 jam, anggota KUBE diberikan aturan dalam pertemuan PWK serta sangsi atas pelanggaran aturan tersebut.

b) PWK 2

PWK 2 (kedua) membahas tentang Rencana Usaha Anggota (RUA) dan Rencana Usaha Bersama (RUB). Harapannya dengan pembahasan

ini anggota KUBE dapat membuat RUA untuk usahanya pribadi maupun kelompok. Pada sesi ini anggota KUBE diminta untuk praktek langsung membuat RUA dan memaparkan kepada peserta.

c) PWK 3

Pada PWK 3 (tiga), pendamping menjelaskan mengenai fungsi KUBE dan organisasinya, job description pengurus KUBE dan lain sebagainya.

Selain itu dijelaskan juga tentang mekanisme pembiayaan model tanggung renteng dan penentuan plafon pembiayaan serta kesepakatan untuk bersedia mengikuti pola tanggung renteng.

Bagi anggota yang sudah mempunyai kelompok dan sudah di PWK, maka setiap permohonan pembiayaannya tidak lagi harus mengikuti PWK.

4) Pengajuan atau permohonan pembiayaan

Setelah proses pembentukan kelompok, sosialisasi dan pelatihan wajib KUBE dilakukan maka selanjutnya anggota KUBE bisa melakukan pengajuan pembiayaan dengan mengisi form pembiayaan tanggung renteng yang sudah ditentukan.

Adapun tahapan dalam proses pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

1. Pengisian form dilakukan saat anggota mengajukan pembiayaan ke LKM. Apabila ada kekurangan dalam pengisian form maka akan dibantu oleh pihak LKM.
2. Setelah form terisi berikut dengan jumlah pembiayaan yang akan diajukan, maka langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan anggota kelompok yang lain terkait dengan kemampuan dan jumlah plafon yang disetujui oleh anggota yang lainnya. Di sini, anggota yang lain berhak menentukan nominal plafon yang disetujui dengan penilaian masing-masing.
3. Pada langkah selanjutnya setelah form persetujuan anggota kelompok yang lain terisi, maka ketua kelompok mengoreksi atas isin formulir tersebut dan memutuskan pengajuan anggota tersebut dengan acuan melihat angka persetujuan terendah dari rekomendasi anggota.
4. Proses selanjutnya adalah pengajuan ke LKM dengan mengisi kelengkapan administrasi lainnya

seperti; photo copy KTP/SIM suami istri, Kartu Keluarga.

5) Tahapan proses pencairan pembiayaan

Setelah form pengajuan pembiayaan telah terisi dan diserahkan kepada pihak LKM dalam hal ini adalah bagian marketing/pembiayaan, maka proses selanjutnya adalah LKM melakukan penilaian dengan beberapa langkah sebagai berikut:

➤ Investigasi dan analisa pembiayaan

Penyidikan (investigasi) dan analisa pembiayaan adalah tindakan lanjutan setelah kelengkapan dokumen pengajuan pembiayaan telah dinyatakan lengkap oleh administrasi pembiayaan.

Investigasi dilakukan oleh marketing dengan mendatangi tempat tinggal anggota atau tempat usaha anggota, bertemu dan mengadakan wawancara secara langsung untuk mengklarifikasi data yang telah dilengkapi sebelumnya. Apabila dalam proses wawancara terdapat informasi yang tidak sesuai dengan form isian pengajuan, maka akan mempengaruhi hasil persetujuan pengajuan pembiayaan atau bahkan akan ditolak.

Selain melakukan wawancara kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan, petugas LKM juga melakukan wawancara dengan anggota yang lainnya. Hal ini penting bagi LKM untuk melakukan penilaian dalam proses analisis selanjutnya. Secara umum analisis dilakukan dengan penilaian terhadap 5 C. 5 C yang dimaksud

adalah:

- Penilaian watak (*character*)

Penilaian watak dilakukan kepada anggota dengan melihat beberapa aspek seperti; apakah anggota ini termasuk orang yang disiplin dalam mengikuti pertemuan kelompok, bisa di ajak kerjasama, bertanggung jawab dan lain sebagainya.

- Penilaian kemampuan (*capacity*)

Oleh petugas LKM penilaian kemampuan dapat melihat dari hasil keputusan anggota lainnya yang telah memberikan rekomendasi nominal terendah dari form tanggung renteng.

- Penilaian terhadap modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan menghitung harta kekayaan yang dimiliki oleh anggota, baik kekayaan yang ada di tempat usaha maupun yang ada di rumah.

- Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Karena dalam sistem tanggung renteng agunan adalah form tanggung renteng yang telah disetujui anggota lainnya, maka nilai agunan adalah kepercayaan oleh anggota lainnya.

- Penilaian terhadap prospek usaha mitra/anggota (*condition of economy*)

Memang diakui untuk penilaian dalam aspek melihat prospek usaha kedepan petugas LKM belum sepenuhnya menjalankannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam menganalisa.

- Keputusan atas permohonan pembiayaan

Permohonan pembiayaan anggota yang telah diadakan proses wawancara dan analisis pembiayaan bisa dilanjutkan ke komite pembiayaan. Di sini komite akan merapatkan hasil

investigasi lapangan dan akan memutuskan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan anggota tersebut. Argumentasi marketing dalam menjelaskan hasil analisa anggota berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan komite ini.

➤ **Pencairan pembiayaan**

Selanjutnya, apabila keputusan komite menyatakan setuju atas pengajuan pembiayaan anggota, maka akan dilakukan akad pembiayaan dan pencairan pembiayaan. Namun jika dalam rapat komite mendapatkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan hasil analisa lapangan, maka pencairan pembiayaan akan dibatalkan.

➤ **Monitoring pembiayaan**

Monitoring pembiayaan biasanya dilakukan ketika dilakukan pertemuan rutin bulanan kelompok. Petugas marketing akan datang sekaligus melakukan pembinaan dan mendengarkan cerita anggota sekaligus memberikan solusi atas suatu permasalahan yang muncul.

b. Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, di LKM KUBE Sejahtera menerapkan beberapa langkah sebagai berikut:⁸⁷

1) Koordinasi

Koordinasi adalah merupakan suatu upaya petugas LKM untuk mengetahui permasalahan anggota yang bermasalah. Biasanya petugas LKM akan meminta ketua kelompok yang berkoordinasi terlebih dahulu dengan anggotanya atau bisa juga petugas LKM akan datang langsung bersilaturahmi kepada anggota, mengajak berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anggota. Dalam diskusi ini, petugas LKM akan menawarkan beberapa solusi seperti mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan yang lebih dimudahkan, penjadwalan ulang (*rescheduling*), dan lain sebagainya.

2) *Rescheduling*/ penjadwalan kembali

Rescheduling adalah upaya penjadwalan kembali jangka waktu angsuran pembiayaan di dalam akad pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh ketiadamampuan anggota dalam melakukan angsuran yang disebabkan oleh suatu hal. Upaya ini merupakan upaya *preventif* untuk mencegah kemacetan

⁸⁷ Data hasil wawancara dengan manajer masing-masing LKM KUBE di 3 Kecamatan.

lebih jauh. Upaya memperpanjang jangka waktu pembiayaan seperti dari 1 tahun menjadi 2 atau 3 tahun, sesuai dengan kemampuan anggota setelah dilakukan analisa atau negosiasi ulang. Penjadwalan kembali pembiayaan tidak menambah margin ataupun bagi hasil, karena dalam sistem syariah akad murabahah telah diikat harga jual di awal. Jadi bila terjadi penjadwalan ulang pembiayaan, kerugian semata-mata ada pada pihak LKM, karena kesempatan memperoleh pendapatan dan pokok tidak sesuai waktu yang dijanjikan di awal. Bila akadnya syirkah (*Musyarakah* atau *Muḍārabah*), maka bagi hasil akan mengalami penurunan drastis, karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang masih membebankan bunga bahkan bunga berbunga walaupun anggota dalam kondisi yang menurun atau merugi.

3) *Reconditioning*

Apabila dalam tahapan *rescheduling* ternyata belum berhasil, maka langkah selanjutnya adalah pihak LKM akan melakukan *reconditioning* yaitu dengan mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati pihak anggota dan LKM yang kemudian dituangkan dalam

akad pembiayaan baru. Perubahan kondisi pembiayaan ini dengan melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota dalam menjalankan usahanya. Dalam prakteknya, LKM KUBE Sejahtera melakukan rekondisi dengan mengkonversi pembiayaan jangka pendek menjadi pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang. Karena LKM KUBE Sejahtera menerapkan prinsip syariah, maka ketika rekondisi dilakukan pada akad *Murābahah*, LKM tidak menambahkan margin yang telah ditetapkan di awal walaupun jangka waktunya bertambah panjang dari akad awal. Adapun pada akad *Musyārahah* atau *Mudārahah*, anggota cukup mengembalikan pokok pembiayaan sebagai konsekuensi dari *syirkah* (usaha patungan) yang mengalami kerugian.

4) *Recstructing*

Restructing atau restrukturisasi dapat dilakukan dalam bentuk *preventif* dan reaktif. Bentuk *preventif* yang dimaksud adalah ketika kredit masih tergolong lancar akan tetapi nasabah merasa prospek usaha di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan *cash flow* karena ada perubahan pasar yang tidak bisa diantisipasi yang menyebabkan LKM harus menanggung akibatnya sehingga anggota dengan kesadarannya

melakukan negosiasi dengan LKM untuk melakukan restrukturisasi. Reaktif dilakukan apabila anggota benar-benar telah mengalami kesulitan *cash flow* dan mengalami kemacetan dalam angsuran pembiayaannya.

Jika berkaca pada aturan perbankan yakni Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Penurunan suku bunga kredit
- pengurangan tunggakan bunga kredit
- Pengurangan tunggakan pokok kredit
- Perpanjangan waktu kredit
- Penambahan fasilitas kredit
- Pengambilalihan asset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur”⁸⁸

Ketentuan di atas bersifat umum dan berlaku baik dunia perbankan maupun lembaga keuangan secara keseluruhan.

5) *Punishment*

Punishment atau hukuman adalah upaya paling akhir dari beberapa tahapan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. *Punishment* dalam pembiayaan pola tanggung renteng berbeda dengan pembiayaan lainnya. Karena dalam pembiayaan tanggung renteng tidak mengenal jaminan berupa harta, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Sehingga dalam pelaksanaan *punishment* sesuai dengan kesepakatan awal dalam pola tanggung renteng, yakni anggota kelompok berkewajiban menanggung sisa angsuran pembiayaan anggota yang bermasalah. Hal ini dilakukan setelah tidak ada solusi jalan keluar dalam penanganan pembiayaan bermasalah tersebut. Biasanya *punishment* terberat di LKM KUBE Sejahtera, anggota yang bermasalah dalam pembiayaannya akan dikeluarkan dari kelompok.

⁸⁸ Denico Doly Lumban Tobing : “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang”. *Tesis Magister Kenotariatan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 66-69.

c. Perkembangan dan pengaruh pembiayaan pola tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan.

Aplikasi pembiayaan pola tanggung renteng di setiap LKM KUBE Sejahtera Kota Yogyakarta memiliki standar operasional prosedur yang sama, hanya saja memiliki hasil dan permasalahan yang berbeda-beda. Dalam sub-bab ini akan dipaparkan tingkat perkembangan pembiayaan pola tanggung renteng serta pengaruh pembiayaan tanggung renteng terhadap tingkat risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) di masing-masing LKM KUBE Sejahtera. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan sebagai berikut:

1) LKM KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan

Dari data laporan neraca tahunan LKM KUBE Sejahtera 02 kecamatan wirobrajan yakni periode tahun 2010, 2011, 2012 dan per November 2013 dapat di analisis perkembangan pembiayaan KUBE (pola tanggung renteng). Pada laporan 2010 jumlah pembiayaan berjumlah Rp. 31.368.750, dengan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,00%, jauh dibawah tingkat maksimal NPF 5%.

Pada tahun 2011, jumlah pembiayaan meningkat menjadi Rp. 47.511.250, dengan tingkat NPF sebesar 0,00%. Tahun 2012 jumlah pembiayaan menjadi Rp. 53.520.250, dengan

tingkat NPF sebesar 0,00%. Sedangkan pada tahun 2013 (data per November), jumlah pembiayaan menjadi sebesar Rp. 73.899.750, dengan tingkat NPF sebesar 0,00%.

Dari hasil wawancara dengan tenaga marketing LKM, peningkatan jumlah pembiayaan setiap tahunnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti;⁸⁹

- i. Promosi LKM yang efektif
- ii. Pendampingan kepada KUBE yang berjalan dengan baik.
- iii. Produktifitas kinerja marketing
- iv. Sinergisitas pengurus dan pengelola LKM berjalan dengan baik.

Adapun melihat dari kualitas pembiayaan yakni pada tingkat NPF 0,00% setiap tahun membuktikan bahwa pola tanggung renteng berjalan dengan baik sehingga dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Hal ini Menurut manajer LKM KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan, Amalia Ridhianingrum, dikarenakan fungsi-fungsi atau standar operasional prosedur penerapan tanggung renteng dapat

⁸⁹ Wawancara dengan marketing LKM KUBE Kec. Wirobrajan, Khoeriyah Nur Aeni di Yogyakarta, tanggal 16 Desember 2013 Jam 11:30 WIB.

berjalan dengan baik.⁹⁰ Kesadaran anggota KUBE dalam bertanggung renteng masih tinggi, walaupun ada sedikit permasalahan namun kerjasama antara LKM dan anggota KUBE dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi setiap permasalahan yang ada.

Hal senada diakui juga oleh salah satu anggota kelompok KUBE, bahwa kesadaran dalam bertanggung renteng masih terbangun pada masing-masing anggota. Hal ini dikarenakan pendampingan oleh pengelola LKM kepada kelompok KUBE yang masih berjalan dengan baik.⁹¹

2) *LKM KUBE Sejahtera 131 Kecamatan Danurejan*

Perkembangan tingkat pembiayaan dan kualitas pembiayaan di LKM KUBE Sejahtera 131 Kecamatan Danurejan memiliki keadaan yang berbeda sebagaimana yang ada di LKM KUBE Sejahtera Kecamatan Wirobrajan. Hal ini dapat dilihat dari data laporan keuangan periode tahun 2011, 2012 dan November 2013.

Pada tahun 2011 jumlah pembiayaan tanggung renteng berjumlah sebanyak Rp. 369.522.283 dengan NPF sebesar

⁹⁰ Wawancara dengan manajer LKM KUBE Kec. Wirobrajan, Amalia Ridhianingrum di Yogyakarta, tanggal 16 Desember 2013 Jam 11:15 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan anggota kelompok LKM KUBE Kec. Wirobrajan, Agustin di Yogyakarta, tanggal 16 Desember 2013 Jam 16:30 WIB.

2,89%. Lalu pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 426.618.805, dengan tingkat NPF sebesar 4,77%. Dan pada tahun 2013 jumlah pembiayaan menjadi Rp. 456.417.319, dengan tingkat NPF sebesar 16,56%.

Pada tahun 2011 dan 2012, pembiayaan bermasalah relatif lebih terkontrol yakni dibawah batas maksimum 5%. Dari hasil wawancara dengan manajer LKM, kondisi ini merupakan efek dari berjalannya pola tanggung renteng yang telah diterapkan oleh pengelola LKM KUBE 131 Kecamatan Danurejan.⁹² Hal ini juga di akui oleh ketua kelompok KUBE 1 yang merupakan anggota LKM 131 Kecamatan Danurejan, bahwa pola tanggung renteng yang berjalan dengan baik dikarenakan anggota kelompok yang kompak, dan salah satu faktornya adalah latar belakang pendidikan.⁹³

Namun, pada tahun 2013 tingginya angka NPF yang melebihi ketentuan maksimum merupakan kondisi yang tidak baik bagi keuangan LKM. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kemampuan anggota dalam memberikan angsuran pembiayaan kepada LKM. Alasan yang didapat dari hasil

⁹² Wawancara dengan Emma Oktaviani Asih di Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2013 Jam 09:15 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Emmy Juliati di Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2014 Jam 14:11 WIB.

wawancara dengan manajer LKM menyebutkan bahwa menurunnya kemampuan anggota dalam memberikan angsuran kepada LKM dikarenakan kondisi usaha yang kurang produktif. Salah satu alasan menurunnya produktifitas usaha anggota itu dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang sedang melemah, yakni dengan melambungnya harga-harga barang seperti pangan dan kebutuhan primer masyarakat.

Oleh Ketua pengurus LKM, keadaan di atas membutuhkan perhatian yang serius, tidak hanya oleh pengelola LKM, akan tetapi peran pengurus dalam hal ini memberikan monitoring dan evaluasi sangat diperlukan.⁹⁴

3) *LKM KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo*

Tingkat pertumbuhan pembiayaan dan analisis pembiayaan bermasalah (NPF) di LKM KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo yakni periode tahun 2010, 2011, 2012 dan November 2013 dapat dideskripsikan sebagai berikut;

Pada tahun 2010, jumlah pembiayaan hanya mencapai Rp. 2.830.000,- Adapun tingkat NPF 0,00%. Lalu pada tahun 2011 jumlah pembiayaan meningkat menjadi Rp. 20.130.000,- dengan tingkat NPF 22,01%. Menurut manajer LKM KUBE

⁹⁴ Wawancara dengan ketua pengurus LKM KUBE Kec. Danurejan, Sri Handayani di Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2013 Jam 09:30 WIB.

Sejahtera Kecamatan Umbulharjo,⁹⁵ tingginya tingkat NPF di tahun 2011 ini yang melebihi batas maksimum 5% dikarenakan permasalahan pada anggota KUBE. Menurunnya tingkat produktivitas usaha anggota KUBE menjadi permasalahan utama dalam pembayaran pembiayaan.

Lalu pada tahun 2012, tingkat pembiayaan meningkat signifikan menjadi Rp. 91.316.609,88,- dengan tingkat NPF 19,32%. Sebagaimana di tahun sebelumnya, pada tahun ini tingkat NPF di LKM KUBE Sejahtera kecamatan umbulharjo masih melebihi batas maksimum 5%. Informasi yang didapat dari hasil wawancara menyebutkan bahwa selain menurunnya produktivitas usaha anggota KUBE yang melakukan pembiayaan di LKM, juga dipengaruhi oleh menurunnya kekompakan anggota KUBE dalam menerapkan pola tanggung renteng.⁹⁶ Oleh anggota kelompok KUBE permasalahan menurunnya kekompakan tersebut seperti adanya anggota yang tidak mau ikut menanggung pembiayaan anggota yang

⁹⁵ Wawancara dengan ketua pengurus LKM KUBE Kec. Umbulharjo, Nining Herawati di Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2013 Jam 11:00 WIB.

⁹⁶ Wawancara dengan teller LKM KUBE Kec. Umbulharjo, Dian Prameswari di Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2013 Jam 11:12 WIB.

bermasalah, minimnya pertemuan kelompok, serta intensitas pembinaan LKM kepada KUBE yang mengalami penurunan.⁹⁷

Adapun pada data laporan keuangan tahun 2013 (data per-November), jumlah pembiayaan mencapai Rp. 91.178.845,88,- dengan tingkat NPF 30,60%. Permasalahan tingginya NPF di tahun 2013 sama dengan permasalahan yang ada di tahun 2012 sehingga kondisi ini belum ada peningkatan. Menurut Priyono Wakil Ketua Pengurus LKM sekaligus ketua salah satu kelompok KUBE menyatakan bahwa kondisi di atas bisa di atasi apabila SOP pengelolaan LKM bisa berjalan dengan baik, dan hal yang paling penting adalah efektifitas kinerja SDM pengelola.⁹⁸ Memang di akui bahwa LKM KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo membutuhkan tambahan pengelola dalam operasional hariannya.

d. Dinamika dalam aplikasi pembiayaan pola tanggung renteng

Penerapan pola tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah memang terbukti berjalan efektif. Namun dalam prakteknya di lapangan menemukan berbagai macam

⁹⁷ Wawancara dengan anggota kelompok LKM KUBE Kec. Umbulharjo, Sunaryono di Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2014 Jam 14:30 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan wakil ketua pengurus LKM KUBE Kec. Umbulharjo, Priyono di Yogyakarta, tanggal 20 Januari 2014 Jam 09:30 WIB.

problematika dan permasalahan. Diperlukan keyakinan, tidak hanya bagi pengelola LKM juga bagi anggota. Selain itu, menciptakan kebersamaan antar anggota kelompok agar memiliki rasa tanggung jawab bersama juga menjadi bagian yang sulit dalam realisasinya dilapangan.

Di tiga LKM KUBE Kota Yogyakarta telah berhasil memberikan satu gambaran betapa model tanggung renteng merupakan pola yang efektif dalam meminimalisir risiko dalam pembiayaan. Namun demikian, tidak sedikit pula permasalahan yang muncul. Dari hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan 2 (dua) permasalahan yakni, internal dan eksternal.

1) Permasalahan Internal

Yang dimaksud dengan permasalahan internal adalah yaitu permasalahan dalam menerapkan standar baku oleh LKM kepada anggota. LKM memiliki standar prosedur dalam penerapan pola tanggung renteng kepada anggota, namun terkadang standar tersebut tidak semuanya diterima oleh anggota. Olehkarena itu, pihak LKM harus bertindak tegas sehingga standar prosedur tersebut memang harus diterima oleh anggota.

Di lapangan, ketika standar prosedur penerapan tanggung renteng itu tidak mau di ikuti oleh anggota kelompok, maka

pihak LKM tidak akan memberikan akses pembiayaan kepada kelompok tersebut sehingga kelompok tersebut pada akhirnya mau mengikutinya.

Oleh karena itu, di pihak LKM dibutuhkan keuletan dan ketegasan sikap, sehingga aturan main dalam pola tanggung renteng dapat berjalan dengan baik. Jika LKM tidak memiliki sikap demikian, maka fungsi-fungsi tanggung renteng tidak akan berjalan dengan baik.

2) Permasalahan Eksternal

Permasalahan eksternal adalah permasalahan yang muncul pada anggota kelompok yang mengikuti pola tanggung renteng. Hilangnya rasa kebersamaan, kekompakan, disiplin, saling percaya, tanggung jawab, merupakan fenomena yang sering muncul di dalam kelompok anggota. Akhirnya, dengan keadaan demikian maka imbasnya adalah munculnya pembiayaan-pembiayaan bermasalah.

Dengan keadaan seperti ini, maka pihak LKM akan kembali memberikan pendampingan intensif melalui pendekatan-pendekatan persuasif, memberikan solusi-solusi penyelesaian masalah hingga pada titik akhir apabila tidak dapat diselesaikan permasalahan internal salah satu kelompok

maka langkah akhirnya adalah dengan melakukan restrukturisasi hingga pembubaran kelompok.

B. Analisis Penelitian

1. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pola Tanggung Renteng.

Sebagai lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah dan berbadan hukum koperasi, LKM KUBE Kota Yogyakarta merupakan bisnis yang diprotek/dipagar dengan berbagai peraturan perundang-undangan baik dari Kementrian Koperasi maupun aturan perundang-undangan LKM itu sendiri. Karena, lembaga keuangan adalah bisnis yang rawan dengan masalah dan menyangkut kehidupan perekonomian orang banyak. Dengan demikian, perlu dikedepankan pentingnya pengelolaan/manajemen risiko dengan model atau pendekatan yang sesuai dengan kultur masyarakat.

Di LKM KUBE Kota Yogyakarta, penerapan manajemen risiko khususnya dalam mengantisipasi risiko pembiayaan, dikembangkanlah model tanggung renteng. Untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan pembiayaan tanggung renteng maka peneliti melakukan observasi turun langsung lapangan dan melakukan interview. Interview dilakukan kepada pengurus dan pengelola serta anggota. Pertanyaan yang diajukan adalah, bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pola tanggung renteng di LKM KUBE, persyaratan permohonan pembiayaan,

penyidikan/analisis pembiayaan, keputusan atas permohonan pembiayaan?
monitoring dan penanganan pembiayaan bermasalah?

Dari pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa acuan yang digunakan dalam penerapan pembiayaan pola tanggung renteng di LKM KUBE adalah modul yang dikembangkan oleh PINBUK DIY dan Kepmen No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

Berdasarkan jawaban dari pengurus dan pengelola LKM KUBE penerapan pembiayaan pola tanggung renteng dilakukan ketika anggota mempunyai satu kelompok yang biasanya terdiri dari 10-15 orang. Sebelum terbentuk kelompok tersebut, ada tahapan yang harus dilalui yakni pelatihan wajib kelompok (PWK) yang terdiri dari 3 tahap. Tahapan-tahapan itu merupakan langkah LKM KUBE Kota Yogyakarta untuk membentuk watak dan karakter anggota agar betul-betul memahami hak dan kewajiban menjadi anggota LKM dan secara tidak langsung LKM juga menerapkan prinsip "*Know Your Costomer Principles*" (Prinsip Mengenal Nasabah/Anggota).

Dalam dunia perbankan, prinsip mengenal nasabah adalah sebagai upaya untuk mencegah sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.⁹⁹ Prinsip ini sebetulnya bertujuan

⁹⁹ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk*, hlm. 405.

untuk membangun kesamaan persepsi agar semua tujuan-tujuan dapat tercapai.

Hal lainnya, dalam proses PWK tersebut juga diajarkan untuk menyusun rencana usaha anggota (RUA) yang tujuannya agar anggota dapat menjalankan usahanya dengan baik. Jadi nilai yang terdapat dalam beberapa tahapan PWK tersebut sebetulnya merupakan bagian dari proses pengendalian risiko. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 27 dalam Kepmen No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang menghendaki Koperasi/LKM menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, serta melakukan penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota yang dibiayai dengan mempertimbangkan watak, kemampuan dan lain sebagainya.

Ketika kelompok sudah terbentuk dan tahapan-tahapan PWK sudah dilalui, maka setiap anggota berhak mengajukan permohonan pembiayaan. Namun, syarat selanjutnya ketika mengajukan permohonan pembiayaan, anggota wajib mengisi formulir tanggung renteng yang disepakati/disetujui oleh anggota lainnya dalam satu kelompok. Formulir tanggung renteng berisi tanda-tangan persetujuan anggota-anggota lainnya yang intinya bahwa anggota lainnya siap menanggung beban pembiayaan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut jika suatu hari tidak sanggup membayar pembiayaannya kepada LKM. Dalam formulir tanggung renteng itu juga, anggota lainnya berhak

merekomendasikan jumlah pembiayaan yang dinilai sesuai dengan kemampuan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.

Dari mekanisme ini, memudahkan pihak LKM dalam menganalisa kelayakan atau kemampuan anggota dalam mengembalikan kewajibannya. Dan form tanggung renteng yang disepakati oleh anggota lainnya dalam satu kelompok tersebut menjadi agunan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28, ayat (2) Kepmen No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwasanya agunan dapat berupa pernyataan kesanggupan tanggung renteng diantara anggota.

Dalam istilah perbankan istilah pemberian jaminan atas diri atau disebut *Personal Guarantee/Borgtocht*. Hal ini di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1820, yang menyatakan bahwa:

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Pada proses selanjutnya, setelah form tanggung renteng dan beberapa berkas lainnya sudah dilengkapi, pihak LKM melakukan penyidikan lebih lanjut. Sebagaimana yang telah disampaikan di dalam bab pembahasan bahwasanya penyidikan dilakukan oleh marketing LKM dengan turun kelapangan, melihat langsung usaha anggota yang mengajukan pembiayaan serta bertemu dengan anggota-anggota lainnya yang memberi

rekomendasi. Hal ini merupakan satu langkah tepat dan bagian dari strategi untuk menerapkan prinsip 5 C. Menurut Tutik Retnowati, selain prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5 C merupakan prinsip dalam pemberian kredit oleh suatu bank atau lembaga keuangan.¹⁰⁰

Jadi, prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) yang diterapkan oleh pihak LKM KUBE merupakan salah satu langkah pengendalian risiko yang juga terdapat dalam pasal 27 ayat 2 pada Kepmen No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tersebut.

Bila dicermati lebih lanjut, sebetulnya informasi dari anggota kelompok lainnya sudah cukup menjadi bekal bagi pihak LKM dalam mengambil keputusan penerimaan pembiayaan. Apalagi jika kita ketahui bahwa dalam satu kelompok KUBE, jaminan kepercayaan merupakan salah satu komponen mutlak yang harus ada dalam sistem tanggung renteng. Oleh karena itu, tentu saja masing-masing anggota akan menjaga kredibilitasnya di hadapan anggota-anggota lainnya. Jika kemudian ada anggota dari segi karakternya tidak baik, maka akan mendapatkan kesulitan untuk memperoleh persetujuan dari anggota lainnya. Inilah salah satu dampak positif bagaimana sistem tanggung renteng dapat memunculkan rasa tanggung jawab pada pribadi tiap anggota untuk secara

¹⁰⁰ Tutik Retnowati, "Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Perorangan", *Makalah*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2005, hlm. 3.

bersama-sama menjaga kelompoknya agar tetap sehat kegiatan simpan pinjamnya.

Adapun jawaban dari hasil interview dengan anggota kelompok untuk pertanyaan ke dua menyebutkan bahwa terdapat beberapa kesulitan dalam menjalankan pembiayaan pola tanggung renteng. Dan hal inilah yang membedakan antara LKM satu dengan LKM lainnya.

Pada LKM KUBE 02 Kecamatan Wirobrajan dan LKM KUBE 131 Kecamatan Danurejan, standar operasional prosedur sistem tanggung renteng sebagaimana dijelaskan di awal berjalan dengan baik. Paragraf-paragraf sebelumnya merupakan gambaran penerapan sistem tanggung renteng di dua LKM KUBE ini.

Namun, pada LKM KUBE Kecamatan Umbulharjo sistem tanggung renteng berjalan tidak baik. Hal ini dapat dilihat pada bab pembahasan dimana selain tingkat *npf* yang tinggi, juga alokasi pembiayaan lebih banyak kepada anggota non KUBE yang tidak memakai sistem tanggung renteng dalam penyaluran pembiayaannya. Adanya kesulitan dalam menerapkan sistem tanggung renteng seperti adanya anggota lainnya dalam satu kelompok yang tidak kompak, mau menang sendiri, dan belum begitu faham dan sadar tentang tanggung jawab dalam bertanggung renteng. Hal ini di akui oleh pengelola LKM KUBE Kecamatan Umbulharjo ketika menjawab pertanyaan ke dua ini.

Namun untuk pertanyaan ke dua ini, LKM KUBE di dua kecamatan seperti Wirobrajan dan Danurejan, pihak pengelola mempunyai strategi dalam mensikapi kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dari penerapan tanggung renteng yakni dengan mengidentifikasi sumber risiko. Sumber risiko seperti menurunnya kekompakan anggota dalam satu kelompok akan disiasati dengan melakukan pendampingan yang lebih intensif. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor bahwa proses manajemen risiko adalah proses dengan dua langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber risiko, yakni mengidentifikasi variabel utama yang menyebabkan risiko tersebut. Langkah kedua adalah menyusun metode untuk mengukur risiko tersebut. Setelah kerangka umum identifikasi risiko dan manajemen risiko telah dikembangkan, teknik tersebut dapat diaplikasikan terhadap berbagai situasi, produk, instrumen dan institusi yang berbeda.¹⁰¹

Sumber risiko terletak pada internal kelompok KUBE yang kemudian berimbas pada mekanisme pembiayaan di LKM KUBE. Dengan demikian, strategi LKM dengan melakukan pendampingan intensif, dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi yang tujuannya adalah memetakan kekuatan dan kelemahan di internal kelompok KUBE, adalah langkah tepat dalam mengantisipasi risiko.

¹⁰¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, (Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007), hlm. 228.

2. Analisis Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pola Tanggung Renteng Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF).

Non Performing Financing (npf) adalah suatu rasio keuangan bank yang menggambarkan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.¹⁰² *NPF* menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan. Bahkan menunjukan kepada bank akan mengalami risiko kegagalan.¹⁰³

Analisa pengaruh penerapan manajemen risiko pembiayaan pola tanggung renteng terhadap tingkat *npf* di LKM KUBE Kota Yogyakarta didapat dari hasil interview dan dari data primer (laporan *breakdown kolektibilitas*) masing-masing LKM KUBE Kota Yogyakarta. Adapun pertanyaan dalam interview yang peneliti lakukan kepada pengelola LKM KUBE adalah: Bagaimana pengaruh penerapan pembiayaan pola tanggung renteng terhadap *npf*? Bagaimana strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

Untuk pertanyaan pertama, peneliti mendapatkan penjelasan secara langsung dari hasil interview dan merujuk pada laporan *breakdown kolektibilitas*. Di LKM KUBE 02 Kec. Wirobrajan dimana dalam analisa awal menunjukkan bahwa standar operasional prosedur tanggung renteng

¹⁰² Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001.

¹⁰³ Veithzel Rivai, *Kredit Management Handbook*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 112.

berjalan dengan baik dan hal ini ditunjukkan dengan tingkat *npf* dari tahun 2010-2013 sebesar 0%. Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 maka dapat di analisa bahwa pembiayaan di LKM KUBE 02 Kec. Wirobrajan masuk kategori lancar. Berjalannya mekanisme tanggung renteng berjalan yang sesuai standar operasional prosedur, menjadi faktor utama minimnya risiko pembiayaan.

Adapun di LKM KUBE 131 Kec. Danurejan yang juga menunjukkan berjalan dengan baiknya pembiayaan pola tanggung renteng, pada tahun 2011-2013, tingkat NPF sebesar 2,89%, 4,77%, dan 16,56%. Hanya saja ada sedikit permasalahan pada laporan per Nopember 2013, tingkat *npf* melebihi ketentuan. Dari hasil interview yang telah dijelaskan di bagian pembahasan bahwa kondisi ini dikarenakan ketidakmampuan anggota dalam membayar pinjaman atau bisa juga disebut dengan istilah risiko gagal bayar (*default risk*). Persoalan *default risk* di LKM KUBE 131 Kec. Danurejan lebih disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional yang melemah dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Senada dengan hal ini, menurut Irham Fahmi¹⁰⁴ persoalan *default risk* disebabkan oleh beberapa hal seperti; kondisi makro ekonomi yang tidak stabil dan atau kerugian perusahaan yang terjadi karena faktor menurunnya angka penjualan secara sistematis. Namun sebenarnya jika pihak LKM betul-

¹⁰⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko.*, hlm. 31-32.

betul menerapkan salah satu dari 5 prinsip (5 C) analisis kelayakan dalam pemberian pembiayaan yakni *Condition Of Economy* (keadaan ekonomi), maka *default risk* mungkin saja bisa diminimalisir. Menurut Edi,¹⁰⁵ faktor yang ada dalam Analisis 5 C's merupakan faktor penting dalam menjamin mutu kredit/pembiayaan. Setiap permohonan kredit/pembiayaan yang telah melewati tahap penilaian (analisis 5'C), maka kredit/pembiayaan yang berjalan akan menjadi kredit/pembiayaan yang risikonya minim.

Di LKM KUBE Kecamatan Umbulharjo yang pada analisa awal menunjukkan bahwa mekanisme tanggung renteng tidak berjalan dengan baik, dengan demikian dapat dilihat dari tingkat *npf* yang melebihi batas maksimum dari ketentuan. Dimana periode tahun 2011-2013 tingkat *npf* berkisar di atas 5% yakni 22,01%, 19,32% dan 30,60%. Hal ini merupakan wujud kegagalan pengelola LKM dalam menerapkan standar operasional prosedur tanggung renteng, dan hal ini juga melanggar Pasal 27 tentang pengendalian risiko, bahwa KJKS wajib memperhatikan azas-azas pembiayaan yang sehat. Untuk itu, perlu sistem kontrol internal, hingga audit internal dan eksternal agar pengelolaan operasional LKM dapat berjalan dengan baik.

Dalam mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah, pada prinsipnya setiap LKM KUBE melaksanakan langkah-langkah seperti koordinasi, penjadwalan kembali, *reconditioning*, *recstructing*, dan

¹⁰⁵ Edi, "Manajemen Risiko", hlm. 28.

punishment. Hanya saja dapat dicermati pada LKM KUBE Kecamatan Umbulharjo langkah tersebut tidak berjalan efektif karena terbukti tingkat *npf* melebihi batas ketentuan. Selain bermasalah dalam menerapkan prinsip pemberian pembiayaan (prinsip 5 C), ketidakmampuan SDM pengelola juga menjadi kendala yang utama.

3. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pola Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*

Dalam pandangan Islam, manajemen adalah melakukan segala sesuatu secara rapi, benar, tertib dan teratur, suatu proses yang diikuti dengan baik sesuai prosedurnya.¹⁰⁶ Untuk itu, mempelajari manajemen bertujuan agar sesuatu terlaksana dengan baik dan teratur dan tujuan tercapai. Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan baik, diharapkan hasilnya juga baik. Namun apa hasil yang diperoleh di masa yang akan datang tidak diketahui, dengan kata lain adanya ketidakpastian. Apabila nantinya diperoleh hasil yang diinginkan berarti sukses dan harus bersyukur. Dalam hal hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan maka harus telah mempunyai tata cara untuk mengantisipasinya untuk itu perlu manajemen risiko.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk*, hlm. 3.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

Pembiayaan pola tanggung renteng yang merupakan sistem manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh LKM KUBE Kota Yogyakarta merupakan satu langkah efektif dalam meminimalisir risiko. Karena pengelolaan LKM KUBE tidak hanya berhubungan antara manusia dengan manusia, akantetapi juga manusia dengan Allah, karena berkaitan dengan menjaga amanah. Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia.¹⁰⁸

Selain itu, dengan bertanggung renteng berarti memupuk kebersamaan dan rasa tanggung jawab. Kebersamaan dan tanggung jawab bersama merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Kebersamaan merupakan satu wadah untuk bisa saling menyeru kepada kebaikan. Karena setiap Muslim mempunyai tugas untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi (mencegah) kemungkaran seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 114 yang berbunyi:¹⁰⁹

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وُسْرَ عُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

¹⁰⁸ Fathurrahman, dikutip oleh Edi, *Manajemen Risiko*., hlm. 7.

¹⁰⁹ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Medinah: Muja'mma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf Asy Syarif, 1971), hlm. 94.

Artinya: “Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.”

Menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran adalah prinsip dasar Islam yang membedakannya dengan agama lain. Untuk itu Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dalam skema tanggung renteng pun terdapat landasan syar’i yang sebetulnya mirip dengan yang sudah diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah. Jika dalam hukum perdata istilah tanggung renteng bisa juga disebut *Personal Guarantee/Borgtocht*, adapun dalam Fiqh Muamalah skema tanggung renteng dapat diasumsikan sebagai *al-Kafālah*. Menurut Dimyauddin Djuwaini,¹¹⁰ *Al-Kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Erwandi Tarmizi akad *kafālah* atau *ḍomān* atau *hamālah* (berarti : jaminan) merupakan salah satu akad dalam fiqh muamalah yang banyak digunakan dalam produk dan jasa Lembaga Keuangan Syariah.¹¹¹

¹¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 247

¹¹¹ Erwandi Tarmizi. “Kafalah Bil Ujah (Imbalan Akad Jaminan) dalam Pandangan Fiqh Islam”, dikutip dari <http://ustadzsbu.blogspot.com/2009/04/kafalah-bil-ujrah-imbahan-akad-jaminan.html/> pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2014 jam 00.09 WIB

Secara garis besar akad *Kafālah* dapat dibedakan menjadi dua, yakni *al-kafālah bil-māl* dan *al-kafālah bin-nafs*. *Al-kafālah bil-māl* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Sedangkan *al-kafālah bin-nafs* merupakan akad pemberian jaminan atas diri (*personal guarantee*).¹¹² Dalam skema tanggung renteng tentu saja masuk dalam kategori *al-kafālah bin-nafs*. Dan secara prinsip apa yang telah dilakukan LKM KUBE sudah memenuhi rukun dan syarat akad *kafālah*. Adapun rukun dan syarat *kafālah* terdiri atas *sighat kafālah* (ijab qabul), *makful bih* (objek tanggungan), *kāfil* (penjamin), *makful anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).¹¹³

Pertama, *sighat* merupakan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan atau dalam tanggung renteng memakai form kesanggupan tanggung renteng. Kedua, *Makful bih* atau objek pertanggungan yang disyaratkan nominalnya harus jelas. Dalam form tanggung renteng nominal objek pertanggungan tersebut sudah ditentukan anggota lainnya dan disepakati secara bersama.

Ketiga, *kāfil* haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain.¹¹⁴ Dalam satu kelompok KUBE

¹¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh.*, hlm. 250.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 249.

setiap anggota ditanamkan rasa kebersamaan untuk kemaslahatan bersama, namun ketika itu tidak ada maka tentu saja kategori syarat kafil ini menjadi rusak. Keempat, *makful 'Anhu* yang syarat utamanya adalah mampu menerima objek pertanggungan. Di dalam form tanggung renteng, kesepakatan nominal pembiayaan yang diajukan adalah nominal terkecil yang dipilih atau ditentukan oleh anggota. Tentu saja itu merupakan pertimbangan yang adil dengan memperhatikan kemampuan masing-masing anggota yang memberikan rekomendasi,

Kelima, *makful lahu* di syaratkan harus dikenali *kāfil*, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah memenuhinya. Kafil dalam hal ini anggota KUBE lainnya tentu saja mengenal *makful lahu* (pihak LKM), karena awal kelompok KUBE terbentuk melalui tahapan pelatihan dan selalu didampingi oleh pihak LKM.

Jadi sebetulnya, sistem tanggung renteng yang berjalan dengan baik secara prinsip sesuai dengan akad *al-Kafālah* dalam hal ini termasuk dalam kategori *al-Kafālah bin-nafs*. Hanya saja dalam prakteknya di tiga LKM KUBE Kota Yogyakarta penggunaan akad *al-Kafālah* belum diketahui atau belum dipopulerkan. Hal ini menjadi temuan peneliti dan akan dimasukkan dalam rekomendasi.

Selain itu, nilai yang terkandung dalam kelompok KUBE adalah harmonisasi antar individu. Islam telah mengatur dan mengembangkan

hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakatnya untuk bekerja sama dan tidak menghendaki adanya perselisihan antara satu dengan yang lainnya.¹¹⁵ Dalam satu kelompok usaha (KUBE) misalnya, adanya kerjasama yang baik dan harmonis akan menjadi satu kekuatan dalam mencapai tujuan usaha. Menurut Afzalur Rahman,¹¹⁶ konsep harmonis inilah yang menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam yang membedakan dengan kapitalisme dan komunisme. Oleh Yusuf Qardhawi,¹¹⁷ ruh dari sistem kapitalis disebut sangat jelas dan nampak pada pengkultusan individu, kepentingan pribadi, dan kebebasannya yang hampir-hampir bersifat mutlak dalam pemilikan, pengembangan, dan pembelanjaan harta. Pola pikir kemanfaatan individualis, yang tidak peduli dengan kepentingan orang lain selagi ia tidak memberikan keuntungan, tidak peduli dengan kepentingan masyarakat, apalagi jika bertentangan dengan kepentingan pribadinya, perhatian utamanya hanya bertujuan kepada persaingan dengan lawan dan upaya mengalahkannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa sistem ekonomi Islam menghendaki kolektivisme dalam aktifitas ekonomi seperti halnya dalam konsep

¹¹⁵ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jil. 1 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 91.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 92.

¹¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk, Cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 83.

pembiayaan tanggung renteng. Menurut Sri Edi Swasono,¹¹⁸ kolektivisme Indonesia tidak pula terlepas dari paham kebersamaan yang berdasar atas asas kekeluargaan Indonesia. Kolektivisme Indonesia berdasar pada ideologi kebangsaan dan kerakyatan merupakan inti dari nasionalisme Indonesia.¹¹⁹ Apalagi jika dengan kolektivisme tersebut mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kemungkinan risiko yang ada. Pada akhirnya ketika kolektivisme itu secara konsisten dapat terbangun, sehingga kemungkinan risiko dapat terbandung, maka niscaya kemakmuran bersama akan dapat tercapai. Kemakmuran menurut Islam berarti keadaan di mana seseorang mampu menghidupi diri dan keluarganya, di mana ia sejajar dengan masyarakat umum, yang berarti dalam menjalani kehidupannya ke depan ia memiliki pijakan yang sama dengan masyarakat umum, menikmati standar hidup yang sama dengan mereka tanpa ada kesulitan dan kesukaran.¹²⁰ Dengan cara demikian, tanggung renteng berhasil menciptakan nilai-nilai luhur seperti kolektivisme (kebersamaan).

¹¹⁸ Sri Edi Swasono, *Tanggung Renteng Dan Kemandirian Rakyat*, dalam Eddy Roesdiono, *Tanggung Renteng: Sebuah Biografi Mursia Zaafri Ilyas*. (Surabaya: Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita, 1998), hlm. 123.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 125.

¹²⁰ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Our Economic*, alih bahasa Yudi, Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 473.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi pembiayaan pola tanggung renteng memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut; pembentukan kelompok usaha yang terdiri dari 10 orang, sosialisasi kelompok, mengikuti pelatihan wajib kube (PWK) 1, 2 dan 3, pengajuan atau permohonan pembiayaan, tahapan proses pencairan. Hanya saja kesimpulan dari penelitian ini dari 3 LKM KUBE di tiga Kecamatan, LKM KUBE Kecamatan Wirobrajan dan LKM KUBE Kecamatan Danurejan saja yang pembiayaan pola tanggung rentengnya berjalan dengan baik. Sedangkan LKM KUBE di Kecamatan Umbulharjo berjalan tidak baik karena terkendala banyak hal.
2. Ada kecenderungan kuat penerapan pola tanggung renteng terhadap tingkat risiko pembiayaan. Apabila penerapan tanggung renteng berjalan dengan baik, maka dapat meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan oleh LKM KUBE Kecamatan Wirobrajan dan LKM KUBE Kecamatan Danurejan dengan tingkat pembiayaan bermasalahnya rata-rata di bawah batas ketentuan 5%. Sebaliknya, berbeda dengan LKM KUBE Kecamatan Umbulharjo.

Adapun Pembiayaan pola tanggung renteng secara prinsip berkesesuaian dengan prinsip syariah. Dalam hal ini akad *al-Kafālah* dalam fiqh muamalah menjadi satu acuan yang sesuai dengan mekanisme tanggung renteng.

B. Saran

1. Bagi LKM KUBE agar meningkatkan kembali pelaksanaan standar operasional prosedur pembiayaan tanggung renteng supaya dapat meminimalisir risiko pembiayaan.
2. Hubungan antara pengelola, pengurus dan pengawas agar lebih ditingkatkan kembali.
3. Kedepan, karena LKM KUBE memakai badan hukum KJKS maka akad *al-Kafālah* bisa di aplikasikan dalam pembiayaan tanggung renteng.
4. Sistem tanggung renteng ini tidak hanya dilaksanakan untuk LKM KUBE yang memang berbasis kelompok, lembaga keuangan mikro lainnya pun sebetulnya bisa mengadopsi sistem ini sebagai langkah dalam meminimalisir risiko pembiayaan.
5. Saran untuk peneliti selanjutnya agar bisa membahas manajemen risiko pembiayaan pola tanggung renteng dengan membandingkan dengan LKM/Koperasi lainnya yang menggunakan sistem tanggung renteng dalam penyaluran pembiayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam., Fitchett. 2006. "Microfinance Institutions And Economic Development: Evidence from Developing Countanggung rentengies". *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 21, No. 3, 2006.
- an-Nawawi, Imam. 1999. *Riyadhus Shalihin (Jilid I)*. Jakarta: Pustaka Imani
- Anoname. "Sistem Tanggung Renteng" dalam http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:sistem-tanggung-renteng-diperkenalkan-di-bogor&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98/diakses pada Rabu, 8 Januari 2014, pukul 13.01 WIB
- Arsyad, Lincolin. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Arifin, Syaiful. 2008. "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontanggung rentengibusnya pada Tercapainya Zero Bad Debt". *Keuangan dan Perbankan*. Vol. XII, No. 3, September 2008.
- ash Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Our Economic*, alih bahasa Yudi. Jakarta: Zahra.
- Baswir, Revrison. 2009. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Sosial RI. 2004. *Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif*. Jakarta
- Dewi, Chandra. 2009. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit dan Dampaknya terhadap Non Performing Loan; Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Jawa Tengah". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edi. 2013. "Manajemen Risiko di BMT Beringharjo Yogyakarta dan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta". *Tesis*. MEK UII Yogyakarta.

- Eiteman, K. David, dkk. 1995. *Multinational Bussiness Finace*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal, Sanafiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Griffin, W. Ricky., Ronald J. Ebert. 2001. *Business*. Prentice Hall International Editons.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Resech, untuk penulisan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi, jilid 2*. Yogyakarta: ANDI
- Habib Ahmed, Tariqullah Khan. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Iqbal, Zamir., Abbas Mirakhor. 2007. *An Intanggung rentengoduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Karim, A. Adiwarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta; PT Raja Grafindo.
- Kashmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Medinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf Asy Syarif
- Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2006. *Pengembangan Usaha Mikro Melalui Pola Tanggung Renteng*.
- Koecoroningrat. 1976. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kusuma. 2002. "Membangun Institusi Warga Untuk Menanggulangi Kemiskinan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal". Dalam *Jurnal Analisis Sosial* VII (2): 169-186. Jakarta
- Ledgerwood, Joanna. 2006. , "Transforming Microfinance Institutions: Providing Full Financial Services to the Poor", The International Bank for Reconstruction and Development".

- Mannan, M. Abdul, 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mattjik, Muslimah. 2011. Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan dengan Model Standard dan Internal pada BPRS Harta Insan Karimah. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miswanto, Bambang. 2009. "Manajemen Risiko Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dan Unit Simpan Pinjam (USP)". Proverty Alleviation and Microfinance Forum-MICRA Indonesia.
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetanggung rentengasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta" UPP AMM YKPN
- Nandifah, Ernawati. 2008. "Analisis Manajemen Risiko Kredit Umum Pedesaan dengan Bantuan Simulasi Program Komputer: Studi Kasus BRI Unit Ciampea, Bogor". *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Narbuko, Cholil dan Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa.
- Pangabeana, Riana. 2007. "Profil Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya Jawa Timur. *Infokop*. Vol. 15, No. 1, Juli 2007.
- Praptomo, Dian. 2000. "Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro (Kasus LKMS BMT KUBE Sejahtera Unit 20 Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta)".
- Putri, Sheila Santika. 2012. "Kajian terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah KBMT Wihdatul Ummah". *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, dkk. Jakarta: Robbani Press
- Rahayu, Sri Yayuk. 2009. "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang. *Iqtishoduna*. Vol. V, No. 2, 2009. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Rivai, Veithzal., Rifki Ismail. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robinson, S. Marguerite. 2004. *Revolusi Keuangan Mikro: Volume 2 Pelajaran dari Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Roesdiono, Eddy. 1998. *Tanggung Renteng: Sebuah Biografi Mursia Zaafril Ilyas*. Surabaya: Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Selamet dan Hoscaro. 2008. "Manajemen Risiko Bank Syariah" dalam http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen_risiko_bank_syariah.html diakses pada Kamis, 2 Januari 2014, pukul 16:10 WIB.
- Siegel, G. Joel., Jae K. Shim. 1999. *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sotrisno, Noer. "Lembaga Keuangan Mikro: Energi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat". Dalam <http://lkm.indonesia.blogspot.com/index.php/Artikel/lembaga-keuangan-mikro.html> diakses pada Jum'at 29 Nopember 2013, pukul 18.30 WIB
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Edisi 18)*. Bandung: Alfabeta
- Suharni. 2003. "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. I, No. 1, Oktober 2013.
- Suryomurti, Wiku. "Konsep Risiko Dalam Islam" dalam <http://wikusuryomurti.com/konsep-risiko-dalam-islam/> diakses pada Senin, 25 Nopember 2013, pukul 12:12 WIB
- Susila, Ihwan. 2005. "Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro". *Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8, No. 2. 2008.
- Soeratno dan Licolin Arsyad. 2003. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Soemantri, Andriani S. 2003. *Tanggung Renteng: Setia Bhakti Wanita*. Surabaya: Limpad
- Setiawan, Dharma. 2007. "Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Ekspor Indonesia".
- Swasono, Sri Edi. 1998. *Tanggung Renteng Dan Kemandirian Rakyat*. Surabaya: Koperasi Setia Bhakti Wanita.
- Syafe'i, Rahmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Tobing, Denico Doly Lumban. 2009. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Cabang Semarang" *Tesis*. Magister Kenotariatan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Uma, Sekaran. 2009. *Research Methods for Business (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, Husaini dan Purwono Setiadi Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Perkasa.
- Usman., dkk. 2004. *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Warde, Ibrahim. 2000. *Islamic Finance in the Global Economy*, alih bahasa Andriyadi Ramli. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Yuli Afriyandi
Tempat, tanggal lahir : Indragiri Hilir, 27 Juli 1986
Agama : Islam
Alamat : Pundong 1, Tirtoadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta
Nomor Kontak : 085228489956 / 085878888840 (WA) Pin BB 512FD727
e-mail : afriyandiyuli@gmail.com website: www.yuliafriyandi.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD, SLTP, Indragiri Hilir, Riau
- MA. Khairul Bariyyah, Bekasi – Jawa Barat
- S1 Keuangan Syariah, UIN Yogyakarta, lulus Tahun 2010
- S2 Ekonomi Syariah, UIN Yogyakarta, lulus Tahun 2014
- *Training Of Facilitator Community Based Enterprise Development (C-BED)*, Tahun 2015. Penyelenggara: *International Labour Organization (ILO)* & Asosiasi Business Development Services Indonesia
- *Training Of Trainer Implementasi SNI ISO 9001:2008*, Tahun 2015. Penyelenggara: Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNi)
- Sertifikasi Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Kemenkop dan UKM RI, Tahun 2014. Penyelenggara Kemenkop dan UKM RI
- Sertifikasi **Konsultan Tingkat Lanjut** Lembaga Pelayanan Bisnis (LPB) / *Business Development Services – Provider (BDS-P)*, Tahun 2014. Penyelenggara Kemenkop dan UKM RI
- Sertifikasi **Konsultan Tingkat Pertama** Lembaga Pelayanan Bisnis (LPB) / *Business Development Services – Provider (BDS-P)*, Tahun 2013. Penyelenggara Kemenkop dan UKM RI
- *Training Of Trainer* Pemandu Koperasi Lapenkop – Dekopin Wilayah DIY, Tahun 2011. Penyelenggara Dekopin Wil. DIY
- *Training Of Trainer* Konsultan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelompok Usaha Bersama, Tahun 2010. Penyelenggara Kementerian Sosial RI

RIWAYAT ORGANISASI :

- Forum Studi Ekonomi Islam UIN Yogyakarta 2005 – 2007
- Anggota Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Bidang Peningkatan Kompetensi Konsultan Pendamping Periode 2015 - 2019
- Anggota Asosiasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) DIY

RIWAYAT PEKERJAAN :

- PT Bumi Mandiri Tridaya, Tahun 2010 – 2013. Sebagai Microfinance Consultant untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama (LKM-KUBE) di Kecamatan Wilayah D.I Yogyakarta
- PT Pinbukindo, Tahun 2012. Sebagai Fasilitator Lapangan untuk penguatan Lembaga Keuangan Mikro – Agribisnis (LKM-A) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
- *Business Development Services – Provider* (BDS-P) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) D.I Yogyakarta, Tahun 2010 – 2014. Sebagai Konsultan Koperasi dan UKM
- UIN Yogyakarta, Tahun 2013. Sebagai Instruktur Laboratorium Micro Banking.
- Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) D.I Yogyakarta, Tahun 2014 – sekarang. Sebagai Koordinator Konsultan Bisnis Koperasi dan UKM.
- Coca-Cola Foundation Indonesia Program Perpuseru, Tahun 2014 – Maret 2015. Sebagai Program Officer Area DIY – Jateng.
- Dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Muhsin Yogyakarta 2014 – Sekarang untuk mata kuliah :
 - Akuntansi
 - Manajemen Keuangan
- PT Citra Wahana Konsultan, Tahun 2014 – sekarang. Sebagai Tenaga Ahli dalam Pendampingan Pengelola Lembaga IPOG di 4 KTM Wil Kalimantan dan Sumatera.

KARYA BUKU, ARTIKEL SURAT KABAR

- Buku: "Menuju Ekonomi Berkeadilan", Maret 2015. Penerbit Trust Media, Yogyakarta. ISBN: 978-602-0992-01-3
- Kontributor dalam penulisan buku: "Cinta Indonesia Setengah", September 2013. Penerbit PT. Bentang Pustaka, Yogyakarta. ISBN: 978-602-7888-64-7
- Jurnal: "Problematisa Risk and Return dalam Perbankan Syariah", Jurnal As-Salam Vol IV, No.2, Th 2013. ISSN: 2089-6638
- Jurnal: "Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam", Jurnal Rasail Vol 1, No. 2, Th 2014. ISSN: 2355-2565
- Artikel Opini:
 - Koran Bisnis Indonesia: (*Polemik Ekonomi Tahu Tempe*, 2012. *Koperasi; Agen Penyalur Prodk Perbankan*, 2013. *Dilema PPh UMKM*, 2013. *APEC dan Agenda Kontra Liberalisasi Pasar*, 2013. *Penerapan FTV Perbankan Syariah tak Perlu Khawatir*, 2013)
 - Jurnal Nasional: (*Pajak, Zakat dan Hikmah Puasa*, 2012. *Menggugat Agenda Liberalisasi Pasar*, 2012)
 - Republika: (*Bapak Koperasi Syariah*, 2014. *Pangan Kita Belum Merdeka*, 2014)
 - Suara Karya: (*Masalah Ekonomi Desa*, 2012. *Menyoal Capaian MDGs Indonesia*, 2013. *Pasar Bebas, MEA dan Nasionalisme*, 2013. *Pancasila Seutuhnya*, 2015).

- o Koran Jakarta: (*Cita-cita Demokrasi Ekonomi, 2012. Gejolak Ekonomi tahu-tempe, 2013*). Dll.

INSTRUKTUR / PEMATERI / NARASUMBER

Pada program pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya untuk beberapa instansi pemerintah, lembaga swasta, kampus dll, sejak 2010 – sekarang.

No	Tema Workshop/Pelatihan/Bimtek	Penyelenggara	Peserta
1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Lembaga Keuangan Mikro-KUBE di Kecamatan Wil. DIY	Dinas Sosial D.I Yogyakarta	Manajer dan Staff Pengelola LKM-KUBE
2	Bimtek Implementasi Integrated micro-Banking System bagi Koperasi dan BMT se-DIY	Disperindagkop dan UKM DIY	Pengurus/Pengelola Koperasi dan BMT se-DIY
3	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi UMKM Binaan Disperindagkop dan UKM DIY	Disperindagkop dan UKM DIY	Pelaku UMKM
4	Pelatihan Kewirausahaan pada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Kota Yogyakarta	Disperindagkop Kota Yogyakarta	Anggota Kelompok Usaha
5	Pelatihan Kewirausahaan bagi PKL di 14 Kecamatan Kota Yogyakarta	Disperindagkop Kota Yogyakarta	Anggota PKL
6	Pelatihan Manajemen dan Operasional Lembaga Keuangan Mikro KUBE	Dinas Sosial D.I Yogyakarta	Manajer dan Staff Pengelola LKM-KUBE
7	Pelatihan Internet Marketing	Coca-cola Foundation Indonesia	Anggota Perpustakaan di Kab. Sleman, Kab. Sukoharjo, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap, Kab. Wonosobo, Kab. Tabalong
8	Workshop Wirausaha Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)	IWAYO	Anggota IWAYO
9	Workshop Kewirausahaan bagi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan	UAD	Mahasiswa UAD
10	Policy Maker Consultant pada StudentsxCEOs SUMMIT	UGM	Mahasiswa UGM
11	Peluang dan Tantangan Bisnis dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN	Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UGM	Mahasiswa UGM
12	Pelatihan Standar Operasional Prosedur Lembaga Pelayanan Bisnis	Kemenkop dan UKM RI	Konsultan di 23 PLUT-KUMKM di Indonesia
13	Bimtek Akuntansi Sederhana bagi Koperasi dan UMKM	PLUT-KUMKM DIY, Disperindagkop dan UKM DIY	Pelaku Koperasi dan UMKM di DIY
14	Bimtek Analisa Laporan Keuangan Bagi Koperasi se-DIY	PLUT-KUMKM DIY	Manajer Koperasi se DIY
15	Bimtek Analisa Kesehatan Keuangan Usaha bagi Pelaku UMKM	PLUT-KUMKM DIY	Pelaku UMKM se DIY
16	Pelatihan Perencanaan Bisnis	Disperindagkop dan	UMKM di DIY

		UKM DIY	
17	Bimtek Business Model Generation; Bisnis Model Kanvas bagi Start up bisnis	Disperindagkop dan UKM DIY	Pelaku UMKM di DIY
18	Pelatihan Teknik Mentoring	Disperindagkop dan UKM DIY	66 Pendamping Koperasi dan UKM se DIY
19	Training Of Facilitator Community Based Enterprise Development (C-BED)	PLUT-KUMKM DIY & ABDSI Korwil DIY	Ketua dan Sekretaris di 15 Sentra/Kelompok Usaha
DLL			

Demikian daftar riwayat hidup ini kamu buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Agustus 2015

Hormat Kami,

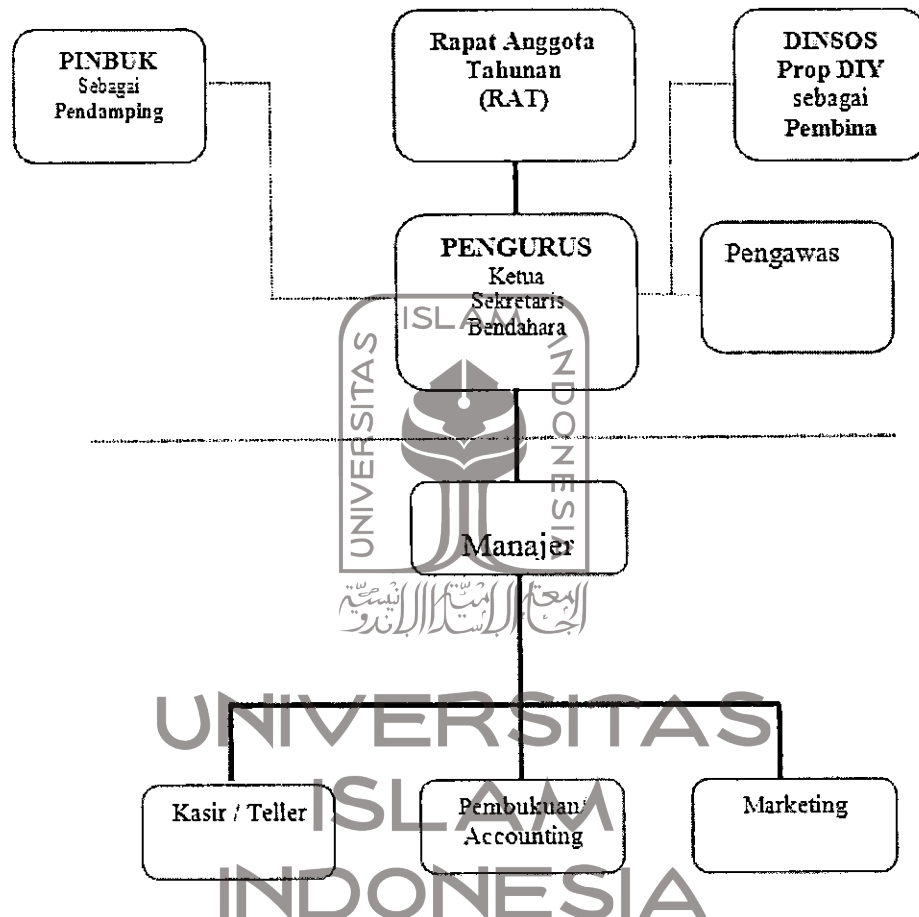

YULI AFRIYANDI



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 1.

Struktur Organisasi LKM KUBE Kota Yogyakarta



1. LKM KUBE Sejahtera 02 Kecamatan Wirobrajan

Susunan kepengurusan LKM-KUBE Sejahtera 02 Wirobrajan periode

2010 – 2014:

a) Pengurus

Ketua : SZ. Sardjana Ramelan

Wakil : Agus Sutopo

Sekretaris 1 : Ono Tri Lestari

Sekretaris 2 : SapariHadiSiswoyo

Bendahara : Suwarniati

b) Pengawas

PengawasSyariah : DediHeriSutendi, ST.

PengawasManajemen1 : MC. Soemedi

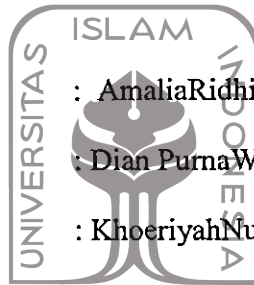
PengawasManajemen 2 : DarsonoSupardi

c) Pengelola

Manager : AmaliaRidhianingrum, S.IP.

Teller : Dian PurnaWanty

Marketing : KhoeriyahNurAeni, S.IP



2. LKM KUBE Sejahtera 131 Kecamatan Danurejan
SusunanKepengurusanPeriodetahun 2010 – 2013 :

a) Pengurus:

Ketua I : Sri Handayani

Ketua II : Siswanto

Ketua III : MarsidahBibitWitono

Sekretaris : HariPurwokoJanuRianto

Bendahara : Y. YuliaWardani

b) Pengawas:

PengawasManajemen:

- Aryanto R
- YanuarAriyanto

- AnantaHariPramono, SE., MM

c) PengawasSyariah:

- DediHeriSutendi, ST.
- RatnaDwiPurwitasari, S.Pd

d) Pengelola:

Manajer : Emma OktavianiAsih, SE.

Teller : YuniEkoSusanti, S.Psi.

Marketing : Muhammad Sarif

3. LKM KUBE Sejahtera Kecamatan Umbulharjo

Susunankepengurusan LKM KUBE Sejahtera KecamatanUmbulharjo:

Pelindung : CamatUmbulharjo

Penasihat : 1. EndahDwiDinyAstuti

2. Maria

Pengurus

Ketua I : Frid Joni

Ketua II : NawadjiHadiSantoso

Ketua III : HendriDwiKurniawan

Sekretaris I : Priyono

Sekretaris II : Rahayuningsih

Bendahara II : BeniBudyWinahyu

Pengelola

Manajer : NiningHearawati ,SE

Kasir : Dian Prameswari, STP

Kabag Keuangan : Deny Ika Sari, SH

Pendamping : Retno Argiyanti (2011-sekarang)

: Wipti Eka Prahadipta (2011-sekarang)

Pengawas : R. Sunarno

: Sunoto M.D



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 2. Laporan Keuangan



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS

Per Tanggal :31 Desember 2010

P01 -- Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	13	7.996.000,00	100,00
Kurang Lancar	0	0,00	0,00
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	13	7.996.000,00	100 %
NPF (Non Performing Financing)	0	0,00	0

NPF = 0,00 %

P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	19	16.921.300,00	52,08
Kurang Lancar	4	4.838.150,00	14,89
Diragukan	2	5.377.000,00	16,55
Macet	8	5.354.750,00	16,48
Jumlah	33	32.491.200,00	100 %
NPF (Non Performing Financing)	14	15.569.900,00	47,92

NPF = 47,92 %

P03 -- Piutang Salam KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	0	0,00	0,00
Kurang Lancar	0	0,00	0,00
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	0	0,00	0 %
NPF (Non Performing Financing)	0	0,00	0

NPF = 0,00 %

Yogyakarta, 31 Desember 2010

Amalia Ridhianingrum, S.IP.

LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS

Per Tanggal :31 Desember 2011

P01 -- Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	50	21.666.000,00	100,00
Kurang Lancar	0	0,00	0,00
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	50	21.666.000,00	100 %
NPF (Non Performing Financing)	0	0,00	0

NPF = 0,00 %

P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	49	78.350.200,00	87,14
Kurang Lancar	3	5.675.300,00	6,31
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	9	5.891.250,00	6,55
Jumlah	61	89.916.750,00	100 %
NPF (Non Performing Financing)	12	11.566.550,00	12,86

NPF = 12,86 %

P03 -- Piutang Salam KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	0	0,00	0,00
Kurang Lancar	0	0,00	0,00
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	0	0,00	0 %
NPF (Non Performing Financing)	0	0,00	0

NPF = 0,00 %

Yogyakarta, 31 Desember 2011

Amalia Ridhianingrum, S.IP.

LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS

Per Tanggal :31 Desember 2012

P01 -- Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	47	27.765.000,00	100%
Kurang Lancar	0	0,00	0,00%
Diragukan	0	0,00	0,00%
Macet	0	0,00	0,00%
Jumlah	47	27.765.000,00	100 %
NPF (Non Performing Financing)	0	0,00	0,00%

NPF = 0,00 %

P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	48	82.838.100,00	68,35%
Kurang Lancar	6	14.183.500,00	11,70%
Diragukan	5	11.299.000,00	9,32%
Macet	13	12.869.250,00	10,62%
Jumlah	72	121.189.850,00	100 %
NPF (Non Performing Financing)	24	38.351.750,00	31,64%

NPF = 31,65 %

P03 -- Piutang Salam KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	0	0,00	0,00%
Kurang Lancar	0	0,00	0,00%
Diragukan	0	0,00	0,00%
Macet	0	0,00	0,00%
Jumlah	0	0,00	0 %
NPF (Non Performing Financing)	0	0,00	0

NPF = 0,00 %

Yogyakarta, 31 Desember 2012

Amalia Ridhianingrum, S.IP.

LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS

Per Tanggal :30 Nopember 2013

P01 -- Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	52	46.698.500,00	100,00
Kurang Lancar	0	0,00	0,00
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	52	46.698.500,00	100 %
NPF (Non Performing Financing)	0	0,00	0

NPF = 0,00 %

P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	44	84.247.100,00	54,51
Kurang Lancar	6	22.651.500,00	14,66
Diragukan	6	10.146.500,00	6,56
Macet	24	37.516.750,00	24,27
Jumlah	80	154.561.850,00	100 %
NPF (Non Performing Financing)	36	70.314.750,00	45,49

NPF = 45,49 %

P03 -- Piutang Salam KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	0	0,00	0,00
Kurang Lancar	0	0,00	0,00
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	0	0,00	0 %
NPF (Non Performing Financing)	0	0,00	0

NPF = 0,00 %

Yogyakarta, 30 Nopember 2013

Amalia Ridhianingrum, S.IP.

NERACA **LKM KUBE SEJAHTERA 02**

Jumat, 31 Desember 2010

Neraca: LKM KUBE 02

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	504.810.987,17	KEWAJIBAN	238.363.668,01
Aktiva Lancar	468.143.537,17	Kewajiban Segera	1.260.400,00
Kas	57.078.854,17	Titipan Dana Baitul Maal	1.260.400,00
Kas Umum	57.078.854,17	Titipan Infak	1.260.400,00
Simpanan di Bank	251.173.283,00	Simpanan Wadi'ah	214.556.471,75
Simpanan BPD	251.173.283,00	Simpanan Sejahtera	214.556.471,75
Piutang	95.485.900,00	Investasi Tidak Terikat	18.582.749,42
Piutang Murabahah	74.739.596,96	Simpanan Mudharabah	18.582.749,42
Piutang Murabahah KUBE	31.368.750,00	Simpanan Qurban/ Aqiqah	749,42
Piutang Murabahah Non KUBE	43.370.846,96	Simpanan Wajib Pembiayaan	18.582.000,00
Pend. Marjin MBA yg	(34.252.396,96)	Rupa-Rupa Passiva	3.964.046,84
MBA ditanggguhkan KUBE	(26.372.750,00)	Dana-Dana SHU	1.046.546,84
MBA ditanggguhkan Non KUBE	(7.879.646,96)	Dana SHU dibagi (deviden)	66.546,84
Piutang Ar Rahn (Gadai)	54.998.700,00	Dana Pendidikan	350.000,00
Piutang Ar Rahn Non KUBE	54.998.700,00	Dana Sosial	310.000,00
Pembiayaan	62.000.000,00	Dana Jasa Lain	320.000,00
Pembiayaan Hiwalah	62.000.000,00	Titipan - Titipan	2.917.500,00
Pembiayaan Hiwalah Non KUBE	62.000.000,00	Titipan Cadangan Resiko (CR)	1.121.000,00
Perlengkapan	2.405.500,00	Titipan Pemupukan Modal	1.200.000,00
ATK	2.037.500,00	Titipan Ta'awun (tolong-menolong)	596.500,00
Materai	368.000,00	MODAL	266.447.319,16
Aktiva Tetap dan Inventaris	27.282.250,00	Modal Sendiri	19.363.200,00
Nilai Perolehan	35.863.025,00	Simpanan Pokok	2.975.000,00
Komputer	9.000.000,00	Simpanan Wajib	3.663.000,00
Printer	1.700.000,00	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	12.350.000,00
Cash Box / Brankas	5.750.000,00	Simpanan Wajib Khusus	25.200,00
Papan Nama	2.000.000,00	Simpanan Khusus	350.000,00
Peralatan Kantor	8.455.000,00	Modal Penyertaan	177.500.000,00
Backdroff & Pintu	4.000.000,00	Penyertaan KUBE	177.500.000,00
Inventaris Lainnya	4.958.025,00	Modal Hibah/ Donasi	50.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(8.580.775,00)	Modal Hibah	50.000.000,00
Akum peny. Komputer -/-	(2.704.000,00)	SHU	19.584.119,16
Akum peny. Printer -/-	(905.775,00)	SHU Tahun Berjalan	19.584.119,16
Akum peny. Mebeler -/-	(2.077.800,00)		
Akum peny. Cash Box -/-	(812.800,00)		
Akum peny. Papan nama -/-	(1.098.000,00)		
Akum peny. Backdroff -/-	(982.400,00)		
Rupa - Rupa Aktiva	9.385.200,00		
Biaya Pra Operasi	8.585.200,00		
IT Software	10.000.000,00		
Amortisasi Pra Operasi -/-	(1.414.800,00)		
Sewa Gedung	11.394.600,00		
Penyusutan sewa gedung -/-	(11.394.600,00)		
Lain-lain	800.000,00		

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
TOTAL AKTIVA	504.810.987,17	TOTAL PASSIVA	504.810.987,17

Yogyakarta, 05 Desember 2013

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
		Amalia Ridhianingrum, S.IP.

Dicetak tanggal 05/12/2013 11:39:14



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

N E R A C A

LKM KUBE SEJAHTERA 02

Sabtu, 31 Desember 2011

Neraca: LKM KUBE 02

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	536.601.498,01	KEWAJIBAN	273.520.328,16
Aktiva Lancar	509.929.098,01	Kewajiban Segera	1.945.500,00
Kas	72.225.816,01	Titipan Dana Baitul Maal	1.945.500,00
Kas Umum	72.225.816,01	Titipan Infak	1.945.500,00
Simpanan di Bank	236.671.932,00	Simpanan Wadi'ah	236.928.162,82
Simpanan BPD	236.671.932,00	Simpanan Sejahtera	236.928.162,82
Piutang	140.925.850,00	Investasi Tidak Terikat	23.847.382,14
Piutang Murabahah	169.232.746,96	Simpanan Mudharabah	23.847.382,14
Piutang Murabahah KUBE	47.511.250,00	Simpanan Idul Fitri	703.882,14
Piutang Murabahah Non KUBE	121.721.496,96	Simpanan Wajib Pembiayaan	23.143.500,00
Pend. Marjin MBA yg	(57.649.996,96)	Rupa-Rupa Passiva	10.799.283,20
MBA ditanggguhkan KUBE	(28.845.250,00)	Dana-Dana SHU	2.930.783,20
MBA ditanggguhkan Non KUBE	(28.804.746,96)	Dana SHU dibagi (deviden)	120.783,20
Piutang Ar Rahn (Gadai)	29.343.100,00	Dana Pendidikan	1.250.000,00
Piutang Ar Rahn Non KUBE	29.343.100,00	Dana Sosial	520.000,00
Pembiayaan	57.680.000,00	Dana Jasa Lain	1.040.000,00
Pembiayaan Hiwalah	57.680.000,00	Titipan - Titipan	7.868.500,00
Pembiayaan Hiwalah Non KUBE	57.680.000,00	Titipan Cadangan Resiko (CR)	1.586.000,00
Perlengkapan	2.425.500,00	Titipan Pemupukan Modal	3.500.000,00
ATK	2.037.500,00	Titipan Ta'awun (tolong-menolong)	2.782.500,00
Materai	388.000,00	MODAL	263.081.169,85
Aktiva Tetap dan Inventaris	21.362.200,00	Modal Sendiri	21.033.700,00
Nilai Perolehan	35.863.025,00	Simpanan Pokok	4.917.000,00
Komputer	9.000.000,00	Simpanan Wajib	6.024.000,00
Printer	1.700.000,00	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	9.250.000,00
Cash Box / Brankas	5.750.000,00	Simpanan Wajib Khusus	22.700,00
Papan Nama	2.000.000,00	Simpanan Khusus	820.000,00
Peralatan Kantor	8.455.000,00	Modal Penyertaan	177.500.000,00
Backdroof & Pintu	4.000.000,00	Penyertaan KUBE	177.500.000,00
Inventaris Lainnya	4.958.025,00	Modal Hibah/ Donasi	50.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(14.500.825,00)	Modal Hibah	50.000.000,00
Akum peny. Komputer -/-	(5.566.750,00)	SHU	14.547.469,85
Akum peny. Printer -/-	(1.661.775,00)	SHU Tahun Berjalan	14.547.469,85
Akum peny. Mebeler -/-	(2.077.800,00)		
Akum peny. Cash Box -/-	(1.531.600,00)		
Akum peny. Papan nama -/-	(1.990.800,00)		
Akum peny. Backdroff -/-	(1.672.100,00)		
Rupa - Rupa Aktiva	5.310.200,00		
Biaya Pra Operasi	7.012.200,00		
IT Software	10.000.000,00		
Amortisasi Pra Operasi -/-	(2.987.800,00)		
Biaya dibayar dimuka (BDD)	(2.502.000,00)		
Sewa Gedung	(2.502.000,00)		
Sewa Gedung	11.394.600,00		
Penyusutan sewa gedung -/-	(13.896.600,00)		
Lain-lain	800.000,00		

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
TOTAL AKTIVA	536.601.498,01	TOTAL PASSIVA	536.601.498,01

Yogyakarta, 05 Desember 2013

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
		Amalia Ridhianingrum, S.IP.

Dicetak tanggal 05/12/2013 11:38:14



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

NERACA **LKM KUBE SEJAHTERA 02**

Senin, 31 Desember 2012

Neraca: LKM KUBE 02

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	557.730.744,38	KEWAJIBAN	294.592.801,09
Aktiva Lancar	536.865.944,38	Kewajiban Segera	3.011.700,00
Kas	41.304.346,38	Titipan Dana Baitul Maal	3.011.700,00
Kas Umum	41.304.346,38	Titipan Infak	3.011.700,00
Simpanan di Bank	267.036.248,00	Simpanan Wadi'ah	249.690.924,02
Simpanan BPD	267.036.248,00	Simpanan Sejahtera	249.690.924,02
Piutang	161.532.350,00	Investasi Tidak Terikat	27.470.325,70
Piutang Murabahah	223.764.146,96	Simpanan Mudharabah	27.470.325,70
Piutang Murabahah KUBE	53.520.250,00	Simpanan Pendidikan	50.363,26
Piutang Murabahah Non KUBE	170.243.896,96	Simpanan Idul Fitri	1.626.365,73
Pend. Marjin MBA yg ditanggungkan	(74.839.296,96)	Simpanan Qurban/ Aqiqah	50.096,71
MBA ditanggungkan KUBE	(29.735.250,00)	Simpanan Wajib Pembiayaan	25.743.500,00
MBA ditanggungkan Non KUBE	(45.104.046,96)	Rupa-Rupa Passiva	14.419.851,37
Piutang Ar Rahn (Gadai)	12.607.500,00	Dana-Dana SHU	644.351,37
Piutang Ar Rahn Non KUBE	12.607.500,00	Dana SHU dibagi (deviden)	121.351,37
Pembiayaan	64.480.000,00	Dana Sosial	370.000,00
Pembiayaan Hiwalah	64.480.000,00	Dana Jasa Lain	153.000,00
Pembiayaan Hiwalah Non KUBE	64.480.000,00	Titipan - Titipan	13.775.500,00
Perlengkapan	2.513.000,00	Titipan Cadangan Resiko (CR)	3.536.000,00
ATK	2.037.500,00	Titipan Pemupukan Modal	5.450.000,00
Materai	475.500,00	Titipan Ta'awun (tolong-menolong)	4.789.500,00
Aktiva Tetap dan Inventaris	14.911.600,00	MODAL	263.137.943,29
Nilai Perolehan	35.863.025,00	Modal Sendiri	23.300.700,00
Komputer	9.000.000,00	Simpanan Pokok	4.627.000,00
Printer	1.700.000,00	Simpanan Wajib	8.119.000,00
Cash Box / Brankas	5.750.000,00	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	9.150.000,00
Papan Nama	2.000.000,00	Simpanan Wajib Khusus	14.700,00
Peralatan Kantor	8.455.000,00	Simpanan Khusus	1.390.000,00
Backdroff & Pintu	4.000.000,00	Modal Penyertaan	177.500.000,00
Inventaris Lainnya	4.958.025,00	Penyertaan KUBE	177.500.000,00
Akumulasi Penyusutan	(20.951.425,00)	Modal Hibah/ Donasi	50.000.000,00
Akum peny. Komputer -/-	(8.689.750,00)	Modal Hibah	50.000.000,00
Akum peny. Printer -/-	(1.661.775,00)	SHU	12.337.243,29
Akum peny. Mebeler -/-	(3.934.200,00)	SHU Tahun Lalu	12.337.243,29
Akum peny. Cash Box -/-	(2.250.400,00)		
Akum peny. Papan nama -/-	(1.990.800,00)		
Akum peny. Backdroff -/-	(2.424.500,00)		
Rupa - Rupa Aktiva	5.953.200,00		
Biaya Pra Operasi	5.153.200,00		
IT Software	10.000.000,00		
Amortisasi Pra Operasi -/-	(4.846.800,00)		
Sewa Gedung	11.394.600,00		
Penyusutan sewa gedung -/-	(11.394.600,00)		
Lain-lain	800.000,00		

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
TOTAL AKTIVA	557.730.744,38	TOTAL PASSIVA	557.730.744,38

Yogyakarta, 05 Desember 2013

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
		Amalia Ridhianingrum, S.IP.

Dicetak tanggal 05/12/2013 11:37:31



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

N E R A C A

LKM KUBE SEJAHTERA 02

Sabtu, 30 Nopember 2013

Neraca: LKM KUBE 02

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	545.785.051,09	KEWAJIBAN	277.533.814,67
Aktiva Lancar	532.970.601,09	Kewajiban Segera	2.297.100,00
Kas	98.881.968,09	Titipan Dana Baitul Maal	2.297.100,00
Kas Umum	98.881.968,09	Titipan Infak	2.297.100,00
Simpanan di Bank	152.071.283,00	Simpanan Wadi'ah	220.514.150,19
Simpanan BPD	152.071.283,00	Simpanan Sejahtera	220.514.150,19
Piutang	205.638.350,00	Investasi Tidak Terikat	33.854.013,88
Piutang Murabahah	290.131.746,96	Simpanan Mudharabah	33.854.013,88
Piutang Murabahah KUBE	73.899.750,00	Simpanan Pendidikan	453.139,57
Piutang Murabahah Non KUBE	216.231.996,96	Simpanan Idul Fitri	1.651.739,03
Pend. Marjin MBA yg	(88.921.396,96)	Simpanan Qurban/ Aqiqah	101.635,28
MBA ditanggguhkan KUBE	(31.201.250,00)	Simpanan Wajib Pembiayaan	31.647.500,00
MBA ditanggguhkan Non KUBE	(57.720.146,96)	Rupa-Rupa Passiva	20.868.550,60
Piutang Ar Rahn (Gadai)	4.428.000,00	Dana-Dana SHU	2.061.050,60
Piutang Ar Rahn Non KUBE	4.428.000,00	Dana SHU dibagi (deviden)	138.050,60
Pembiayaan	73.980.000,00	Dana Pendidikan	500.000,00
Pembiayaan Hiwalah	73.980.000,00	Dana Sosial	870.000,00
Pembiayaan Hiwalah Non KUBE	73.980.000,00	Dana Jasa Lain	553.000,00
Perlengkapan	2.399.000,00	Titipan - Titipan	18.807.500,00
ATK	2.037.500,00	Titipan Cadangan Resiko (CR)	5.036.000,00
Materai	361.500,00	Titipan Pemupukan Modal	6.950.000,00
Aktiva Tetap dan Inventaris	11.041.250,00	Titipan Ta'awun (tolong-menolong)	6.821.500,00
Nilai Perolehan	35.863.025,00	MODAL	268.251.236,42
Komputer	9.000.000,00	Modal Sendiri	25.488.700,00
Printer	1.700.000,00	Simpanan Pokok	4.647.000,00
Cash Box / Brankas	5.750.000,00	Simpanan Wajib	9.917.000,00
Papan Nama	2.000.000,00	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	9.100.000,00
Peralatan Kantor	8.455.000,00	Simpanan Wajib Khusus	14.700,00
Backdroof & Pintu	4.000.000,00	Simpanan Khusus	1.810.000,00
Inventaris Lainnya	4.958.025,00	Modal Penyertaan	177.500.000,00
Akumulasi Penyusutan	(24.821.775,00)	Penyertaan KUBE	177.500.000,00
Akum peny. Komputer -/-	(8.950.000,00)	Modal Hibah/ Donasi	50.000.000,00
Akum peny. Printer -/-	(2.667.175,00)	Modal Hibah	50.000.000,00
Akum peny. Mebeler -/-	(5.127.600,00)	SHU	15.262.536,42
Akum peny. Cash Box -/-	(2.909.300,00)	SHU Tahun Berjalan	15.262.536,42
Akum peny. Papan nama -/-	(1.990.800,00)		
Akum peny. Backdroff -/-	(3.176.900,00)		
Rupa - Rupa Aktiva	1.773.200,00		
Biaya Pra Operasi	3.723.200,00		
IT Software	10.000.000,00		
Amortisasi Pra Operasi -/-	(6.276.800,00)		
Biaya dibayar dimuka (BDD)	(2.750.000,00)		
Sewa Gedung	(2.750.000,00)		
Sewa Gedung	11.394.600,00		
Penyusutan sewa gedung -/-	(14.144.600,00)		
Lain-lain	800.000,00		

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
TOTAL AKTIVA	545.785.051,09	TOTAL PASSIVA	545.785.051,09

Yogyakarta, 05 Desember 2013

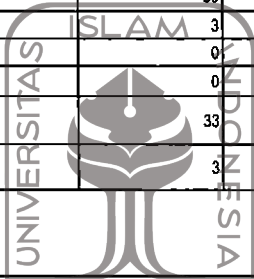
Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
		Amalia Ridhianingrum, S.IP.

Dicetak tanggal 05/12/2013 11:36:28



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera 131 Kec. Danurejan			
LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS			
Per Tanggal :31 Desember 2011			
P01 -- Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	234	295.055.628,00	97,11
Kurang Lancar	4	6.624.992,00	2,18
Diragukan	2	2.166.663,00	0,71
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	240	303.847.283,00	100%
NPL (Non Performing Finance)	6	8.791.655,00	2,89
NPL = 2,89 %			
P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	30	59.763.884,00	89,85
Kurang Lancar	3	6.749.999,00	10,15
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	33	66.513.883,00	100%
NPL (Non Performing Finance)	3	6.749.999,00	10,15
NPL = 10,15 %			

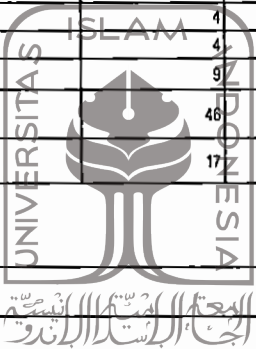


الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera 131			
Kecamatan Danurejan Yogyakarta			
LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS			
Per Tanggal :31 Desember 2012			
P01 -- Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	181	257.127.691,00	74,55
Kurang Lancar	0	0,00	0,00
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	23	16.458.365,00	4,77
Jumlah	247	273.586.365,00	100%
NPF (Non Performing Finance)	23	16.458.365,00	4,77
NPL = 4,77 %			
P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	24	30.259.735,00	67,73
Kurang Lancar	1	1.333.330,00	2,98
Diragukan	1	1.999.998,00	4,48
Macet	6	11.083.332,00	24,81
Jumlah	32	44.676.395,00	100%
NPF (Non Performing Finance)	8	14.416.660,00	32,27
NPL = 32,27 %			

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera 131 Kec. Danurejan			
LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS			
Per Tanggal :30 Nopember 2013			
P01 -- Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	104	194.030.497,00	53,93
Kurang Lancar	24	32.480.544,00	9,03
Diragukan	18	27.083.334,00	7,53
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	222	253.594.375,00	100%
NPL (Non Performing Finance)	42	59.563.878,00	16,56
NPL = 16,56 %			
P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	29	46.295.120,00	58,39
Kurang Lancar	4	9.694.447,00	12,23
Diragukan	4	10.041.672,00	12,67
Macet	9	13.249.990,00	16,71
Jumlah	46	79.281.229,00	100%
NPL (Non Performing Finance)	17	32.986.109,00	41,61
NPL = 41,61 %			



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

NERACA **LKM KUBE SEJAHTERA 131 DANUREJAN**

Jumat, 31 Desember 2010

Neraca: **UNIT DANUREJAN**

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	78.604.000,00	KEWAJIBAN	33.072.000,00
Aktiva Lancar	43.354.000,00	Simpanan Wadi'ah	3.072.000,00
Kas	4.495.200,00	Simp. Mandiri Sejahtera (TAMARA)	3.072.000,00
Kas Umum	4.495.200,00	Investasi Tidak Terikat	30.000.000,00
Tabungan di Bank	(8.700.000,00)	Simpanan Berjangka (Tajaka)	30.000.000,00
- Tabungan BRI	(8.700.000,00)	Tajaka 6 Bulan	30.000.000,00
Piutang	45.000.000,00	MODAL	45.532.000,00
Piutang Murabahah	52.260.000,00	Modal Sendiri	7.756.000,00
Piutang Murabahah KUBE	52.260.000,00	Simpanan Pokok	1.300.000,00
Marjin MBA ditangguhkan -/-	(7.260.000,00)	Simpanan Wajib	26.000,00
Marjin MBA KUBE ditangguhkan	(7.260.000,00)	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	6.430.000,00
Perlengkapan	2.558.800,00	Modal Hibah/ Donasi	38.000.000,00
ATK	1.800,00	Modal Hibah	38.000.000,00
Barang Cetakan	2.500.000,00	SHU	(224.000,00)
Materai	57.000,00	SHU Tahun Berjalan	(224.000,00)
Aktiva Tetap dan Inventaris	17.250.000,00		
Nilai Perolehan	17.250.000,00		
Komputer	4.500.000,00		
Printer	2.000.000,00		
Mebeller/Counter	9.350.000,00		
Inventaris Lainnya	1.400.000,00		
Rupa - Rupa Aktiva	18.000.000,00		
Biaya Pra Operasi	5.000.000,00		
SOP+SOM	5.000.000,00		
Biaya dibayar dimuka (BDD)	6.000.000,00		
Sewa Kantor/Gedung	6.000.000,00		
Sewa Kantor/Gedung	6.000.000,00		
Software BMT On Line	7.000.000,00		
TOTAL AKTIVA	78.604.000,00	TOTAL PASSIVA	78.604.000,00

Yogyakarta, 31 Desember 2010

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
Emma Oktaviani A, SE	Yulia Wardani	Sri Handayani

LKM KUBE SEJAHTERA 131 DANUREJAN

Danurejan, Yogyakarta

N E R A C A
LKM KUBE SEJAHTERA 131 DANUREJAN

Sabtu, 31 Desember 2011

Neraca: UNIT DANUREJAN

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	441.657.737,00	KEWAJIBAN	159.505.903,46
Aktiva Lancar	393.272.387,00	Kewajiban Segera	402.233,00
Kas	7.284.100,00	Titipan Dana Baitul Maal	402.233,00
Kas Umum	7.284.100,00	Penerimaan ZIS	402.233,00
Tabungan di Bank	10.089.571,00	Simpanan Wadi'ah	70.048.079,67
- Tabungan BRI	10.089.571,00	Simp. Mandiri Sejahtera (TAMARA)	69.394.408,93
Piutang	370.361.166,00	Simpanan Pendidikan (TADIKA)	653.670,74
Piutang Murabahah	461.508.166,00	Investasi Tidak Terikat	87.723.340,79
Piutang Murabahah KUBE	369.522.283,00	Simpanan Mudharabah	1.123.340,79
Piutang Murabahah Non KUBE	91.985.883,00	Simpanan Wisata	1.123.340,79
Marjin MBA ditangguhkan -/-	(91.147.000,00)	Simpanan Berjangka (Tajaka)	86.600.000,00
Marjin MBA KUBE ditangguhkan	(65.675.000,00)	Tajaka 6 Bulan	77.000.000,00
Marjin MBA Non KUBE	(25.472.000,00)	Tajaka 12 Bulan	9.600.000,00
Perlengkapan	5.537.550,00	Rupa-Rupa Passiva	1.332.250,00
ATK	1.007.450,00	Titipan - Titipan	1.332.250,00
Barang Cetakan	3.630.000,00	Titipan Cadangan Resiko (CR)	1.332.250,00
Materai	120.000,00	MODAL	282.151.833,54
Perlengkapan Lainnya	306.100,00	Modal Sendiri	35.165.000,00
Pulsa	474.000,00	Simpanan Pokok	14.100.000,00
Aktiva Tetap dan Inventaris	22.372.650,00	Simpanan Wajib	2.220.000,00
Nilai Perolehan	21.712.150,00	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	18.845.000,00
Komputer	4.425.000,00	Modal Penyertaan	200.000.000,00
Printer	3.716.500,00	Penyertaan KUBE Depsos	200.000.000,00
Mebeler/Counter	9.304.000,00	Modal Hibah/ Donasi	38.000.000,00
Inventaris Lainnya	3.034.650,00	Modal Hibah	38.000.000,00
Kamera	950.000,00	SHU	8.986.833,54
Alat Detektor Uang	83.000,00	SHU Tahun Berjalan	8.986.833,54
HP	199.000,00		
Akumulasi Penyusutan	660.500,00		
Akum peny. Komputer -/-	75.000,00		
Akum peny. Printer -/-	33.500,00		
Akum peny. Mebeler -/-	171.000,00		
Akum peny. inventaris lainnya -/-	126.000,00		
Akum peny. Kamera	200.000,00		
Akum peny. Alat Detektor Uang	12.500,00		
Akum peny. HP	42.500,00		
Rupa - Rupa Aktiva	26.012.700,00		
Biaya Pra Operasi	13.012.700,00		
Biaya-biaya Pra Operasi	8.012.700,00		
SOP+SOM	4.916.500,00		
Amortisasi SOP+SOM -/-	83.500,00		
Biaya dibayar dimuka (BDD)	6.000.000,00		
Sewa Kantor/Gedung	6.000.000,00		
Sewa Kantor/Gedung	5.900.000,00		
Amortisasi sewa Kantor/gedung	100.000,00		
-/- Software BMT On Line	6.883.000,00		
Amortisasi Software BMT On Line-/-	117.000,00		

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
TOTAL AKTIVA	441.657.737,00	TOTAL PASSIVA	441.657.737,00

Yogyakarta, 31 Desember 2011

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
Emma Oktaviani A, SE	Yulia Wardani	Sri Handayani

Dicetak tanggal 31/12/2011 10:33:51



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

NERACA **LKM KUBE SEJAHTERA 131 DANUREJAN**

Minggu, 30 Desember 2012

Neraca: UNIT DANUREJAN

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	594.184.554,00	KEWAJIBAN	282.473.384,78
Aktiva Lancar	528.189.654,00	Kewajiban Segera	969.936,00
Kas	52.573.000,00	Titipan Dana Baitul Maal	969.936,00
Kas Umum	52.573.000,00	Penerimaan ZIS	969.936,00
Tabungan di Bank	75.140.765,00	Simpanan Wadi'ah	188.593.982,78
- Tabungan BRI	75.140.765,00	Simp. Mandiri Sejahtera (TAMARA)	187.400.912,37
Piutang	391.054.089,00	Simpanan Pendidikan (TADIKA)	1.193.070,41
Piutang Murabahah	492.051.589,00	Investasi Tidak Terikat	85.023.232,46
Piutang Murabahah KUBE	427.965.194,00	Simpanan Mudharabah	1.023.232,46
Piutang Murabahah Non KUBE	64.086.395,00	Simpanan Wisata	968.638,28
Marjin MBA ditangguhkan -/-	(100.997.500,00)	Simpanan Qurban/ Aqiqah	54.594,18
Marjin MBA KUBE ditangguhkan	(83.837.500,00)	Simpanan Berjangka (Tajaka)	84.000.000,00
Marjin MBA Non KUBE	(17.160.000,00)	Tajaka 6 Bulan	22.000.000,00
Persediaan	403.400,00	Tajaka 12 Bulan	62.000.000,00
Persediaan Barang	56.000,00	Rupa-Rupa Passiva	7.886.233,54
Persediaan Barang Lainnya	347.400,00	Cadangan/Dana-Dana SHU	428.437,68
Perlengkapan	9.018.400,00	Dana SHU belum dibagi (deviden)	83,50
ATK	1.807.500,00	Dana Pendidikan	299.012,51
Barang Cetakan	5.045.000,00	Dana Sosial	129.341,67
Materai	150.000,00	Titipan - Titipan	7.457.795,86
Prangko	2.000,00	Titipan Cadangan Resiko (CR)	3.954.841,67
Perlengkapan Lainnya	598.900,00	Titipan Pemupukan Modal	3.502.954,19
Pulsa	1.415.000,00	MODAL	311.711.169,22
Aktiva Tetap dan Inventaris	26.922.200,00	Modal Sendiri	45.632.000,00
Nilai Perolehan	25.389.200,00	Simpanan Pokok	18.350.000,00
Komputer	4.125.000,00	Simpanan Wajib	8.017.000,00
Printer	3.582.500,00	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	19.265.000,00
Mebeller/Counter	9.184.000,00	Modal Penyertaan	200.000.000,00
Inventaris Lainnya	3.612.200,00	Penyertaan KUBE Depsos	200.000.000,00
Kamera	790.000,00	Modal Hibah/ Donasi	38.000.000,00
Alat Detektor Uang	73.000,00	Modal Hibah	38.000.000,00
HP	165.000,00	SHU	28.079.169,22
KIPAS ANGIN	162.500,00	SHU Tahun Berjalan	28.079.169,22
MODEM	170.000,00		
FLASHDISK	55.000,00		
Laptop	3.470.000,00		
Akumulasi Penyusutan	1.533.000,00		
Akum peny. Komputer -/-	375.000,00		
Akum peny. Printer -/-	167.500,00		
Akum peny. Mebeler -/-	300.000,00		
Akum peny. Filing Cabinet -/-	(9.000,00)		
Akum peny. inventaris lainnya -/-	208.000,00		
Akum peny. Kamera	360.000,00		
Akum peny. Alat Detektor Uang	22.500,00		
Akum peny. HP	76.500,00		
Akum peny.kipas angin	32.500,00		
Rupa - Rupa Aktiva	39.072.700,00		
Biaya Pra Operasi	13.072.700,00		

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
Biaya-biaya Pra Operasi	8.038.700,00		
Amortisasi Pra Operasi -/-	34.000,00		
SOP+SOM	4.833.000,00		
Amortisasi SOP+SOM -/-	167.000,00		
Biaya dibayar dimuka (BDD)	19.000.000,00		
Sewa Kantor/Gedung	19.000.000,00		
Sewa Kantor/Gedung	18.600.000,00		
Amortisasi sewa Kantor/gedung	400.000,00		
-/- Software BMT On Line	6.649.000,00		
Amortisasi Software BMT On Line-/-	351.000,00		
TOTAL AKTIVA	594.184.554,00	TOTAL PASSIVA	594.184.554,00

Yogyakarta, 31 Desember 2012

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
Emma Oktaviani A, SE	Yulia Wardani	Sri Handayani

Dicetak tanggal 31/12/2012 10:34:18



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

N E R A C A

LKM KUBE SEJAHTERA 131 DANUREJAN

Sabtu, 30 Nopember 2013

Neraca: UNIT DANUREJAN

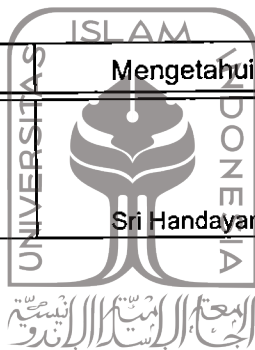
AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	610.752.984,00	KEWAJIBAN	298.492.507,64
Aktiva Lancar	544.629.684,00	Kewajiban Segera	1.774.978,00
Kas	40.994.700,00	Titipan Premi Asuransi	360.000,00
Kas Umum	40.994.700,00	Titipan Dana Baitul Maal	1.414.978,00
Tabungan di Bank	42.586.053,00	Penerimaan ZIS	1.414.978,00
- Tabungan BRI	42.586.053,00	Simpanan Wadi'ah	210.950.246,04
Piutang	446.247.131,00	Simp. Mandiri Sejahtera (TAMARA)	208.375.590,60
Piutang Murabahah	561.620.631,00	Simpanan Pendidikan (TADIKA)	2.574.655,44
Piutang Murabahah KUBE	456.417.319,00	Investasi Tidak Terikat	72.729.856,50
Piutang Murabahah Non KUBE	105.203.312,00	Simpanan Mudharabah	2.629.856,50
Marjin MBA ditangguhkan -/-	(115.373.500,00)	Simpanan Idul Fitri (TADURI)	1.383.969,72
Marjin MBA KUBE ditangguhkan	(88.828.500,00)	Simpanan Wisata	27.743,85
Marjin MBA Non KUBE	(26.545.000,00)	Simpanan Qurban/ Aqiqah	1.218.142,93
Persediaan	938.000,00	Simpanan Berjangka (Tajaka)	70.100.000,00
Persediaan Barang	75.000,00	Tajaka 6 Bulan	24.100.000,00
Persediaan Barang Lainnya	863.000,00	Tajaka 12 Bulan	46.000.000,00
Perlengkapan	13.863.800,00	Rupa-Rupa Passiva	13.037.427,10
ATK	2.246.400,00	Cadangan/Dana-Dana SHU	1.797.533,63
Barang Cetakan	7.805.000,00	Dana SHU belum dibagi (deviden)	74,02
Materai	309.000,00	Dana Pendidikan	684.475,77
Prangko	2.000,00	Dana Sosial	1.112.983,84
Perlengkapan Lainnya	776.400,00	Titipan - Titipan	11.239.893,47
Pulsa	2.725.000,00	Titipan Cadangan Resiko (CR)	4.131.233,84
Aktiva Tetap dan Inventaris	27.050.600,00	Titipan Pemupukan Modal	7.108.659,63
Nilai Perolehan	22.153.100,00	MODAL	312.260.476,36
Komputer	3.216.000,00	Modal Sendiri	49.300.000,00
Printer	2.832.500,00	Simpanan Pokok	19.300.000,00
Mebeller/Counter	9.157.000,00	Simpanan Wajib	10.085.000,00
Inventaris Lainnya	3.449.600,00	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	19.915.000,00
Kamera	310.000,00	Modal Penyertaan	200.000.000,00
Alat Detektor Uang	43.000,00	Penyertaan KUBE Depsos	200.000.000,00
HP	63.000,00	Modal Hibah/ Donasi	38.000.000,00
KIPAS ANGIN	113.000,00	Modal Hibah	38.000.000,00
MODEM	86.000,00	SHU	24.960.476,36
FLASHDISK	55.000,00	SHU Tahun Berjalan	24.960.476,36
Laptop	2.810.000,00		
Mouse	18.000,00		
Akumulasi Penyusutan	4.897.500,00		
Akum peny. Komputer -/-	1.275.000,00		
Akum peny. Printer -/-	917.500,00		
Akum peny. Mebeler -/-	336.000,00		
Akum peny. Filing Cabinet -/-	(9.000,00)		
Akum peny. inventaris lainnya -/-	454.000,00		
Akum peny. Kamera	840.000,00		
Akum peny. Alat Detektor Uang	52.500,00		
Akum peny. HP	178.500,00		
Akum peny.kipas angin	82.000,00		
Akum peny.modem	84.000,00		

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
Akum penyulu.laptop	660.000,00		
Akum penyulu.mouse	27.000,00		
Rupa - Rupa Aktiva	39.072.700,00		
Biaya Pra Operasi	13.072.700,00		
Biaya-biaya Pra Operasi	6.542.700,00		
Amortisasi Pra Operasi -/-	1.530.000,00		
SOP+SOM	(2.515.000,00)		
Amortisasi SOP+SOM -/-	7.515.000,00		
Biaya dibayar dimuka (BDD)	19.000.000,00		
Sewa Kantor/Gedung	19.000.000,00		
Sewa Kantor/Gedung	1.000.000,00		
Amortisasi sewa Kantor/gedung	18.000.000,00		
-/- Software BMT On Line	(1.073.000,00)		
Amortisasi Software BMT On Line -/-	8.073.000,00		
TOTAL AKTIVA	610.752.984,00	TOTAL PASSIVA	610.752.984,00

Yogyakarta, 30 Nopember 2013

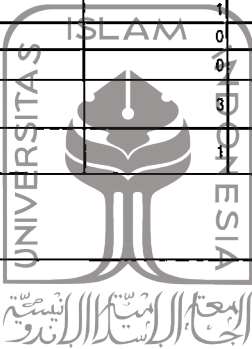
Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
Emma Oktaviani A, SE	Yulia Wardani	Sri Handayani

Dicetak tanggal 30/11/2013 10:33:40



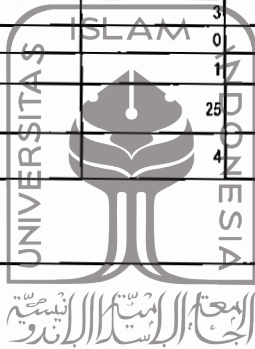
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo			
LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS			
Per Tanggal :31 Desember 2010			
P01 -- Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	3	2.500.000,00	100,00
Kurang Lancar	0	0,00	0,00
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	3	2.500.000,00	100%
NPL (Non Performing Loan)	0	0,00	0
NPL = 0,00 %			
P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	2	3.000.000,00	83,33
Kurang Lancar	1	600.000,00	16,67
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	3	3.600.000,00	100%
NPL (Non Performing Loan)	1	600.000,00	16,67
NPL = 16,67 %			



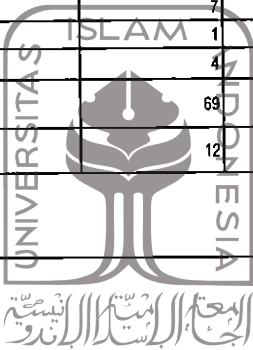
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo			
LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS			
Per Tanggal :31 Desember 2011			
P01 -- Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	15	13.965.000,00	77,99
Kurang Lancar	5	2.540.000,00	14,19
Diragukan	2	1.400.000,00	7,82
Macet	0	0,00	0,00
Jumlah	22	17.905.000,00	100%
NPL (Non Performing Finance)	7	3.940.000,00	22,01
NPL = 22,01 %			
P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	21	29.962.100,00	87,41
Kurang Lancar	3	4.073.300,00	11,88
Diragukan	0	0,00	0,00
Macet	1	241.300,00	0,70
Jumlah	25	34.276.700,00	100%
NPL (Non Performing Finance)	4	4.314.600,00	12,58
NPL = 12,59 %			



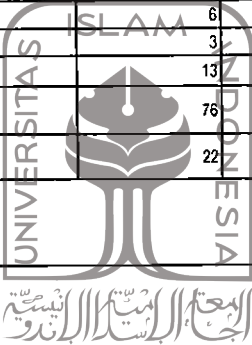
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo			
LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS			
Per Tanggal :31 Desember 2012			
P01 – Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	62	65.757.366,00	80,68
Kurang Lancar	7	11.158.400,00	13,69
Diragukan	1	2.445.000,00	3,00
Macet	4	2.140.000,00	2,63
Jumlah	74	81.500.766,00	100%
NPL (Non Performing Finance)	12	15.743.400,00	19,32
NPL = 19,32 %			
P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	57	159.157.854,00	85,69
Kurang Lancar	7	19.941.100,00	10,72
Diragukan	1	1.727.500,00	0,93
Macet	4	5.123.300,00	2,76
Jumlah	69	185.949.854,00	100%
NPL (Non Performing Finance)	12	26.791.900,00	14,41
NPL = 14,41 %			



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Kec. Umbulharjo			
LAPORAN BREAK DOWN KOLEKTIBILITAS			
Per Tanggal :31 Oktober 2013			
P01 -- Piutang Murabahah KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	31	58.622.102,00	69,40
Kurang Lancar	2	5.986.600,00	7,09
Diragukan	1	1.245.000,00	1,47
Macet	26	18.611.000,00	22,03
Jumlah	60	84.464.702,00	100%
NPL (Non Performing Finance)	29	25.842.600,00	30,59
NPL = 30,60 %			
P02 -- Piutang Murabahah Non KUBE			
Kolektibilitas	Jml Rek	Baki Debet	Persen
Lancar	54	138.126.644,00	75,49
Kurang Lancar	6	12.289.600,00	6,72
Diragukan	3	4.647.266,00	2,54
Macet	13	27.909.400,00	15,25
Jumlah	76	182.972.910,00	100%
NPL (Non Performing Finance)	22	44.846.266,00	24,51
NPL = 24,51 %			



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

NERACA
LKM KUBE SEJAHTERA UMBULHARJO

Jumat, 31 Desember 2010

Neraca: UNIT UMBULHARJO

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	58.257.080,00	KEWAJIBAN	2.821.780,00
Aktiva Lancar	42.809.000,00	Kewajiban Segera	700,00
Kas	7.803.000,00	Titipan Dana Baitul Maal	700,00
Kas Umum	7.803.000,00	Penerimaan ZIS	700,00
Tabungan di Bank	50.000,00	Simpanan Wadi'ah	2.271.000,00
- Tabungan BPD	50.000,00	Simp. Mandiri Sejahtera (TAMARA)	2.271.000,00
Simpanan di LKM Lain	26.000.000,00	Investasi Tidak Terikat	550.000,00
Simpanan di Puskopsyah DIY	26.000.000,00	Simpanan Mudharabah	550.000,00
Piutang	6.100.000,00	Simpanan Wajib Pembiyaan	550.000,00
Piutang Murabahah	7.402.000,00	Rupa-Rupa Passiva	80,00
Piutang Murabahah KUBE	2.830.000,00	Cadangan/Dana-Dana SHU	80,00
Piutang Murabahah Non KUBE	4.572.000,00	Dana Sosial	80,00
Margin MBA ditangguhkan -/-	(1.302.000,00)	MODAL	55.435.300,00
Margin MBA KUBE ditangguhkan	(330.000,00)	Modal Sendiri	33.464.000,00
Margin MBA Non KUBE	(972.000,00)	Simpanan Pokok	7.305.000,00
Penangkapan	2.856.000,00	Simpanan Wajib	204.000,00
Barang Cetakan	2.700.000,00	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	25.955.000,00
Materai	156.000,00	Modal Hibah/ Donasi	25.000.000,00
Aktiva Tetap dan Inventaris	6.868.080,00	Modal Hibah	25.000.000,00
Nilai Perolehan	6.868.080,00	SHU	(3.028.700,00)
Komputer	3.300.000,00	SHU Tahun Berjalan	(3.028.700,00)
Printer	1.700.000,00		
Mebeller/Counter	713.900,00		
Filing Cabinet	137.390,00		
Pesawat Telepon/ Fax	500.000,00		
Inventaris Lainnya	516.790,00		
Rupa - Rupa Aktiva	8.580.000,00		
Biaya dibayar dimuka (BDD)	580.000,00		
Kas Bon	580.000,00		
Software BMT On Line	8.000.000,00		
TOTAL AKTIVA	58.257.080,00	TOTAL PASSIVA	58.257.080,00

Yogyakarta, 31 Desember 2010

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui

N E R A C A
LKM KUBE SEJAHTERA UMBULHARJO

Sabtu, 31 Desember 2011

Neraca: UNIT UMBULHARJO

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	95.379.180,00	KEWAJIBAN	25.115.212,43
Aktiva Lancar	79.708.900,00	Kewajiban Segera	92.900,00
Kas	16.334.000,00	Titipan Dana Baitul Maal	92.900,00
Kas Umum	16.334.000,00	Penerimaan ZIS	92.900,00
Tabungan di Bank	50.000,00	Simpanan Wadi'ah	21.197.232,43
- Tabungan BPD	50.000,00	Simp. Mandiri Sejahtera (TAMARA)	21.197.232,43
Simpanan di LKM Lain	8.500.000,00	Investasi Tidak Terikat	3.825.000,00
Simpanan di Puskopsyah DIY	8.500.000,00	Simpanan Mudharabah	3.825.000,00
Piutang	52.181.700,00	Simpanan Wajib Pembiyaan	3.825.000,00
Piutang Murabahah	64.477.200,00	Rupa-Rupa Passiva	80,00
Piutang Murabahah KUBE	20.130.000,00	Cadangan/Dana-Dana SHU	80,00
Piutang Murabahah Non KUBE	44.347.200,00	Dana Sosial	80,00
Marjin MBA ditanggguhkan -/-	(12.295.500,00)	MODAL	70.263.967,57
Marjin MBA KUBE ditanggguhkan	(2.225.000,00)	Modal Sendiri	41.620.000,00
Marjin MBA Non KUBE	(10.070.500,00)	Simpanan Pokok	9.810.000,00
ditanggguhkan		Simpanan Wajib	1.060.000,00
Perengkapan	2.643.200,00	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	30.750.000,00
ATK	17.200,00	Modal Hibah/ Donasi	25.500.000,00
Barang Cetakan	2.500.000,00	Modal Hibah	25.000.000,00
Materai	126.000,00	Sumbangan DINSOS	500.000,00
Aktiva Tetap dan Inventaris	6.988.080,00	SHU	3.143.967,57
Nilai Perolehan	6.988.080,00	SHU Tahun Berjalan	3.143.967,57
Komputer	3.420.000,00		
Printer	1.700.000,00		
Mebeller/Counter	713.900,00		
Filing Cabinet	137.390,00		
Pesawat Telepon/ Fax	500.000,00		
Inventaris Lainnya	516.790,00		
Rupa - Rupa Aktiva	8.682.200,00		
Biaya Pra Operasi	682.200,00		
Biaya-biaya Pra Operasi	682.200,00		
Software BMT On Line	8.000.000,00		
TOTAL AKTIVA	95.379.180,00	TOTAL PASSIVA	95.379.180,00

Yogyakarta, 31 Desember 2011

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui

LKM KUBE SEJAHTERA UMBULHARJO

Umbulharjo, Yogyakarta

NERACA
LKM KUBE SEJAHTERA UMBULHARJO

Senin, 31 Desember 2012

Neraca: **UNIT UMBULHARJO**

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	402.197.756,37	KEWAJIBAN	62.793.474,24
Aktiva Lancar	342.204.576,37	Kewajiban Segera	217.050,00
Kas	24.659.140,67	Titipan Dana Baitul Maal	217.050,00
Kas Umum	24.659.140,67	Penerimaan ZIS	217.050,00
Tabungan di Bank	30.446.887,00	Simpanan Wadi'ah	33.424.324,58
- Tabungan BRI	30.396.887,00	Simp. Mandiri Sejahtera (TAMARA)	33.424.324,58
- Tabungan BPD	50.000,00	Investasi Tidak Terikat	23.418.200,00
Simpanan di LKM Lain	15.000.000,00	Simpanan Mudharabah	23.418.200,00
Simpanan di Puskopsyah DIY	15.000.000,00	Simpanan Wajib Pembiayaan	23.418.200,00
Piutang	268.670.320,00	Rupa-Rupa Passiva	5.733.899,66
Piutang Murabahah	325.831.073,88	Cadangan/Dana-Dana SHU	80,00
Piutang Murabahah KUBE	91.316.609,88	Dana Sosial	80,00
Piutang Murabahah Non KUBE	234.514.464,00	Titipan - Titipan	5.733.819,66
Marjin MBA ditangguhkan -/-	(57.160.753,88)	Titipan Cadangan Resiko (CR)	4.533.819,66
Marjin MBA KUBE ditangguhkan	(12.799.277,88)	Titipan biaya RAT	1.200.000,00
Marjin MBA Non KUBE	(44.361.476,00)	MODAL	339.404.282,13
ditangguhkan		Modal Sendiri	40.951.000,00
Penengkapan	3.428.228,70	Simpanan Pokok	10.695.000,00
ATK	17.200,00	Simpanan Wajib	1.346.000,00
Barang Cetakan	3.249.028,70	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	28.910.000,00
Materai	162.000,00	Modal Penyertaan	250.000.000,00
Aktiva Tetap dan Inventaris	20.248.080,00	PENYERTAAN KUBE KEMENSOS	200.000.000,00
Nilai Perolehan	17.764.644,00	MODAL OPERASIONAL	50.000.000,00
Komputer	6.339.334,00	Modal Hibah/ Donasi	25.500.000,00
Printer	2.130.875,00	Modal Hibah	25.000.000,00
Mebeller/Counter	7.965.195,00	Sumbangan DINSOS	500.000,00
Filing Cabinet	121.654,00	SHU	22.953.282,13
Pesawat Telepon/ Fax	407.642,00	SHU Tahun Lalu	23.187.448,43
Inventaris Lainnya	358.275,00	SHU Tahun Berjalan	(234.166,30)
PAPAN NAMA LKM	441.669,00		
Akumulasi Penyusutan	2.483.436,00		
Akum peny. Komputer -/-	830.666,00		
Akum peny. Printer -/-	279.125,00		
Akum peny. Mebeler -/-	1.048.705,00		
Akum peny. Filing Cabinet -/-	15.736,00		
Akum peny. Pesawat Tlp/ Fax -/-	92.358,00		
Akum peny. inventaris lainnya -/-	158.515,00		
Akum. peny. PAPAN NAMA	58.331,00		
Rupa - Rupa Aktiva	39.745.100,00		
Biaya Pra Operasi	21.545.100,00		
Biaya-biaya Pra Operasi	16.382.235,00		
Amortisasi Pra Operasi -/-	662.865,00		
SOP+SOM	4.368.750,00		
Amortisasi SOP+SOM -/-	131.250,00		
Biaya dibayar dimuka (BDD)	2.700.000,00		
Kas Bon	1.500.000,00		
BDD RAT	1.200.000,00		
Software BMT On Line	14.970.142,00		
Amortisasi Software BMT On Line-/-	529.858,00		

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
TOTAL AKTIVA	429.997.331,08	TOTAL PASSIVA	429.997.331,08

Yogyakarta, 30 Nopember 2013

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui

Dicetak tanggal 30/11/2013 12:30:41



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LKM KUBE SEJAHTERA UMBULHARJO

Umbulharjo, Yogyakarta

NERACA **LKM KUBE SEJAHTERA UMBULHARJO**

Sabtu, 30 Nopember 2013

Neraca: UNIT UMBULHARJO

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	429.997.331,08	KEWAJIBAN	88.843.205,82
Aktiva Lancar	362.204.151,08	Kewajiban Segera	528.250,00
Kas	9.115.086,55	Titipan Dana Baitul Maal	528.250,00
Kas Umum	9.115.086,55	Penerimaan ZIS	528.250,00
Tabungan di Bank	129.045,00	Simpanan Wadi'ah	38.213.562,24
- Tabungan BRI	129.045,00	Simp. Mandiri Sejahtera (TAMARA)	38.213.562,24
Simpanan di LKM Lain	80.100.000,00	Investasi Tidak Terikat	27.334.000,00
Simpanan di Puskopsyah DIY	80.100.000,00	Simpanan Mudharabah	27.334.000,00
Piutang	270.822.705,93	Simpanan Wajib Pembiayaan	27.334.000,00
Piutang Murabahah	333.865.532,81	Rupa-Rupa Passiva	22.767.393,58
Piutang Murabahah KUBE	91.178.845,88	Cadangan/Dana-Dana SHU	14.460.011,92
Piutang Murabahah Non KUBE	242.686.686,93	Dana SHU belum dibagi (deviden)	8.066.867,39
Marjin MBA ditanggguhkan -/-	(63.042.826,88)	Dana Pendidikan	1.179.704,43
Marjin MBA KUBE ditanggguhkan	(14.864.277,88)	Dana Sosial	1.674.407,84
Marjin MBA Non KUBE	(48.178.549,00)	Dana Cadangan Resiko (CR)	3.539.032,26
Perengkapan	2.037.313,60	Titipan - Titipan	8.307.381,66
ATK	27.200,00	Titipan Cadangan Resiko (CR)	8.307.381,66
Barang Cetakan	1.961.113,60	MODAL	341.154.125,26
Materai	49.000,00	Modal Sendiri	40.519.000,00
Aktiva Tetap dan Inventaris	20.248.080,00	Simpanan Pokok	10.225.000,00
Nilai Perolehan	13.878.763,00	Simpanan Wajib	1.484.000,00
Komputer	5.033.997,00	Simpanan Pokok Khusus (Pendiri)	28.810.000,00
Printer	1.692.250,00	Modal Penyertaan	250.000.000,00
Mebeller/Counter	6.317.230,00	PENYERTAAN KUBE KEMENSOS	200.000.000,00
Filing Cabinet	96.926,00	MODAL OPERASIONAL	50.000.000,00
Pesawat Telepon/ Fax	262.508,00	Modal Hibah/ Donasi	25.500.000,00
Inventaris Lainnya	109.180,00	Modal Hibah	25.000.000,00
PAPAN NAMA LKM	366.672,00	Sumbangan DINSOS	500.000,00
Akumulasi Penyusutan	6.369.317,00	SHU	25.135.125,26
Akum peny. Komputer -/-	2.136.003,00	SHU Tahun Berjalan	25.135.125,26
Akum peny. Printer -/-	717.750,00		
Akum peny. Mebeler -/-	2.696.670,00		
Akum peny. Filing Cabinet -/-	40.464,00		
Akum peny. Pesawat Tlp/ Fax -/-	237.492,00		
Akum peny. inventaris lainnya -/-	407.610,00		
Akum. peny. PAPAN NAMA	133.328,00		
Rupa - Rupa Aktiva	47.545.100,00		
Biaya Pra Operasi	21.545.100,00		
Biaya-biaya Pra Operasi	15.529.980,00		
Amortisasi Pra Operasi -/-	1.515.120,00		
SOP+SOM	4.200.000,00		
Amortisasi SOP+SOM -/-	300.000,00		
Biaya dibayar dimuka (BDD)	10.500.000,00		
Kas Bon	10.500.000,00		
Software BMT On Line	14.137.508,00		
Amortisasi Software BMT On Line-/-	1.362.492,00		

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
TOTAL AKTIVA	402.197.756,37	TOTAL PASSIVA	402.197.756,37

Yogyakarta, 31 Desember 2012

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui

Dicetak tanggal 31/12/2012 12:29:45



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran:

Wawancara Mendalam Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pola Tanggung Renteng

Pertanyaan	Jawaban
A. Permohonan Pembiayaan Pola Tanggung Renteng 1. Persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan di lembaga ini? 2. Apakah persyaratan tersebut berlaku juga untuk nasabah/mitra lama yang mengajukan kembali (repeat order)? 3. Formulir yang disediakan apakah sudah diisi dengan lengkap? Bila ada kekurangan dalam pengisian siapa yang membantu mengisinya? 4. Berkas apa saja yang harus dilampirkan untuk melengkapi formulir yang telah diisi oleh nasabah/mitra? 5. Bagian apa/siapa yang meregister surat permohonan yang sudah lengkap? Selanjutnya kepada siapa berkas permohonan tersebut ditindak lanjuti?	
B. Penyidikan Dan Analisis Pembiayaan 1. Karyawan bagian apa yang bertugas melakukan investigasi dan analisa pembiayaan? 2. Sebelum melakukan analisa pembiayaan apakah ada konfirmasi kepada BI/Bank/LKM lain/Lembaga Keuangan Lainnya untuk pemeriksaan daftar hitam pembiayaan bermasalah? 3. Bagaimana proses penyelidikan kebenaran data/informasi nasabah dilakukan? 4. Persiapan apa saja yang dilakukan karyawan untuk menganalisa pembiayaan? 5. Analisa Pembiayaan. Jelaskan aspek-aspek di bawah ini untuk analisa pembiayaan. a. Informasi mengenai nasabah	

selengkapnya, mencakup perilaku/karakter nasabah, kemampuan dan pengalaman berusaha dan hal-hal lain yang mencerminkan kepribadian serta kemampuan nasabah/calon nasabah sebagai ukuran dari sebagian sumber dan daya pelunasan pembiayaannya.

- b. Aktivitas usaha nasabah, penilaian terhadap kegiatan usaha serta prospek usaha, dari nasabah
 - c. Jaminan, penilaian terhadap anggota kelompok lainnya
 - d. *Financial statement*, dimana diperlukan dan laporan keuangan dari nasabah sebagai salah satu data pokok mutlak untuk bagian analisis.
 - e. *Cash Flow Projection*, untuk jenis-jenis pembiayaan yang sifatnya *aflopend* (seperti pembiayaan industri konstruksi, pembiayaan musiman, pembiayaan investasi, dan pembiayaan lainnya yang sifatnya transaksional atau berangsuran dengan jangka waktu tertentu), harus disertai dengan *Cash Flow Projection*, sehingga dapat disusun jadwal waktu pelunasannya. Dimana disini berfungsi sebagai alat pembantu dalam menentukan kebutuhan maksimal nasabah untuk modal kerja.
 - f. Aktivitas Rekening, calon nasabah/nasabah yang memiliki rekening, harus menguraikan juga mengenai aktivitas rekening antara lain saldo tertinggi, terendah dan saldo rata-rata tiap bulan serta indikasi aktivitas rekening berupa jumlah/frekuensi mutasi debit dan pembiayaannya.
6. Analisa 5 C's (jelaskan aplikasi atau pelaksanaannya di lembaga ini!)
- Penilaian Watak (*Character*)
Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk

mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan Bank/LKM dikemudian hari. Bagaimana proses ini dilakukan di lembaga ini?

- Penilaian Kemampuan (*Capacity*). LKM harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga LKM yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Bagaimana proses ini dilakukan di lembaga ini?
- Penilaian terhadap modal (*Capital*). Melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Bagaimana proses ini dilakukan di lembaga ini?
- Penilaian terhadap agunan (*Collateral*). Untuk menanggung pembayaran pembiayaan macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Bagaimana proses ini dilakukan di lembaga ini?
- Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of*

<i>economy</i>). LKM harus menganalisa keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai LKM dapat diketahui. Bagaimana proses ini dilakukan di lembaga ini?	
C. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan 1. Penolakan Permohonan Pembiayaan a. Aspek-aspek apa saja yang menjadi pertimbangan penolakan? b. Siapa yang berwenang memutuskan? 2. Persetujuan Permohonan Pembiayaan a. Aspek-aspek apa saja yang menjadi pertimbangan penolakan? b. Siapa yang berwenang memutuskan?	
D. Pencairan Fasilitas Pembiayaan Pencairan fasilitas pembiayaan adalah setiap transaksi dengan menggunakan pembiayaan yang telah disetujui oleh LKM dan Perjanjian Pembiayaan sebagai perjanjian pokok dan pengikatan jaminannya berupa barang bergerak (dengan fidusia eigendom overdraft) atau barang tidak bergerak (dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atau dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan). Kemudian debitur dapat menarik dana tersebut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Cara pencairan fasilitas pembiayaan antara lain dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh LKM dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. 1. Bagaimana proses ini dilakukan di lembaga ini? 2. Berapa limit kewenangan pencairan dari hirarki karyawan terbawah sampai pejabat tertinggi?	

3. Sampai limit berapa pembiayaan harus mendapat persetujuan dari komisaris/pengawas/DPS? 4. Apa konsekuensi dari limit tersebut apabila terjadi permasalahan di kemudian hari?	
E. Monitoring Pembiayaan 1. Bagaimana monitoring pembiayaan dilakukan di lembaga ini? 2. Siapa karyawan yang melakukan? 3. Berapa kali dalam sebulan dilakukan? 4. Pembinaan apa saja yang dilakukan bank/bmt untuk menjaga loyalitas nasabah/mitra?	
F. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 1. Apa kriteria pembiayaan dianggap bermasalah? 2. Bagaimana proses penanganannya? 3. Sampai tenggat waktu berapa lama sehingga harus dilakukan eksekusi jaminan? 4. Bagaimana proses eksekusi dilakukan? 5. Jika terjadi permasalahan dalam eksekusi langkah apa yang diambil oleh lembaga? G. Pola Tanggung Renteng dan Risiko Pembiayaan 1. Bagaimana perkembangan pembiayaan pola tanggung renteng? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan pembiayaan di LKM KUBE? 3. Bagaimana pengaruh penerapan tanggung renteng terhadap tingkat risiko pembiayaan (<i>npf</i>)? F. Dinamika Aplikasi Pembiayaan Pola Tanggung Renteng 1. Apa saja permasalahan dalam penerapan pembiayaan pola tanggung renteng? 2. Bagaimana solusi dalam menghadapi	

permasalahan tersebut?	
------------------------	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA